

**Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra)
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023**

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

**Jl. Prof. HM Yamin, SH No. 41 Medan
Telp. (061) 4524550 – 4535320
20234
Email : dinkes@sumutprov.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan kehendak-Nya Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 selesai disusun. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan perubahannya adalah bagian dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan perubahannya, dan merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan kreativitas, inovasi dan kemampuan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu Sumatera Utara Maju, Aman, dan bermartabat.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merespon dinamika perubahan kebijakan terutama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta adanya wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik, maupun tanggapan yang konstruktif akan diterima dengan senang hati demi penyempurnaan Perubahan Renstra ini. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, kami ucapkan terima kasih.

Akhir kata, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan berupaya penuh untuk mewujudkan percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara demi meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat. Semoga seluruh daya dan upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, Januari 2022

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara,**



drg. ISMAIL LUBIS, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710204 200003 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.....	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	43
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	47
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI.....	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	55
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	67
4.1 Telaah Terhadap Visi Misi dalam Perubahan RPJMD yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	67
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	69
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	71



BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	74
BAB VI	KINERJA KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	90
BAB VII	PENUTUP.....	111
 LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Tahun 2021
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT Tahun 2021
Tabel 2.3	Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2021
Tabel 2.4	Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
Tabel 2.5	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
Tabel 3.3	Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Tabel 3.4	Telaahan KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 3.5	Kriteria Penilaian Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
Tabel 3.6	Nilai Skala Prioritas Untuk Setiap Isu Strategis
Tabel 3.7	Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas
Tabel 3.8	Prioritas Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
Tabel 3.9	Matriks Tujuan, Target, dan Indikator TPG/SDGs yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tabel 5.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 5.2	Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Bidang Kesehatan
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020

- Tabel 6.2 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023
- Tabel 6.3 Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2022-2023



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020
- Gambar 2.2 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk (1.000 Penduduk) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020
- Gambar 2.3 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (1.000 Penduduk) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020
- Gambar 2.4 Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020
- Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
- Gambar 4.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
- Gambar 5.1 Transformasi Program Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023



BAB 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan menjadi sebuah upaya bersama seluruh potensi bangsa Indonesia, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan dimotori dan dikoordinasikan oleh pemerintah. Pembangunan kesehatan disusun, direncanakan, dan dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia sebagai upaya mencapai derajat kesehatan yang baik, yang selanjutnya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari: Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sasaran pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Terdapat 15 (lima belas) indikator sasaran strategis nasional yang diupayakan pencapaiannya melalui arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya



promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan teknologi. Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tersebut dicapai melalui 5 (lima) strategi, yaitu peningkatan Kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional tersebut adalah melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, yang mengamanatkan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara disusun untuk periode tahun 2019-2023. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara



yang didasarkan pada data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen Perubahan Renstra yang memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan anggaran. Perubahan Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada perubahan kebijakan baik pada level pemerintah daerah, kementerian, maupun level kebijakan nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Isu-isu terkait kebijakan yang menyebabkan diperlukannya Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 antara lain: terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, bencana non alam berupa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) turut pula mempengaruhi kebijakan daerah terutama berkaitan dengan penganggaran program dan kegiatan prioritas. Perubahan kebijakan yang terjadi pada tataran nasional tersebut selanjutnya ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian terhadap Renstra yang telah disusun sebelumnya. Perubahan Renstra tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan



Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1.2.1 Landasan Ideal

Pancasila, sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi dengan negara dan bangsa lain. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada hakikatnya melakukan upaya pembangunan untuk mewujudkan kesehatan manusia.

1.2.2 Landasan Konstitusional

Undang Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bertujuan mendukung pencapaian program pembangunan kesehatan.

1.2.3 Landasan Operasional

- 1.2.3.1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 1.2.3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 1.2.3.3 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- 1.2.3.4 Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.2.3.5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 1.2.3.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 1.2.3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.3.8 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 1.2.3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 1.2.3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 1.2.3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 1.2.3.12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 1.2.3.13 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 1.2.3.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 1.2.3.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1.2.3.16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.3.17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.3.18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024;
- 1.2.3.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 1.2.3.20 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025;
- 1.2.3.21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- 1.2.3.22 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
- 1.2.3.23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019 - 2023;
- 1.2.3.24 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
- 1.2.3.25 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Renja PD dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 juga berfungsi sebagai acuan sektor kesehatan di Provinsi Sumatera Utara serta berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor lainnya.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah, serta dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam perencanaan jangka menengah. Penentuan maksud dan tujuan ini juga dengan memperhatikan banyak aspek dan hal terkait, termasuk Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara, yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat dalam kehidupan karena masyarakatnya memiliki kesehatan yang prima.



1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan.
2. Menyediakan tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisme antar pelaku pembangunan bidang kesehatan.

1.4 Sistematika

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 terdiri dari 7 (tujuh) Bab, dan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang memuat *Latar Belakang* yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kesehatan, fungsi Renstra Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan, keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja OPD, *Landasan Hukum* yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kesehatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, *Maksud dan Tujuan* yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, serta *Sistematika Penulisan* yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II adalah Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode sebelumnya, serta menganalisa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III adalah Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang memuat *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah* yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan beserta faktor faktor yang memengaruhinya, *Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih* yang mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan visi, misi serta program

kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang selanjutnya menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, *Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi* yang mengemukakan apa saja faktor faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi/kabupaten/kota, *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis* yang mengemukakan apa saja faktor faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, serta *Penentuan Isu-Isu Strategis* yang mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari (1) Gambaran pelayanan OPD; (2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi/kabupaten/kota; (4) implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan (5) Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

Bab IV adalah Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang memuat *Telaah Terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara* yang memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara beserta indikator kinerjanya, *Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara* yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab V adalah Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, yang memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

Bab VI adalah Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, yang mengemukakan indikator

kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII adalah Penutup, yang berisi harapan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terhadap P-Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023.



BAB 2

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (a) menyelenggarakan perumusan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
- (b) menyelenggarakan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
- (c) menyelenggarakan monitoring evaluasi dan pelaporan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
- (d) menyelenggarakan administrasi upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
- (e) menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari :



a. Kepala Dinas Kesehatan

b. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan urusan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- Sub Bagian Keuangan,
- Sub Bagian Program, Akuntabilitas, dan Informasi Publik

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menangani urusan peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga tingkat Provinsi. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,
- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat,
- Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menangani urusan yang meliputi urusan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit, surveilans epidemiologi, kekarantina kesehatan, kesehatan matra dan haji, penanggulangan dan/atau penyelidikan kejadian luar biasa (KLB), wabah dan bencana, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit menular vektor, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi. Bidang P2P membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.



e. Bidang Pelayanan Kesehatan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menangani urusan yang meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- Seksi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menangani urusan yang meliputi kefarmasian (obat, obat tradisional, bahan baku obat, industri kosmetika), makanan dan minuman, sarana produksi sediaan farmasi berupa industri farmasi, usaha kecil/mikro obat tradisional, industri bahan baku obat, industri kosmetika, bahan obat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), makanan dan minuman, sarana distribusi obat (pedagang besar farmasi pusat dan cabang), melaksanakan penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, reagensia, vaksin dan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), melaksanakan penanganan urusan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan produksi, distribusi, peredaran pre-market dan post-market Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di pasaran dan di fasilitas pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 seksi, yaitu:

- Seksi Kefarmasian;
- Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari:

1. UPT. Rumah Sakit Khusus Mata

Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam urusan pelayanan pengobatan, perawatan dan pemulihan kesehatan mata masyarakat sesuai standar yang ditentukan, pemenuhan standar mutu fasilitas penunjang medik dan keperawatan rumah sakit serta pembinaan, pengendalian, pencegahan dan promosi kesehatan mata masyarakat tingkat Provinsi. Kepala UPT. Rumah Sakit Khusus Mata membawahi 3 (tiga) sub bagian/seksi, yaitu:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pelayanan Medik;
- Seksi Penunjang Medik.

2. UPT. Rumah Sakit Khusus Paru

Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam urusan pelayanan pengobatan, perawatan dan pemulihan kesehatan paru masyarakat sesuai standar yang ditentukan, pemenuhan standar mutu fasilitas penunjang medik dan keperawatan rumah sakit serta pembinaan, pengendalian, pencegahan dan promosi kesehatan paru masyarakat tingkat Provinsi. Kepala UPT. Rumah Sakit Khusus Paru membawahi 3 (tiga) sub bagian/seksi, yaitu:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pelayanan Medik;
- Seksi Penunjang Medik.

3. UPT. Rumah Sakit Kusta Lau Simomo

Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam urusan pelayanan pengobatan, perawatan dan pemulihan kesehatan masyarakat secara umumnya, dan penyakit kusta secara khusus sesuai standar yang ditentukan, pemenuhan standar mutu fasilitas penunjang medik dan keperawatan kesehatan rumah sakit serta pembinaan, pengendalian, pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat terkait kusta tingkat Provinsi. Kepala UPT. Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo membawahi 3 sub bagian/seksi, yaitu:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pelayanan Medik;
- Seksi Penunjang Medik.



4. UPT. Laboratorium Kesehatan

Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pelayanan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan dan peningkatan kesehatan masyarakat berbasis pembinaan, pengendalian, pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat Provinsi. Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan membawahi 3 (tiga) sub bagian/seksi, yaitu:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Laboratorium Klinik;
- Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

5. UPT. Pelatihan Kesehatan

Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam urusan teknis, pelatihan, kajian dan penelitian kesehatan tingkat Provinsi, serta mendukung bidang terkait pada kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan teknis, pelatihan, kajian dan penelitian kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Kepala UPT. Pelatihan Kesehatan membawahi 3 (tiga) sub bagian/seksi, yaitu:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi;
- Seksi Pengajaran.

6. UPT. Rumah Sakit Indrapura

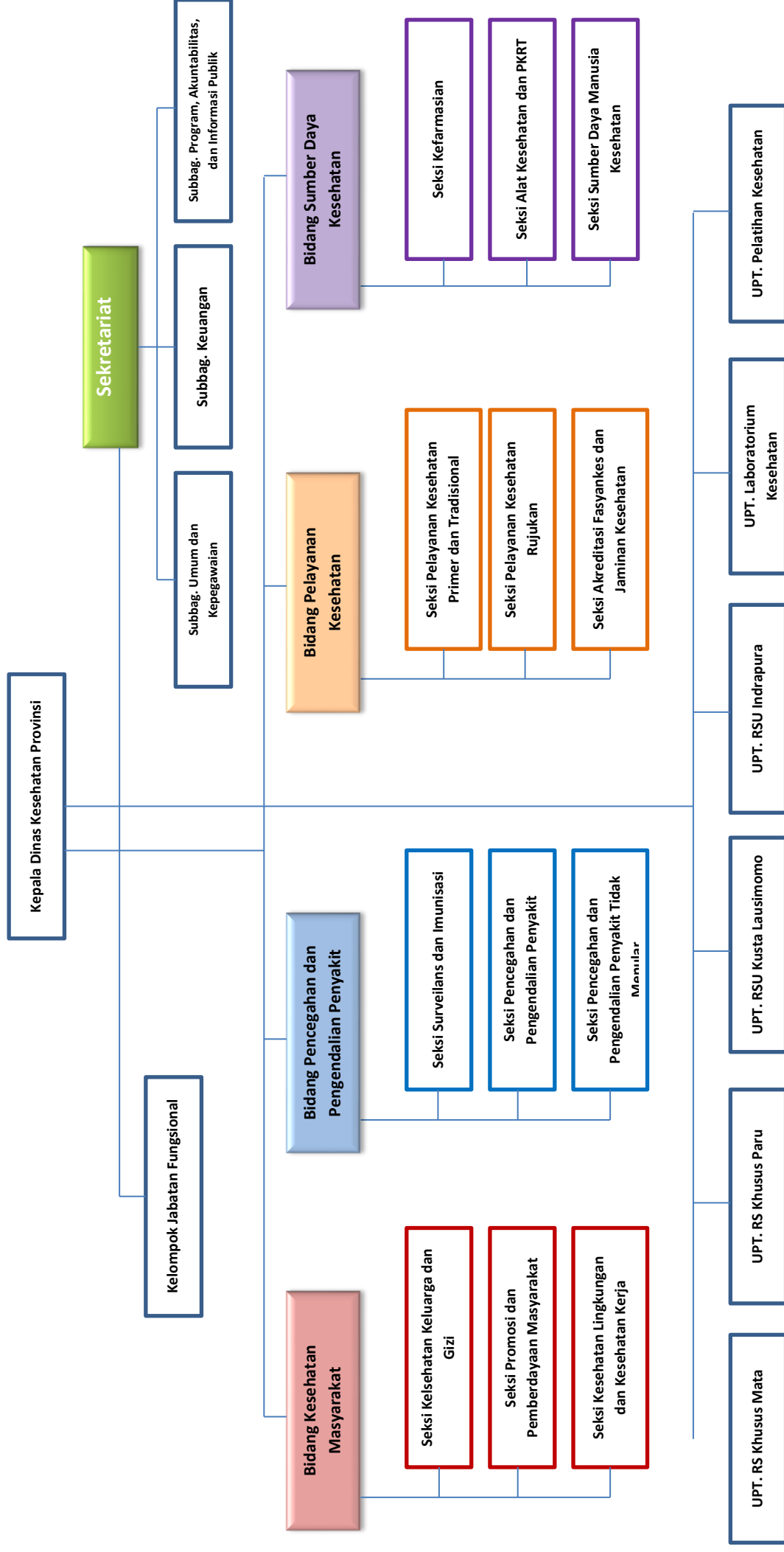
Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam pelayanan pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan pemulihan kesehatan masyarakat sesuai standar yang ditentukan, pemenuhan standar mutu fasilitas penunjang medik dan keperawatan rumah sakit. Kepala UPT. Rumah Sakit Indrapura membawahi 3 (tiga) sub bagian/seksi, yaitu:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pelayanan Medik;
- Seksi Penunjang Medik.

Di samping UPT, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga dibantu dengan Kelompok Jabatan Fungsional:

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing;
- 2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.





2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan fungsi dan tugas suatu Perangkat Daerah. Sampai dengan Tahun 2021, SDM yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara termasuk UPT berjumlah 938 orang, terdiri dari 284 orang laki-laki (30.50%) dan 654 orang perempuan (69.50%).

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Tahun 2021

No	Unit Kerja/UPT	Jumlah	Jenis Kelamin				Ket
			L	%	P	%	
1.	Dinas Kesehatan Provinsi	375	130	34.67	245	65.33	
2.	UPT. RS Khusus Mata	133	25	18.80	108	81.20	
3.	UPT. RS Khusus Paru	147	39	26.53	108	73.47	
4.	UPT RS Kusta Lausimomo	83	25	30.12	58	69.88	
5.	UPT. RSU Indrapura	67	20	29.85	47	70.15	
6.	UPT. Laboratorium Kesehatan	78	22	28.21	56	71.79	
7.	UPT. Pelatihan Kesehatan	54	23	42.59	31	57.41	
8.	Dipekerjakan diluar Dinkes	1	0	0.00	1	100.00	
	Jumlah	938	284	30.50	654	69.50	

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Salah satu fokusnya adalah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan yang diberikan SDM Kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan, ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT didominasi oleh ASN berpendidikan Sarjana (Strata 1) sebesar 43,60%, Sarjana Muda/Diploma (D3) sebesar 29,00%, dan magister kesehatan (S2) sebesar 14,50% (Tabel 2).

Tabel 2.2.
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT
Tahun 2021

INSTANSI	LAKI-LAKI							PEREMPUAN						
	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD
Dinas Kesehatan	25	65	17	-	15	7	1	57	136	33	1	17	-	1
UPT. RSK Mata	1	11	10	-	2	-	1	7	56	41	-	4	-	-
UPT. RSK Paru	5	13	14	-	6	-	1	9	27	56	1	14	1	-
UPT. RSK Lau simomo	-	8	8	2	6	1	-	5	14	32	2	4	1	-
UPT. RSU Indrapura	2	8	10	-	-	-	-	3	17	22	-	5	-	-
UPT. Labkes	1	8	8	-	5	-	-	3	28	16	-	9	-	-
UPT. Pelkes	5	7	1	-	10	-	-	13	10	4	-	4	-	-
Di luar Dinkes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
JUMLAH :	39	120	68	2	44	8	3	97	289	204	4	57	2	1

Tabel 2.3.
Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT
Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2021

Golongan dan Kepangkatan (Dinkes Provsu dan UPT)	Jumlah	Jenis Kelamin			
		Pria	%	Wanita	%
Golongan I	7	5	62.50	2	25.00
Golongan II	220	81	36.82	139	63.18
Golongan III	568	160	28.17	408	71.83
Golongan IV	143	38	26.57	105	73.43
Total	938	284	30.24	654	69.65

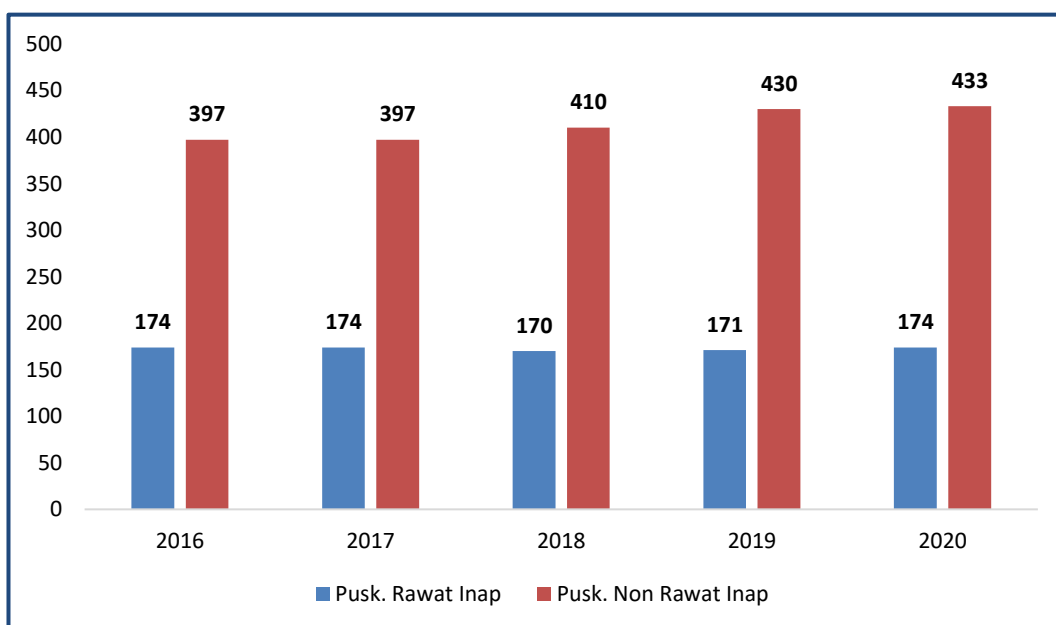
Dari Tabel 3 terlihat bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2021 didominasi oleh pangkat Golongan III sebanyak 568 Orang atau 60,55%.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kinerja Pemerintah terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakatnya. Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk menggambarkan daya keterjangkauan pelayanan kesehatan di suatu daerah terhadap penduduknya.

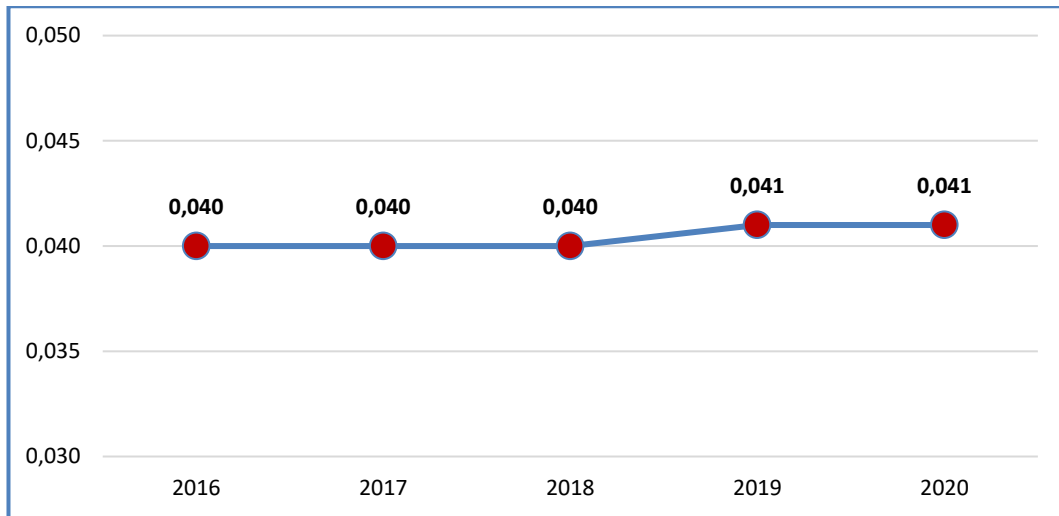
Fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara relatif cukup banyak baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah (Puskesmas) telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 607 unit Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara, dimana 174 diantaranya memiliki instalasi rawat inap. Puskesmas telah dilengkapi dengan jaringan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan memiliki jaringan kemitraan dengan Desa Siaga di beberapa wilayah.

Gambar 2.1
Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Gambar 2.2
Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk (1.000 penduduk)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

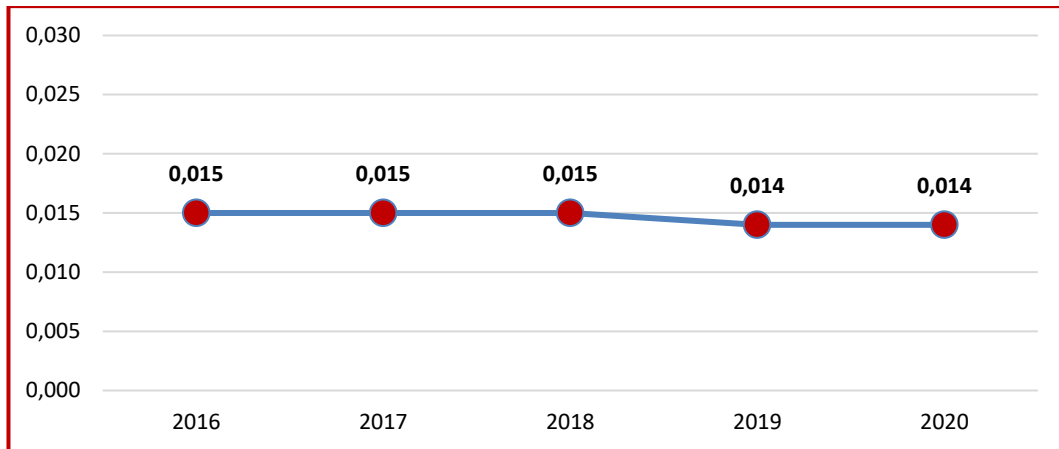


Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Sumatera Utara juga relatif telah memadai dengan berbagai jenis pelayanannya. Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 32 kabupaten/kota diantaranya telah memiliki Rumah Sakit Pemerintah dan telah operasional, termasuk RS Pratama di Kab. Nias Utara dan RS Pratama di Kab. Nias Barat. Dengan demikian, hanya Kota Gunungsitoli satu-satunya daerah yang belum memiliki Rumah Sakit Pemerintah.

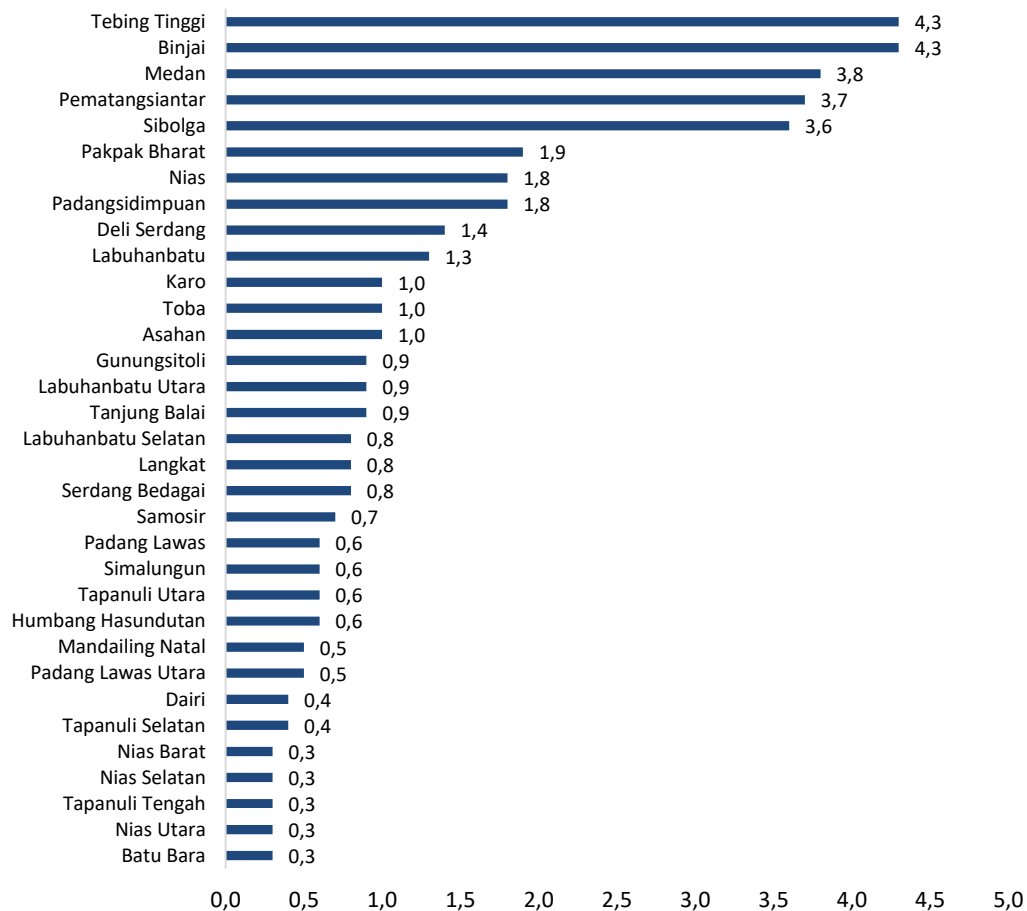
Terdapat 208 Rumah Sakit Pemerintah dan swasta di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, terdiri dari 183 RSU dan 25 RS Khusus. Rasio tempat tidur (TT) RS di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,5 TT per 1.000 penduduk. Rasio tersebut sudah mencukupi bila dibandingkan dengan standar nasional dan *World Health Organization* (WHO), yaitu 1 TT per 1.000 penduduk. Namun demikian, persebaran TT Rumah Sakit belum merata, dimana sebagian besar TT Rumah Sakit terkonsentrasi di wilayah kota Medan dan Deli Serdang. Hal ini berimplikasi pada akses masyarakat terhadap TT Rumah Sakit di kabupaten/kota, dimana masih terdapat 20 (dua puluh) kabupaten/kota dengan rasio tempat tidur terhadap penduduk belum mencukupi standar WHO.

Gambar 2.3
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (1.000 penduduk)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Gambar 2.4
Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Fasilitas pelayanan kesehatan pendukung lainnya seperti klinik kesehatan dan apotek juga berkembang dengan baik seiring dengan semakin besarnya peran swasta dalam pembangunan kesehatan. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 874 klinik dan 1.587 apotek yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Distribusi fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara per kabupaten/kota tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah			
	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Apotek
Nias	1	12	1	2
Mandailing Natal	3	26	19	22
Tapanuli Selatan	1	16	1	2
Tapanuli Tengah	1	25	14	12
Tapanuli Utara	2	20	11	9
Toba	2	19	13	15
Labuhanbatu	7	15	54	49
Asahan	11	29	36	41
Simalungun	7	46	12	92
Dairi	1	18	17	23
Karo	5	19	59	28
Deli Serdang	22	34	168	171
Langkat	7	30	34	61
Nias Selatan	2	36	8	5
Humbang Hasundutan	1	12	6	11
Pakpak Bharat	1	18	1	3
Samosir	1	12	8	7
Serdang Bedagai	6	20	8	77
Batu Bara	3	15	38	55
Padang Lawas	2	16	7	12
Padang Lawas Utara	2	17	0	7
Labuhanbatu Selatan	3	17	21	23
Labuhanbatu Utara	5	18	31	18
Nias Utara	1	11	0	1
Nias Barat	1	8	2	0
Sibolga	3	5	4	10
Tanjung Balai	2	8	7	21
Pematangsiantar	8	19	31	58
Tebing Tinggi	6	9	20	25
Medan	75	41	181	625
Binjai	11	8	43	44
Padangsidempuan	4	10	11	32
Gunungsitoli	1	8	8	26
Jumlah	208	607	874	1.587



Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) merupakan salah satu instrumen dalam menilai kepatuhan Fasyankes terhadap standar. Dari 607 Puskesmas yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020, 558 Puskesmas diantaranya telah terakreditasi (91,93%). Dari 208 Rumah Sakit yang ada, sebanyak 163 diantaranya telah terakreditasi (78,36%).

Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara membutuhkan aset sebagai salah satu sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi serta merupakan suatu bentuk investasi. Aset tanah yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 adalah 1.774.244,60 m² dengan rincian kantor Dinas Kesehatan Provinsi seluas 6.054 m², UPT. RS Khusus Mata seluas 4.591 m², UPT. RS Khusus Paru seluas 2.016 m², UPT. RSU Kusta Lausimomo seluas 1.060.000 m², UPT. RS Indrapura seluas 5.206,95 m², UPT. Laboratorium Kesehatan seluas 10.002 m², UPT. Pelatihan Kesehatan seluas 8.914 m² dan sisanya berupa lahan untuk gudang, IFP, dan mess.

Di samping aset tanah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT juga didukung dengan aset kendaraan roda 4 roda 2. Barang inventaris lain yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara antara lain meliputi alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-alat keamanan, instalasi, jaringan, dan lainnya keseluruhan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Analisis terhadap kinerja pelayanan dilakukan untuk melihat seberapa besar peran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan urusan kesehatan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara, seberapa kuat daya dukung sumber dayanya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tingkat ketercapaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, perbandingan capaian kinerja antara Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.



Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	SPM Kesehatan (Permenkes No. 741/ Menkes/Per/ VII/ 2008) Tahun 2010 - 2015																		
A.	Pelayanan Kesehatan Dasar																		
1.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)				90%	91%	92%	93%	86%	84.1%	75.5%	89%	89%	86%	0.93	0.83	0.97	0.96	1.00
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani				75%	76%	77%	78%	79%	-	30.85%	66.97%	73.17%	66%	-	0.40	0.87	0.94	0.83
3.	Cakupan persalinan yang ditolong oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan (%)				86%	87%	88%	89%	85%	86%	76.2%	89.50%	90.3%	85%	1.00	0.87	1.02	1.01	1.00
4.	Cakupan pelayanan nifas (%)				86%	87%	88%	89%	83%	-	-	84%	87.7%	82%	-	-	0.95	0.98	0.99
5.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Cakupan kunjungan bayi (%)				88%	89%	90%	91%	80%	90.70%	81.5%	83.80%	88.60%	92%	1.03	0.91	0.93	0.97	1.15
7.	Cakupan desa UCI (%)				80%	85%	90%	95%	80%	74.7%	75.4%	72.8%	74.5%	81.7%	0.93	0.89	0.81	0.78	1.02
8.	Cakupan pelayanan balita (%)				85%	86%	87%	88%	78%	70.82%	-	82%	88.2%	85%	0.83	-	0.94	1.00	1.09
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada 6-24 bulan keluarga miskin (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11.	Cakupan penjangkaran siswa SD dan setingkat (%)				84%	86%	87%	88%	65%	-	-	83.7%	88.2%	79%	-	-	0.96	1.00	1.21
12.	Cakupan peserta KB aktif (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (%)																			
13.	AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun (%)				>2	>2	>2	>2	>2	2.26	2.18	2.11	2.2	1.8	1.00	1.00	1.00	1.00	0.9
14.	Penemuan penderita pneumonia balita (%)				20%	25%	30%	35%	40%	24%	41.66%	18.86%	11.7%		1.20	1.67	0.63	0.33	
15.	Penemuan pasien baru TB BTA positif (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Penderita DBD yang ditangani (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Penemuan penderita Diare (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
B. Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kab/kota (%)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
C. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB																			
	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.7%	100%	100%	1.00	1.00	0.91	1.00	1.00

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
D. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat																			
	Cakupan desa siaga aktif (%)				22%	25%	30%	35%	40%	26%	28.7%	30.01%	36.64%	37.5%	1.18	1.15	1.00	1.05	0.94
II Standar IKK (PP No. 6 Tahun 2008)																			
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat																			
1. Kesejahteraan sosial																			
1.	Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Angka usia harapan hidup (tahun)				71.7	71.8	71.9	71.10	72	68.04	68.21	68.29	68.37	68.45	0.95	0.95	0.95	0.96	0.95
3.	Persentase balita gizi buruk				22%	21.5%	21%	20.5%	20%	21.05%	21.30%	11.40%	18.20%	19.7%	0.96	0.99	0.54	0.89	1.01
B. Aspek Pelayanan Umum																			
1. Pelayanan Dasar																			
1.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per satuan penduduk				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.25	0.26	0.32	0.28	-	-	-	-	-	-
2.	Rasio dokter per satuan penduduk				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Renstra Dinkes Provsu																			
1.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin				90%	91%	92%	80%	82%	72.07%	79.43%	78.59%	85.17%	93.35%	0.80	0.87	0.85	1.06	1.14
2.	Jumlah RSU dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar				12 RSU & 6 Pusk.	14 RSU & 12 Pusk.	16 RSU & 18 Pusk.	18 RSU & 24 Pusk.	20 RSU & 30 Pusk.	12 RSU & 6 Pusk.	9 RSU & 12 Pusk.	13 RSU & 18 Pusk.	18 RSU & 28 Pusk.	18 RSU & 41 Pusk.	1.00	0.80	0.91	1.09	1.15
3.	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di sarana pelayanan kesehatan dasar				36%	38%	40%	42%	44%	37%	-	39.81%	52.39%	44.63%	1.02		0.99	1.24	1.01

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.	Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP dan GDP	62%	64%	66%	68%	70%	70%	83.5%	65%	66.66%	67.13%	70%	1.34	1.01	1.01	0.99	1.00		
5.	Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat	15%	20%	25%	30%	35%	70%	20.02%	25%	27.72%	40%	1.33	1.25	1.11					1.14
6.	Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan GMP dan GDP	62%	64%	66%	68%	70%	70%	75%	65.22%	74%	69.86%	68%	1.21	1.02	1.12	1.03	0.97		
7.	Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	86%	87%	88%	89%	85%	85%	86%	76.2%	89.5%	90.3%	85%	1.00	0.87	1.02	1.01	1.00		
8.	Cakupan pelayanan antenatal K4	90%	91%	92%	93%	86%	86%	84.1%	75.5%	89%	89%	86%	0.93	0.83	0.97	0.96	1.00		
9.	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	75%	76%	77%	78%	79%	79%	-	30.85%	66.97%	73.17%	66%	-	0.40	0.87	0.94	0.83		
10.	Cakupan pelayanan ibu nifas	86%	87%	88%	89%	83%	83%	-	-	84%	87.7%	82%	-	-	0.95	0.98	0.99		
11.	Jumlah Pusk. RI yang mampu PONE	140	143	146	149	152	152	147	153	156	156	161	1.05	1.07	1.07	1.05	1.06		
12.	Cakupan kunjungan neonatus (KN Lengkap)	86%	87%	88%	89%	80%	80%	86.90%	73.60%	83.80%	89%	85%	1.01	0.84	0.95	1.00	1.06		
13.	Cakupan kunjungan bayi	88%	89%	90%	91%	80%	80%	90.70%	81.5%	83.80%	88.6%	92%	1.03	0.91	0.93	0.97	1.15		
14.	Cakupan pelayanan anak balita	85%	86%	87%	88%	78%	78%	70.82%	-	82%	88.2%	85%	0.83	-	0.94	1.00	1.09		
15.	Cakupan penjangkaran siswa SD dan setingkat	84%	86%	87%	88%	65%	65%	-	-	83.7%	88.2%	79%	-	-	0.96	1.00	1.21		
16.	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja	161 Pusk.	166 Pusk.	171 Pusk.	176 Pusk.	181 Pusk.	181 Pusk.	74 Pusk.	171 Pusk.	-	185 Pusk.	190 Pusk.	0.46	1.03	-	1.05	1.05		

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
17.	Jumlah Puskesmas santun usia yang terbentuk di kab/kota				70 Pusk.	75 Pusk.	80 Pusk.	85 Pusk.	90 Pusk.	70 Pusk.	97 Pusk.	112 Pusk.	136 Pusk.	176 Pusk.	1.00	1.49	1.40	1.60	1.95		
18.	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut				62%	64%	66%	68%	70%	62.08%	63.76%	68.45%	68.93%	95%	1.00	0.99	1.04	1.01	1.36		
19.	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar				347 Pusk.	380 Pusk.	413 Pusk.	446 Pusk.	479 Pusk.	370 Pusk.	456 Pusk.	496 Pusk.	-	543 Pusk.	1.07	1.20	1.20	-	1.13		
20.	Jumlah Puskesmas DTPK/DBK yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Pusk.	42 Pusk.	44 Pusk.	46 Pusk.	48 Pusk.	-	-	43 Pusk.	47 Pusk.	49 Pusk.	-	-	0.98	1.02	1.02		
21.	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi				15 Pusk.	20 Pusk.	30 Pusk.	40 Pusk.	50 Pusk.	0 Pusk.	0 Pusk.	20 Pusk.	153 Pusk.	408 Pusk.	0	0	0.67	3.82	8.16		
22.	Jumlah Puskesmas yang menerapkan manajemen Puskesmas sesuai standar				33 Pusk.	66 Pusk.	99 Pusk.	132 Pusk.	165 Pusk.	33 Pusk.	78 Pusk.	98 Pusk.	245 Pusk.	278 Pusk.	1.00	1.18	0.99	1.86	1.68		
23.	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar				33 Pusk.	66 Pusk.	99 Pusk.	132 Pusk.	165 Pusk.	36 Pusk.	49 Pusk.	-	108 Pusk.	165 Pusk.	1.09	0.74	-	0.82	1.00		
24.	Persentase kab/kota yang minimal memiliki 4 Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional				30%	35%	40%	45%	50%	24.25%	54%	54%	60.60%	100%	0.81	1.54	1.35	1.35	2.00		
25.	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja				17 kab/kota	21 kab/kota	24 kab/kota	28 kab/kota	33 kab/kota	6 kab/kota	-	20 kab/kota	28 kab/kota	33 kab/kota	0.35	-	0.83	1.00	1.00		

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target indikator lainnya (5)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014 (6)	2015 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2014 (11)	2015 (12)	2016 (13)	2017 (14)	2018 (15)	2014 (16)	2015 (17)	2016 (18)	2017 (19)	2018 (20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)															
26.	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3 Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga	4 kab/kota a	8 kab/kota a		4 kab/kota a	8 kab/kota a	12 kab/kota a	14 kab/kota a	18 kab/kota a	8 kab/kota a	12 kab/kota a	12 kab/kota a	14 kab/kota a	32 kab/kota a	2.00	1.50	1.00	1.00	1.78
27.	Jumlah pesantren yang memiliki poskestren	55	60		55	60	65	70	80	78	-	68	70	70	1.42	-	1.05	1.00	0.87
28.	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3 Puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera, dan gigi mulut)	20 kab/kota	24 kab/kota		20 kab/kota	24 kab/kota	28 kab/kota	30 kab/kota	33 kab/kota	16 kab/kota	24 kab/kota	24 kab/kota	30 kab/kota	33 kab/kota	0.80	1.00	0.86	1.00	1.00
29.	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	55%	57%		55%	57%	59%	61%	65%	60.3%	62.23%	62.81%	63.55%	66.13%	1.09	1.09	1.06	1.04	1.02
31.	Jumlah Poskesdes di desa/ kelurahan siaga	2.770 unit	2.800 unit		2.770 unit	2.800 unit	2.850 unit	2.900 unit	2.950 unit	-	-	-	2.810 unit	3.290 unit	-	-	-	0.97	1.11
32.	Persentase SD yang mempromosikan kesehatan	25%	28%		25%	28%	31%	34%	36%	29.6%	30.6%	32%	39.3%	42.25%	1.18	1.09	1.03	1.15	1.17
33.	Persentase Posyandu pumama dan mandiri	35%	38%		35%	38%	41%	43%	45%	40.07%	-	42.65%	50.85%	51.26%	1.14	-	1.04	1.18	1.14
34.	Persentase desa siaga aktif	22%	25%		22%	25%	30%	35%	40%	26%	28.7%	30.01%	36.64%	37.5%	1.18	1.15	1.00	1.05	0.94
35.	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan TOGA	20 Kab/kota	22 Kab/kota		20 Kab/kota	22 Kab/kota	24 Kab/kota	26 kab/kota	28 kab/kota	22 kab/kota	24 kab/kota	28 kab/kota	30 kab/kota	33 kab/kota	1.10	1.09	1.17	1.15	1.18
36.	Persentase gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
37.	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	40%	40%		40%	40%	50%	50%	55%	35.80%	36.10%	42.89%	45.92%	49.66%	0.89	0.90	0.86	0.92	0.90

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
38.	Cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium				85%	85%	85%	87%	90%	-	-	99,99 %	98,08%	100%	-	-	1.18	1.13	1.11
39.	Persentase Anak 6-59 bulan mendapat Vit. A				80%	80%	81%	82%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Persentase Ibu hamil mendapat tablet Fe				70%	71%	74%	78%	80%	-	-	-	76.46%	79.18 %	-	-	-	0.98	0.99
41.	Persentase Kab/kota yang melaksanakan survellians gizi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	100%
42.	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)				70%	70%	70%	75%	80%	78%	80%	69%	85.47%	87.68 %	1.11	1.14	0.98	1.14	1.09
43.	Persentase Penyediaan Buffer Stock MP-ASI untuk bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
44	Persentase Ibu hamil KEK dan Anemia mendapatkan PMT				40%	45%	48%	50%	55%	38%	54.67%	-	89.08%	90.48 %	0.95	1.21	-	1.78	1.65
45	Prevalensi Stunting pada balita				n/a	n/a	n/a	28%	26%	-	-	-	28.4	32.3%	-	-	-	1.01	1.24
46	Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan				72%	73%	74%	75%	78%	62.4%	70%	70%	75%	78.37 %	0.87	0.96	0.94	1.00	1.00
47	Persentase keluarga menggunakan air bersih				60%	62%	64%	66%	68%	60%	60%	-	69%		1.00	0.97	-	1.04	
48	Persentase Keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan				66%	67%	68%	69%	70%	65.1%	66%	-	72%	71.38 %	0.99	0.98	-	1.04	1.02
49	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan				75%	76%	77%	78%	79%	-	-	75%	78%	79.97 %	-	-	0.97	1.00	1.01
50	Jumlah kab/kota Sehat				7 K/K	8 K/K	9 K/K	10 K/K	11 K/K	4 K/K	7 K/K	7 K/K	10 K/K	10 K/K	0.80	0.87	0.78	1.00	0.91

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
51	Jumlah Puskesmas yang memiliki Klinik sanitasi				297 Pusk.	300 Pusk.	303 Pusk.	306 Pusk.	310 Pusk.	-	-	116 Pusk.	306 Pusk.	315 Pusk.	-	-	0.39	1.00	1.02
52	Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan				45%	48%	51%	54%	57%	-	46%	-	61%	72.09%	-	0.96	-	1.13	1.26
53	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan				75%	77%	78%	79%	80%	-	-	72%	79%	80%	-	-	0.92	1.00	1.00
54	Jumlah RS yang melakukan pengolahan limbah medis RS				0 RS	28 RS	38 RS	48 RS	58 RS	0 RS	12 RS	20 RS	48 RS	57 RS	-	0.43	0.53	1.00	0.98
55	Persentase kab/kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
56	Angka case detection rate penyakit TB				83%	84%	85%	86%	87%	78.3%	83.4%	77.8%	61.5%	61,20	0.94	0.99	0.91	0.71	0.70
57	Angka keberhasilan pengobatan TB				≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥90%	94%	93.2%	92.3%	93.1%	92.50%	0.99	0.98	0.97	0.98	1.03
58	Angka CNR (case notification rate) program TB per 100.000 penduduk				170	170	170	170	170	165	172	174	166	186	0.97	1.01	1.02	0.98	1.09
59	Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus pneumonia pada balita				20%	25%	30%	35%	40%	24%	41.66%	18.86%	11.71%		1.20	1.67	0.63	0.33	
60	Angka penemuan kasus baru Kusta per 100.000 penduduk				<5	<5	<5	<5	<5	1.34	1.43	1.27	1.03	<5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
61	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi hepatitis B				5 kab/kota	10 kab/kota	15 kab/kota	20 kab/kota	25 kab/kota	-	10 kab/kota	15 kab/kota	18 kab/kota	32 kab/kota	-	1.00	1.00	0.90	1.28
62	CFR diare pada saat kejadian luar biasa (KLB)				<1.2%	<1.2%	<1%	<1%	<1%	1.86%	2.73%	2.27%	0%	<1.2%	0.64	0.44	0.44	1.00	1.00

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
63	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid				10 kab/ kota	20 kab/ kota	30 kab/ kota	33 kab/ kota	33 kab/ kota	-	6 kab/ kota	18 kab/ kota	21 kab/ kota	32 kab/ kota	-	0.30	0.60	0.64	0.97
64	Prevalensi kecacingan pada anak sekolah				<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	29%	25.7%	22.5%	14.60%	14.60%	0.69	0.78	0.89	1.00	1.00
65	Angka kecacatan tingkat 2 kusta				<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	11%	22%	18%	15%	14%	0.91	0.45	0.55	0.67	0.71
66	Jumlah penduduk kelompok usia >15 tahun yang mengikuti tes HIV				12.000 orang	13.000 orang	14.000 orang	15.000 orang	16.000 orang	36.330 orang	42.258 orang	73.090 orang	81.551 orang	77.433 orang	3.02	3.25	5.22	5.44	4.84
67	Persentase ibu hamil HIV positif mendapatkan ARV				50%	60%	70%	75%	80%	72%	78.3%	78.6%	97.9%	98%	1.44	1.30	1.12	1.30	1.23
68	Persentase kasus IMS yang diperiksa dan diobati				40%	55%	70%	75%	80%	90%	-	98.5%	99.38%	99,60	2.25	-	1.40	1.32	1.25
69	Persentase ODHA (orang dengan HIV/ AIDS) mendapatkan pengobatan ART				80%	82%	83%	84%	85%	79%	80%	85.4%	86%	88,8%	0.99	0.97	0.96	1.02	1.04
70	Angka kematian Jemaah haji kurang dari 2 per 1.000 jemaah haji				<2 / 1.000 jemaah	<2 / 1.000 jemaah	<2 / 1.000 jemaah	<2 / 1.000 jemaah	<2 / 1.000 jemaah	2.1/ 1.000 jemaah	-	-	3.9/ 1.000 jemaah	2,5/1.0 000 jemaah					0.84
71	Angka penemuan kasus baru Frambusia per 100.000 penduduk				<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.008	-	<0.02	0	0	1	-	1	1	1
72	Angka kesakitan DBD per 1.000 penduduk				49	48	47	46	45	21.2	24.1	59.2	38.9	40.06	2,31	1,91	0,81	1,21	1,12
73	Angka zoonosis lainnya (flu burung, rabies, anthrax, leptospirosis) ditangani sesuai standar				90%	92%	94%	95%	>95%	74.58%	72.67%	78%	72.34%	72,36	0.83	0.79	0.83	0.76	0,76
74.	Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan obat filariasis				65%	68%	70%	72%	75%	73.2%	85%	85%	86.33%	86,33%	1.13	1.25	1.21	1.20	1,15

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
75.	Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API)				1	1	1	1	1	1	0.4	0.25	0.15	0.09	1.00	2.5	4.00	6.67	11,11		
76.	Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)				80%	85%	90%	95%	80%	74.7%	75.4%	72.8%	74.5%	81,7%	0.93	0.89	0.81	0.78	1,02		
77.	Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap				85%	88%	90%	92%	95%	61.20%	80%	77.4%	82.1%	82,1%	0.72	0.91	0.86	0.89	0.86		
78.	Persentase anak usia sekolah dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi				92%	93%	94%	95%	96%	-	88.5%	96.8%	95.7%	90.2%		0.95	1.03	1.01	0.94		
79.	Angka non acute flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk				>2	>2	>2	>2	>2	2.26	2.18	2.11	2.2	1.8	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90		
80.	Persentase penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB <24 jam pada desa/kel yang terjadi KLB				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.7%	100%	100%	1.00	1.00	0.92	1.00	1.00		
81.	Persentase kab/kota yang melakukan penanganan dan penanggulangan wabah dan bencana				33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
82.	Persentase kab/kota yang melaksanakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular				33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	30 K/K	-	33 K/K	33 K/K	33 K/K	0.91	-	1.00	1.00	1.00		
83.	Jumlah kab/kota melaksanakan mapping vector penyakit				30%	40%	50%	60%	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
84.	Jumlah kab/kota yang melaksanakan surveilans dan KIE kesehatan matra				33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	33 K/K	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
85.	Jumlah RSUD yang menyelenggarakan PONEK				21 RSUD	24 RSUD	27 RSUD	30 RSUD	34 RSUD	20 RSUD	24 RSUD	27 RSUD	28 RSUD		0.95	1.00	1.00	0.93		
86.	Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar				21 RSUD	24 RSUD	27 RSUD	30 RSUD	34 RSUD	19 RSUD	24 RSUD	27 RSUD	28 RSUD		0.90	1.00	1.00	0.93		
87.	Jumlah RSUD yang menerapkan PPK-BLUD				8 RSUD	11 RSUD	13 RSUD	15 RSUD	17 RSUD	9 RSUD	12 RSUD	15 RSUD	18 RSUD		1.12	1.09	1.15	1.00		
88.	Jumlah RSUD yang menerapkan SPM RS				21 RSUD	23 RSUD	25 RSUD	29 RSUD	24 RSUD	20 RSUD	23 RSUD	25 RSUD	30 RSUD		0.95	1.00	1.00	1.03		
89.	Jumlah RSUD yang menerapkan program keselamatan pasien				6 RSUD	10 RSUD	14 RSUD	18 RSUD	20 RSUD	-	-	14 RSUD	22 RSUD		-	-	1.00	1.22		
90.	Jumlah RS yang terakreditasi				78 RS	82 RS	86 RS	90 RS	94 RS	74 RS	80 RS	94 RS	126 RS		0.95	0.97	1.09	1.40		
91.	Jumlah RS mendapatkan penetapan kelas				135 RS	155 RS	175 RS	195 RS	205 RS	99 RS	120 RS	168 RS	201 RS		0.73	0.77	0.96	1.03		
92.	Jumlah RS yang menerapkan standar sarana dan prasarana				92 RS	102 RS	112 RS	122 RS	132 RS	89 RS	102 RS	110 RS	116 RS		0.97	1.00	0.98	0.95		
93.	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi				90%	95%	95%	95%	95%	64.9%	100%	95%	95%	98%	0.72	1.05	1.00	1.00	1.03	
94.	Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional				20%	30%	70%	80%	100%	20%	30%	45%	80%	85%	1.00	1.00	0.64	1.00	0.85	
95.	Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi				20 plthn	25 plthn	30 plthn	35 plthn	40 plthn	20 plthn	20 plthn	40 plthn	32 plthn	38 plthn	1.00	0.80	1.33	0.91	0.95	
96.	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan SBH				14 K/K	20 K/K	24 K/K	29 K/K	33 K/K	-	14 K/K	14 K/K	28 K/K	28 K/K	-	0.70	0.58	0.96	0.85	
96.	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan saka bakti husada (SBH)				14 K/K	20 K/K	24 K/K	29 K/K	33 K/Ka	-	14 K/K	14 K/K	28 K/K	28 K/K	-	0.70	0.58	0.96	0.85	

No .	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun						
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
96.	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan saka bakti husada (SBH)				14 K/K	20 K/K	24 K/K	29 K/K	33 K/Ka		-	14 K/K	14 K/K	28 K/K	28 K/K		-	0.70	0.58	0.96	0.85
97.	Persentase RSUD yang memenuhi standar ketenagaan dokter spesialis penunjang				50%	60%	70%	80%	100%		-	-	3%	78.98%	81.8%		-	-	0.04	0.99	0.82
98.	Rasio tenaga medis per Puskesmas				Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1		0.92	0.92	0.95	1	1		0.92	0.92	0.95	1.00	1.00
99.	Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kes.				75%	80%	85%	90%	95%		100%	100%	100%	100%			1.33	1.25	1.18	1.11	
100	Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan				60%	70%	82%	90%	85%		49.61%	58.82%	61.86%	68.63%			0.83	0.84	0.75	0.76	
101	Jumlah kab/ kota yang bekerja sama dengan BPJS				5 K/K	11 K/K	17 K/K	24 K/K	30 K/K		-	-	30 K/K	33 K/K			-	-	1.76	1.37	
102	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan yang dihasilkan per tahun				3 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.		5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.			1.67	1.00	1.00	1.00	
103	Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun				7 dok.	7 dok.	7 dok.	7 dok.	7 dok.		7 Dok.	9 Dok.	7 Dok.	9 Dok.			1.00	1.28	1.00	1.28	
104	Persentase kab/kota memiliki profil kesehatan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			1.00	1.00	1.00	1.00	
105	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan SIK				33	33	33	33	33		33	33	33	33			1.00	1.00	1.00	1.00	
106	Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilaksanakan				3 pnlt	6 pnlt	9 pnlt	12 pnlt	3 pnlt		-	-	-								

Tidak semua indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 berhasil dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu, dari total 106 indikator kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, beberapa diantaranya belum mencapai target sebagaimana ditetapkan.

Tidak tercapainya target Umur Harapan Hidup (UHH) disebabkan oleh berbagai permasalahan pada setiap tahapan upaya kesehatan, terutama terkait kesehatan ibu dan anak. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan para ibu akan pentingnya melakukan kontrol rutin sejak masa kehamilan sampai nifas serta terbatasnya akses dan mutu kepada pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas berkontribusi terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Situasi pengendalian penyakit belum menunjukkan kondisi yang optimal. Target indikator "Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)" dan "Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap" belum tercapai. Pengendalian penyakit Tuberkulosis (TBC) juga belum memadai, terlihat dari capaian indikator "Angka *case detection rate* penyakit TB" dan "Angka keberhasilan pengobatan TB" yang masih di bawah target yang telah ditetapkan. Namun demikian, upaya pengendalian penyakit HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) menunjukkan kinerja yang menggembirakan, terutama pada pencapaian indikator penyediaan ARV bagi ibu hamil dengan status HIV positif, pengobatan ART bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), serta pemeriksaan dan pengobatan kasus-kasus IMS.

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) di Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan melalui surveilans deteksi dini serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PTM di seluruh kabupaten/kota. Dalam rangka peningkatan pengendalian PTM, telah dibentuk Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) sebagai salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Sampai dengan tahun 2020, terdapat 5.694 Posbindu di Provinsi Sumatera Utara.

Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan terhadap Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sebagai bagian upaya penyehatan lingkungan sudah cukup baik. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah diimplementasikan di 3.801 desa/kelurahan dari 6136



desa/kelurahan yang ada di Provinsi Sumatera Utara (61.94%). Terdapat 1.096 desa/kelurahan (17.86%) telah terverifikasi sebagai desa SBS/Stop BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan). Masih dibutuhkan kerja sama dan upaya bersama lintas sektor dalam mewujudkan seluruh desa/kelurahan sebagai desa STBM.

Kerja sama dan upaya bersama lintas sektor juga dibutuhkan dalam upaya pengendalian masalah gizi masyarakat. Permasalahan gizi dapat terjadi pada semua kelompok umur, namun ketidakcukupan gizi pada periode emas (*golden period*), yaitu pada usia 0-2 tahun termasuk saat janin, perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita akan berpengaruh pada semua aspek kualitas kehidupannya pada tingkatan usia berikutnya bila tidak ditangani dengan adekuat. Permasalahan gizi buruk dan *stunting* (pendek dan sangat pendek) membutuhkan intervensi spesifik di bidang kesehatan dan intervensi sensitif yang memerlukan sinergisme lintas sektor dalam hal penanganan kesehatan lingkungan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari 42.5% (Riskesdas, 2013) menjadi 32.3% (Riskesdas, 2018). Pada tahun 2020, prevalensi *stunting* pada balita diketahui sebesar 29.20%, masih lebih tinggi dari yang disarankan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) sebesar 20.0%.

2.3.2. Kinerja Anggaran

Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Selain APBD Provinsi Sumatera Utara, sumber daya keuangan untuk pembiayaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya juga berasal sumber dana APBN Dekonsentrasi, dana transfer daerah, serta pembiayaan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Daerah	1.654.734.640	3.769.502.250	5.246.480.600	5.249.664.600	5.249.664.600	2.963.094.649	4.997.156.559	5.202.725.971	6.183.497.900	8.110.176.108	1.79	1.32	0.99	1.18	1.54		
Pendapatan Asli Daerah	1.654.734.640	3.769.502.250	5.246.480.600	5.249.664.600	5.249.664.600	2.963.094.649	4.997.156.559	5.202.725.971	6.183.497.900	8.110.176.108	1.79	1.32	0.99	1.18	1.54		
Hasil Retribusi Daerah	1.654.734.640	3.769.502.250	5.246.480.600	5.249.664.600	5.249.664.600	2.963.094.649	4.997.156.559	5.202.725.971	6.183.497.900	8.110.176.108	1.79	1.32	0.99	1.18	1.54		

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	291.175.574,750	223.633.669,000	301.266.614,936	352.451.168,069	431.786.511,011	236.819.637,844	193.421.222,272	253.989.176,838	320.278.722,637	400.537.224,432	0.81	0.86	0.84	0.91	0.93		
Belanja Tidak Langsung	98.579.398,000	95.139.982,000	109.991.920,000	107.537.668,000	125.948.879,000	82.634.106,156	84.929.982,000	90.417.312,137	104.520.820,384	121.752.163,617	0.84	0.89	0.82	0.97	0.97		
Belanja Pegawai	98.579.398,000	95.139.982,000	107.537.668,000	107.537.668,000	125.948.879,000	82.634.106,156	84.929.982,000	90.417.312,137	104.520.820,384	121.752.163,617	0.84	0.89	0.82	0.97	0.97		

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	192.596.176.750	128.493.687.000	191.274.694.936	244.913.500.069	305.837.632.011	154.185.531.688	108.491.240.272	163.571.864.701	215.757.902.253	278.785.060.815	0.80	0.84	0.85	0.88	0.91		
Belanja Pegawai	3.755.240.000	7.797.665.000	4.718.444.000	2.461.710.000	2.160.720.000	3.253.075.000	5.279.047.200	3.899.769.112	2.086.020.000	2.019.420.000	0.87	0.68	0.83	0.85	0.93		
Belanja Barang dan Jasa	178.199.975.650	115.841.435.400	159.435.589.996	199.456.270.208	264.114.642.523,81	142.430.497.346	99.291.436.247	141.449.069.494	182.351.467.983	253.205.472.669	0.80	0.86	0.89	0.91	0.96		
Belanja Modal	10.640.761.100	4.854.586.600	27.120.660.940	42.995.519.861	39.562.269.487,19	8.501.959.342	3.761.536.800	18.222.126.095	31.320.414.270	23.560.168.146	0.80	0.77	0.67	0.73	0.59		

Realisasi pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara baik dari sisi pendapatan maupun belanja menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari rasio antara realisasi terhadap anggaran dari tahun ke tahun.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT pada tahun 2013-2018 secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sulitnya mendapatkan gambaran yang tepat mengenai sasaran pelaksanaan kebijakan pembangunan, masih kurang selarasnya intervensi terhadap permasalahan kesehatan, dan ketidakmampuan dalam melakukan pemetaan rencana tindak lanjut yang bersifat holistik dan berkesinambungan. Dari setiap permasalahan, dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya.

Identifikasi terhadap tantangan merupakan identifikasi terhadap kendala yang bersifat negatif yang akan dihadapi oleh suatu organisasi yang apabila berhasil diatasi akan memberikan peran yang besar dalam mencapai tujuan organisasi. Peluang merupakan suatu keadaan positif, yang apabila dimanfaatkan oleh suatu organisasi, dapat memberikan dampak yang besar terhadap tujuan organisasi. Analisa terhadap kedua faktor tersebut bermanfaat untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan, dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau dan didukung dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki saat ini, yang selanjutnya diproyeksikan ke pengembangan pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya di masa mendatang.

Tantangan yang dijumpai dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara antara lain tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi, jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang masih terbatas, sistem informasi kesehatan yang belum terintegrasi, intervensi permasalahan dan perencanaan kesehatan yang belum didasarkan pada data yang akurat, dukungan dan komitmen lintas sektor yang masih kurang, kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup



Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih rendah, penolakan/stigma yang masih ditemukan di masyarakat akibat informasi kesehatan yang belum adekuat, serta terjadinya bencana alam/non alam dan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID-19.

Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dapat dikembangkan dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti adanya instruksi Gubernur terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), komisi pendukung program kesehatan (Join Health Council/JHC), relawan kesehatan Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB), regulasi mengenai penanggulangan masalah kesehatan (Kawasan Tanpa Rokok, NAPZA, dan HIV/AIDS), regulasi terkait pelayanan kesehatan rujukan regional, kemudahan akses internet dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta meningkatnya ketersediaan obat dan alat kesehatan di *e-catalog*.

BAB 3

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan analisa hasil capaian kinerja selama tahun 2013-2018 serta identifikasi terhadap tantangan dan peluang yang ada, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah terdapatnya kesenjangan antara capaian berbagai indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut. Kesenjangan capaian kinerja secara umum terlihat dari indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang merupakan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dipengaruhi oleh upaya-upaya kesehatan ibu dan anak yang diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta status gizi (*stunting*). Pencapaian AKI, AKB, *stunting* (pendek dan sangat pendek) dan beberapa indikator pembangunan Kesehatan yang belum mencapai target masih menjadi permasalahan di Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan utama tersebut menjadi dasar bagi penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pelayanan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode tahun 2019-2023.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	1. Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak	1.1. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan 1.2. Belum optimalnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 1.3. Belum optimalnya perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 1.4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan pendekatan <i>continuum of care</i>	• Masih rendahnya kapasitas petugas dalam tatalaksana kesehatan ibu dan anak • Belum optimalnya pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) • Belum optimalnya pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat kesehatan ibu dan anak (PWS-KIA) • Belum optimalnya Audit Maternal dan Perinatal (AMP)



				• Belum optimalnya program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) • Masih rendahnya cakupan Puskesmas PONEB (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) • Belum optimalnya upaya kesehatan anak usia sekolah • Belum optimalnya upaya kesehatan reproduksi pada wanita dan remaja
		2. Masih rendahnya status gizi masyarakat	2.1. Tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang, <i>wasting</i> (kurus), dan <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) 2.2. Terbatasnya kapasitas petugas gizi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 2.3. Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam penanggulangan masalah gizi	• Masih rendahnya upaya suplementasi gizi • Masih rendahnya kapasitas petugas gizi • Belum optimalnya surveilans gizi dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) • Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam penanggulangan masalah gizi • Belum optimalnya Pemantauan Status Gizi (PSG) masyarakat
		3. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit	3.1. Tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular 3.2. Rendahnya cakupan dan mutu imunisasi 3.3. Belum optimalnya surveilans dan deteksi dini penyakit 3.4. Tingginya kejadian bencana dan/atau kegawatdaruratan kesehatan 3.5. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan 3.6. Masih terbatasnya tenaga kesehatan promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 3.7. Masih terbatasnya penggunaan obat rasional (POR) 3.8. Belum optimalnya pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan 3.9. Masih rendahnya mutu sarana pelayanan kesehatan 3.10. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan 3.11. Masih rendahnya kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan	• Belum optimalnya penemuan dan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, termasuk faktor risiko • Masih rendahnya kapasitas petugas dalam tatalaksana penyakit menular dan tidak menular, imunisasi, serta surveilans penyakit • Belum optimalnya kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, imunisasi, serta surveilans penyakit • Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana serta situasi KLB Provinsi • Masih rendahnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dan pesantren. • Belum optimalnya pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan • Belum optimalnya perencanaan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan • Masih rendahnya kapasitas teknis dan fungsional tenaga kesehatan • Belum optimalnya upaya kesehatan usia lanjut



				• Belum optimalnya upaya kesehatan kerja dan olahraga • Masih rendahnya mutu intitusi penyelenggara pelatihan kesehatan • Belum optimalnya kinerja pelayanan kefarmasian • Masih terbatasnya ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi • Masih terbatasnya Sarana, Prasarana, dan Alat kesehatan (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan • Masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi • Masih terbatasnya kapasitas petugas dalam pelaksanaan akreditasi • Belum optimalnya promosi kesehatan dan kampanye hidup sehat • Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan • Belum optimalnya kemitraan dan kerja sama bidang kesehatan dengan lintas sektor dan dunia usaha • Belum optimalnya pengelolaan Saka Bakti Husada (SBH) • Masih terbatasnya anggaran penyediaan premi jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu • Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
--	--	--	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk mampu dan cakap dalam menjawab setiap tantangan dan mengadaptasi peluang yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pada pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorongnya, agar setiap program yang dilaksanakan mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat

- Misi :**
1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
 2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis;
 3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
 4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
 5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Dari kelima misi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan telaah terhadap Misi pertama untuk dapat mendukung pencapaian-pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat				
No.	Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;			
1.1	Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas	• Belum seluruh masyarakat memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	• Belum semua pemberi kerja menyediakan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui BPJS. • Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam BPJS Kesehatan	• Adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan DBH-CHT untuk penyediaan JKN dan SE Gubernur ke pelaku usaha
		• Fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan, dan fasilitas pelatihan kesehatan belum memenuhi standar.	• Keterbatasan lahan serta bangunan UPT. RS/RSK • Sarana, prasarana dan Alkes (SPA) pada fasilitas kesehatan dan labkes belum memenuhi standar • Sarana dan prasarana pada fasilitas pelatihan kesehatan belum adekuat	• Upaya penyediaan SPA yang mutakhir tercantum dalam strategi peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas pada RPJMD Provsu 2019-2023

		Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi	Sistem informasi yang ada belum terintegrasi	Penguatan implementasi <i>e-government</i> di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
		Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata serta penggunaan analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang belum maksimal dalam pengelolaan sumber daya manusia	- Letak geografis yang sulit dijangkau dan jauh dari ibukota Provinsi. - Rendahnya retensi dan tingginya <i>turn over</i> pegawai - Analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) belum disusun secara cermat dan belum digunakan dengan maksimal	Rekrutmen tenaga CPNS berdasarkan jabatan fungsional
		Masih lemahnya praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta lingkungan kantor dan fasilitas kesehatan yang belum bebas dari asap rokok (Kawasan Tanpa Rokok)	Masih rendahnya kesadaran dalam praktik PHBS	- Peraturan Gubernur terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) - Peraturan/Instruksi Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) - Mitra Germas
		Manajemen aset dan persediaan yang belum optimal	Banyak aset yang tersebar di kabupaten/kota belum dilakukan proses hibah, dan banyak aset yang telah berpindah tangan	Efisiensi penggunaan anggaran
		Manajemen perkantoran di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang belum terselenggara dengan optimal	- Luas ruangan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pegawai. - Bangunan kantor serta sarana pendukung lainnya belum memadai dan belum mendukung praktik manajemen perkantoran yang baik	- Tersedianya <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) pembangunan gedung kantor. - Tersedianya anggaran

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI

Dalam penyusunan Perubahan Renstra tahun 2019-2023, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024 dalam rangka menjamin keselarasan pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan arah pembangunan kesehatan di tingkat nasional. Berikut disajikan hasil telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dengan kondisi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.3
Telaahan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<i>Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat</i>			
1.	Persentase Bumil KEK dari 17.3% menjadi 10%	Identifikasi dan kontinuitas perawatan bagi sasaran masih menemukan kendala	Sistem pengawasan yang belum optimal oleh unsur non kesehatan di masyarakat terhadap perkembangan dan kemajuan perawatan dari ibu hamil KEK, serta pengaruh determinan sosial kesehatan (tingkat Pendidikan, status pekerjaan, umur kehamilan, dst.)	Tersedianya suplementasi Bumil KEK, implementasi <i>e-pggbm</i> .
2.	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan 95%	Capaian Persalinan di fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik. Namun demikian, perlu perhatian terhadap persalinan berisiko tinggi yang memerlukan penanganan di rumah sakit.	Beberapa kehamilan berisiko tinggi teridentifikasi pada saat proses persalinan, sehingga membutuhkan waktu untuk koordinasi dan pengelolaan rujukannya	Adanya dukungan anggaran jaminan persalinan (Jampersal), regulasi terkait Rumah Sakit rujukan regional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2017, jaminan akses dan kualitas pelayanan melalui JKN, ketersediaan Puskesmas PONEK dan RS PONEK, serta SPM Bidang Kesehatan.
3.	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten/kota	Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir telah diselenggarakan di seluruh kab/kota, namun perlu ditingkatkan mutunya	Pengaruh determinan sosial Kesehatan, serta pola pengambilan keputusan dalam mengakses layanan kesehatan ibu dan BBL dipengaruhi oleh keluarga.	Adanya dukungan anggaran (DAK Nonfisik Bidang Kesehatan/BOK), tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya, SPM Bidang Kesehatan
4.	Persentase balita <i>stunting</i> dari 27.7% menjadi 14%	Identifikasi dan kontinuitas perawatan bagi sasaran masih menemukan kendala	Pengaruh determinan sosial kesehatan (tingkat Pendidikan, status pekerjaan orang tua, dst.)	Adanya dukungan anggaran (DAK Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan), kolaborasi LS dalam aksi konvergensi <i>stunting</i> , petugas gizi yang ditingkatkan kompetensinya, implementasi <i>e-pggbm</i>



No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
5.	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60%	Recall data ASI eksklusif belum maksimal akibat menurunnya kunjungan ibu menyusui ke Posyandu maupun sweeping petugas Puskesmas ke rumah	Pengaruh determinan sosial kesehatan (sosial budaya) dan pandemi COVID-19	Adanya lembaga swadaya masyarakat pemerhati ASI (AIMI), konselor ASI, dan regulasi yang melarang promosi pengganti ASI
6.	Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif dari 51% menjadi 100%	Pembinaan Posyandu aktif sudah dilakukan seluruh kab/kota, namun perlu ditingkatkan intensitasnya	Pandemi COVID-19 yang membatasi partisipasi orang tua dalam membawa balita ke Posyandu	Kemitraan dan Kerjasama lintas sektor (TP-PKK, dll.), dukungan Dana Desa/Alokasi Dana Desa dan CSR.
7.	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebesar 50%	Belum semua kab/kota memiliki kebijakan daerah tentang GERMAS, dan implementasi kebijakan GERMAS masih menjadi tanggung jawab unsur kesehatan	Komitmen dan kemitraan lintas sektor yang diatur dalam regulasi tingkat Provinsi dan kab/kota belum optimal	Dukungan Dana Desa/Alokasi Dana Desa, serta komitmen dan kemitraan lintas sektor sebagai mitra GERMAS
8.	100% kabupaten/kota menerapkan kebijakan KTR (Jumlah 514)	Belum semua kabupaten/kota menerapkan kebijakan KTR, dan pada daerah yang telah memiliki kebijakan KTR, implementasi kebijakan dimaksud masih belum optimal dan masih ditemukan pelanggaran	Budaya merokok, pengawasan KTR yang belum optimal, implementor yang tidak terdaftar.	Adanya regulasi yang mengatur tentang penetapan KTR (UU Nomor 36 Tahun 2009), Kerjasama LS dalam pengawasan KTR (Satpol PP)
9.	Kabupaten/Kota sehat sebanyak 420 kabupaten/kota	Masih sedikitnya kab/kota yang melaksanakan tatanan kawasan	Salah satu kriteria KKS adalah kelurahan ODF, sementara perilaku masyarakat yang masih BAB sembarangan masih dijumpai	Adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kab/kota sehat, serta dukungan dan kerjasama LP/LS terkait
2.	<i>Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan</i>			
1.	Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas	Seluruh kecamatan telah memiliki minimal 1 Puskesmas		Dukungan anggaran (DAK Fisik Bidang Kesehatan)



No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2.	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100%	Masih terdapat kabupaten/kota dengan rasio TT di bawah 1:1.000	Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan di daerah, serta dukungan infrastruktur yang belum memadai	Meningkatkannya akses masyarakat kepada kunjungan rawat jalan dan rawat inap melalui BPJS Kesehatan
3.	Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%	Masih banyak Puskesmas dengan parameter penilaian instrument sesuai standar <70%, dan belum dilatih manajemen Puskesmas	Terbatasnya jumlah pelatihan manajemen Puskesmas yang dilaksanakan, dan masih rendahnya kepatuhan Puskesmas terhadap pelayanan sesuai standar	Dukungan anggaran (APBN Dekonsentrasi) dalam pelaksanaan pelatihan Manajemen Puskesmas, tersedianya UPT. Pelatihan Kesehatan sebagai intitusi penyelenggara Diklat
4.	Persentase RS terakreditasi sebesar 100%	Pemenuhan terhadap standar untuk memenuhi kriteria siap melakukan akreditasi Rumah Sakit	Sarana, Prasarana, dan Alkes (SPA) yang belum memenuhi standar, serta terbatasnya jumlah SDM di RS	Mekanisme pembinaan teknis akreditasi
5.	Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain	Pemenuhan terhadap standar untuk memenuhi kriteria siap melakukan akreditasi	Sarana, Prasarana, dan Alkes (SPA) yang belum memenuhi standar, serta terbatasnya jumlah SDM di Fasyankes	Mekanisme pembinaan teknis akreditasi
3.	<i>Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat</i>			
1.	Menurunnya insidensi TB menjadi 90 per 100.000 penduduk pada tahun 2024	Insidensi TB masih tinggi	Perilaku pasien TB, drop-out dan loss to follow-up pengobatan TB yang berpotensi melanggengkan transmisi TB di masyarakat	Strategi DOTS (<i>Directly Observed Treatment-Shortcourse</i>) dan regimen OAT, Pengawas Menelan Obat (PMO), dukungan dan Kerjasama LP/LS, RAD Penanggulangan TB
2.	Menurunnya insidensi HIV menjadi 0.18% pada tahun 2024	Insidensi HIV masih tinggi	Perilaku seksual yang tidak aman, dan penggunaan NAPZA	Tersedianya layanan Konseling dan Tes HIV secara Sukarela/KTS (Voluntary Counseling and Testing/VCT), Tes atas Inisiasi Petugas Kesehatan (TIPK), pengobatan Antiretro Viral (ARV), regulasi NAPZA dan HIV



No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3.	Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kabupaten/kota	Masih terdapat kabupaten/kota yang belum bebas Malaria (endemis)	Tingginya mobilitas penduduk, dan dampak perubahan ekologi (perubahan fungsi hutan untuk pembangunan jalan raya)	Dukungan dan Kerjasama LS, kader desa, petugas pemeriksaan yang terlatih, Sismal Online
4.	Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95%	Cakupan imunisasi dasar lengkap yang masih rendah	Tingginya mobilitas penduduk, keengganan terhadap layanan imunisasi, serta rendahnya partisipasi orang tua membawa anaknya imunisasi pada masa pandemi COVID-19	Akses yang mudah terhadap layanan imunisasi
5.	Meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak 514 kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota telah melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular, namun perlu ditingkatkan kualitasnya	Gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak sehat, <i>sedentary life</i> (hidup kurang gerak/malas gerak), mutasi agen penyakit	Dukungan anggaran (DAK Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan), tenaga kesehatan ditingkatkan kompetensinya, SPM Bidang Kesehatan
6.	Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%	Jumlah dan kapasitas petugas dalam pencegahan dan pengendalian KKM masih terbatas	Mutasi pegawai	Adanya regulasi (UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan), serta SPM Bidang Kesehatan
4.	<i>Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan</i>			
1.	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 96%	Tidak semua obat yang dibutuhkan dapat terpenuhi melalui proses pengadaan obat	Kapasitas produksi obat pada produsen obat belum dapat mengimbangi tingginya permintaan obat	Dukungan anggaran penyediaan obat program, obat <i>buffer stock</i> , vaksin, dan BMHP, serta pengelolaan obat dan vaksin menggunakan e-logistik.
5.	<i>Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar</i>			
1.	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83%	Distribusi tenaga kesehatan belum merata, sehingga masih ada Puskesmas yang belum memenuhi jenis tenaga sesuai standar	Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas, mengakibatkan timbulnya <i>over-burdened</i> karena mendapatkan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi	Dukungan anggaran (DAK Nonfisik Bidang Kesehatan) dalam rekrutmen tenaga kontrak



No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2.	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (<i>minimal 4 spesialis dasar wajib ada</i>)	Belum semua RSUD kelas C memenuhi minimal ketersediaan tenaga dimaksud	Terbatasnya jumlah tenaga medis spesialis dan sub spesialis di daerah, serta distribusinya yang tidak merata	Adanya regulasi, serta inovasi daerah dalam bentuk dokter terbang
3.	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang	Terbatasnya jumlah dan jenis Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan	Pandemi COVID-19	Dukungan anggaran (APBN Dekonsentrasi), UPT. Pelatihan Kesehatan sebagai institusi penyelenggaraan Diklat
4.	Persentase Puskesmas tanpa dokter sebesar 0%	Masih ada Puskesmas yang belum memiliki tenaga dokter umum	Faktor geografis Puskesmas dan infrastruktur pendukungnya, mutasi pegawai	Adanya regulasi, dan rekrutmen/ penerimaan pegawai
6.	Terjaminnya pembiayaan kesehatan			
1.	Persentase anggaran Kesehatan Pemerintah Pusat terhadap APBN sebesar 5.5 persen	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
7.	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
1.	Persentase Provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM bidang Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100%	SPM Kesehatan sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM baru mulai berlaku per 1 Januari 2019. Dengan demikian, belum dilakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan SPM		Dukungan anggaran (Bantuan Operasional Kesehatan/BOK), amanat Permendagri terkait pengalokasian anggaran pemenuhan SPM pada APBD, adanya regulasi terkait SPM
2.	Persentase provinsi dengan anggaran Kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang Kesehatan sebesar 100%	Anggaran Kesehatan dalam APBD telah sinkron dengan prioritas nasional		Adanya regulasi terkait penyusunan APBD
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80.58	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
4.	Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		
5.	Persentase Satker KP/KD yang telah memenuhi Predikat WBK/WBBM (Kemenkes/ Nasional)	Tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		



No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
8.	<i>Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan system informasi Kesehatan untuk pengambilan keputusan</i>			
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil litbangkes yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 30 rekomendasi	Hasil penelitian belum dijadikan rujukan dalam menyusun rekomendasi dan kebijakan kesehatan	Hasil penelitian diperoleh setelah perencanaan selesai disusun	Perencanaan berbasis bukti (<i>evidence-based</i>)
2.	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan sebanyak 100 SIK	Sistem Informasi Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum terintegrasi	Proses integrasi Sistem Informasi Kesehatan yang belum berjalan	Adanya rencana transformasi digital kesehatan (kebijakan <i>Indonesia Health Services/ IHS</i>)

Dari tabel 3.3 di atas terlihat bahwa tidak semua indikator pada Renstra Kementerian Kesehatan RI menjadi indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Perkembangan yang sangat dinamis dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik berimplikasi terhadap perubahan pemanfaatan dan penggunaan ruang, dan Provinsi Sumatera Utara memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan struktur dan pola ruang tersebut. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan penggunaan instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penelaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu dilakukan untuk dapat menghitung implikasinya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah **"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan"** dengan substansi meliputi antara lain (a) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi, (b) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, serta rencana sistem jaringan prasarana lingkungan, (c) Rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, (d) Penetapan kawasan strategis Provinsi, (e) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan (f) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi system Provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program (RKP).



Tabel 3.4
Telaahan KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No.	Isu Strategis	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana	Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan berada pada daerah rawan bencana.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan optimalisasi dan penguatan pelayanan kesehatan serta pengendalian vektor dan penyakit pada kejadian bencana, krisis kesehatan, Kejadian Luar Biasa (KLB), serta masalah kesehatan lain yang berpotensi menjadi wabah.	Penguatan dan optimalisasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang menggunakan system pelacakan berbasis lokasi secara <i>real time</i> yang didukung dengan surveilans laboratorium kesehatan masyarakat. Pengembangan pelayanan pra Rumah Sakit melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) serta penyediaan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang komprehensif dan terintegrasi dengan akses kepada lokasi kawasan evakuasi bencana.
2.	Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi	Aktivitas pelayanan kesehatan oleh institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta menghasilkan limbah medis dan non medis, baik dalam bentuk cair maupun padat. Limbah medis yang tidak diolah sesuai standar secara tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan pada kualitas air.	Rendahnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat akan berdampak pada rendahnya higienitas dan kesehatan lingkungan, yang selanjutnya dapat menjadi sumber masalah kesehatan terutama bagi penularan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Provinsi Sumatera Utara harus semakin ditingkatkan, dengan pelibatan lintas sektor dan implementasi rencana aksi. Fasilitas kesehatan juga harus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat, utamanya pada aspek pengolahan limbahnya.
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan berusaha		Rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan berimplikasi pada kualitas penyelenggaraan sistem kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan yang disediakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, pertumbuhan sarana pelayanan kesehatan perlu didorong dalam rangka meningkatkan rasio pelayanan kesehatan (Puskesmas/ Pustu/ Klinik/ RS) terhadap penduduk.	Kompetensi dan kapasitas tenaga kesehatan harus senantiasa ditingkatkan dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan kebutuhan.



No.	Isu Strategis	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
4.	Peningkatan kualitas dan gaya hidup sehat, sejahtera, serta bebas dari kecacatan		Tren penyakit tidak menular (degeneratif) yang disebabkan oleh perilaku/gaya hidup yang tidak sehat semakin meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, kasus-kasus penyakit menular seperti Tuberkulosis, HIV/AIDS, Malaria, dlsb.) juga masih menghantui masyarakat Provinsi Sumatera Utara, ditambah lagi dengan munculnya penyakit-penyakit baru (<i>new emerging diseases</i>) seperti ZICA, MersCoV, Flu Burung, COVID-19, dll. Beberapa penyakit dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), dan cakupan imunisasi yang rendah akan berdampak pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh kekebalan kolektif (<i>herd immunity</i>) terhadap suatu penyakit. Status gizi masyarakat juga berkontribusi terhadap perjalanan penyakit. Ketidacukupan gizi pada masa <i>golden period</i> (usia 0-2 tahun, termasuk saat janin) berkontribusi pada kejadian <i>stunting</i>. Tahun yang hilang (<i>Year Life Lost/YLL</i>) akibat kematian dini ataupun tahun kehidupan yang dijalani dalam kecacatan dan disabilitas (<i>Years Lived with Disability/YLD</i>) merupakan beban yang ditimbulkan oleh penyakit (menular dan tidak menular), disamping biaya yang tinggi (<i>high cost</i>) bagi upaya pengobatan dan penyembuhan penyakit.	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) harus senantiasa digaungkan melalui peningkatan kampanye hidup sehat dan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan serta pelibatan lintas sektor dan mitra strategis dalam pelaksanaannya. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) harus dilaksanakan secara penuh, sehingga rencana intervensi kesehatan masyarakat dapat diselenggarakan berbasis data dan status kesehatan keluarga. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan harus dilaksanakan secara komprehensif bagi setiap penduduk semua usia dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta perbaikan gizi masyarakat perlu ditingkatkan. Akses kepada Sarana, Prasarana, dan Alat kesehatan (SPA) serta obat dan perbekalan kesehatan perlu ditingkatkan. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan registrasi, akreditasi dan sertifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga perlu ditingkatkan dalam rangka terwujudnya <i>Universal Health Coverage</i> penduduk Provinsi Sumatera Utara.
5.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pengembangan fisik layanan kesehatan secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada keberlangsungan Sumber Daya Alam (SDA), terutama pada penggunaan daya listrik dan air tanah.	Rancangan pengembangan fisik layanan kesehatan harus dapat mempertimbangkan penggunaan daya listrik dan air tanah secara efisien. Penggunaan lahan juga harus memperhatikan AMDAL, Rencana Kota, dan kerentanan terhadap banjir.	Konsep <i>green building</i> dapat menjadi solusi dalam pemanfaatan SDA secara efisien dalam rangka pengembangan fisik layanan kesehatan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang berorientasi pada masa depan. Isu strategis selain sebagai suatu kondisi yang belum menjadi masalah saat ini tetapi berpotensi untuk menjadi masalah di masa depan, juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola yang mana jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mengedepankan isu strategis dalam perencanaan pembangunan mengingat dampaknya yang signifikan di masa datang.

Memperhatikan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditinjau terhadap capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara periode sebelumnya, Renstra Kementerian Kesehatan, serta implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, maka diperoleh isu-isu kesehatan strategis di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut: (a) kesehatan ibu, bayi, dan balita, mencakup di dalamnya penerapan prinsip pelayanan kesehatan sepanjang usia (*continuum of care*); (b) status gizi, mencakup di dalamnya beban ganda permasalahan gizi masyarakat; (c) kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; (d) kesakitan dan endemisitas penyakit menular, mencakup di dalamnya isu terkait kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan matra; (e) mutu dan akses pelayanan kesehatan, mencakup di dalamnya kesehatan tradisional, standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, penguatan *Public Safety Center* (PSC), serta pemenuhan SPA di fasilitas pelayanan kesehatan; (f) mutu tenaga kesehatan, mencakup di dalamnya perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan SDM kesehatan; (g) jaminan pembiayaan kesehatan; serta (h) bencana, wabah, dan kecelakaan, mencakup di dalamnya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan krisis kesehatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 selanjutnya dititikberatkan terhadap isu-isu strategis tersebut yang diprioritaskan berdasarkan 6 (enam) kriteria penilaian dengan nilai bobot tertentu.

Tabel 3.5
Kriteria Penilaian Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)
1	2	3
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	20
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	10
Total		100

Isu strategis yang telah diidentifikasi selanjutnya dilakukan penilaian dengan menggunakan skala Linkert sebagai parameternya sebagai berikut:

1. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas,
2. Nilai 4 untuk skala prioritas,
3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas,
4. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas, dan
5. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas

Berikut adalah skala prioritas untuk setiap isu strategis:

Tabel 3.6
Nilai Skala Prioritas Untuk Setiap Isu Strategis

No.	Isu Strategis/ Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kesehatan ibu, bayi, dan balita	5	5	5	5	5	5	30
2.	Status gizi	5	4	5	5	5	5	29
3.	Kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	4	4	4	4	4	4	24
4.	Kesakitan dan endemisitas penyakit menular	5	5	5	4	4	5	28
5.	Mutu dan akses pelayanan kesehatan	4	4	4	4	3	4	23
6.	Mutu tenaga kesehatan	4	4	4	3	3	3	21
7.	Jaminan pembiayaan kesehatan	4	3	3	3	4	3	20
8.	Bencana, wabah, dan kecelakaan	5	4	5	4	3	3	24

Untuk mendapatkan bobot setiap isu strategis, maka dilakukan perkalian nilai skala dengan bobot setiap isu strategis (tabel 3.5) dalam rangka menetapkan isu strategis yang paling prioritas dan menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan. Total bobot masing-masing isu strategis didapat dengan melakukan penjumlahan terhadap hasil perkalian seluruh skala kriteria pada isu strategis dengan bobot masing-masing kriteria seperti berikut:

Tabel 3.7
Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No.	Isu Strategis/ Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-						Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5	6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kesehatan ibu, bayi, dan balita	125	75	100	50	100	50	500	83.33
2.	Status gizi	125	60	100	50	100	50	485	80.83
3.	Kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	100	60	80	40	80	40	400	66.67
4.	Kesakitan dan endemisitas penyakit menular	125	75	100	40	80	50	470	78.33
5.	Mutu dan akses pelayanan kesehatan	100	60	80	40	60	40	380	63.33
6.	Mutu tenaga kesehatan	100	60	80	30	60	30	360	60.00
7.	Jaminan pembiayaan kesehatan	100	45	60	30	80	30	345	57.50
8.	Bencana, wabah, dan kecelakaan	125	60	100	40	60	30	415	69.17

Dari perhitungan di atas, maka dilakukan perbandingan terhadap total skor masing-masing isu strategis dimana isu strategis dengan skor terbesar menjadi prioritas utama. Adapun yang menjadi program prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Prioritas Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No.	Isu Strategis	Total Skor
1	2	3
1	Kesehatan ibu, bayi, dan balita	83.33
2	Status gizi	80.83
3	Kesakitan dan endemisitas penyakit menular	78.33
4	Bencana, wabah, dan kecelakaan	69.17
5	Kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	66.67
6	Mutu dan akses pelayanan kesehatan	63.33
7	Mutu tenaga kesehatan	60.00
8	Jaminan pembiayaan kesehatan	57.50

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan langkah-langkah responsif terhadap seluruh isu-isu strategis tersebut dengan memerhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Di samping itu, isu kesehatan strategis di Provinsi Sumatera Utara adalah yang berkaitan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Terdapat 17 tujuan dan 169 target pada TPB/SDGs, dimana tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030. Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Provinsi Sumatera Utara, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan di wilayahnya.

Gambar 3.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)



Dari 17 tujuan yang terdapat pada TPB/SDGs, terdapat beberapa tujuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Tujuan ke-1 : **Tanpa Kemiskinan**
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- Tujuan ke-2 : **Tanpa Kelaparan**
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- Tujuan ke-3 : **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
- Tujuan ke-4 : **Air Bersih dan Sanitasi Layak**
Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang

Dari keempat tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjadi *leading sector* dalam pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 3.9
Matriks Tujuan, Target, dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Target		Indikator	
1		2	
Tujuan ke-1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun			
1.3	Menerapkan secara nasional system dan upaya perlindungan social yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan**
		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap**
		1.4.1.	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar)
Tujuan ke-2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan			
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita**
		2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment)
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
		2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta**



	2.2.2*	<i>Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe**</i>
	2.2.2.(a)	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil**</i>
	2.2.2.(b)	<i>Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif**</i>
	2.2.2 *	<i>Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe</i>
	2.2.3 *	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun</i>
Tujuan ke-3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia		
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1* Angka kematian ibu (AKI)
		3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
		3.1.2.(a) <i>Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih**</i>
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh Negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (kelahiran hdiup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH	3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup; (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
		3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup
		3.2.2.(a) <i>Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup**</i>
		3.2.2.(b) <i>Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi**</i>
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, da penyakit tropis terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.1.(a) <i>Prevalensi HIV pada populasi dewasa**</i>
		3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi
		3.3.2.* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
		3.3.3* Kejadian malaria per 1.000 orang
		3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
		3.3.4.(a) <i>Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk hepatitis B**</i>
		3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk
		3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) filariasis dan (b) kusta
		3.3.5.(a) <i>Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta**</i>
		3.3.5(a) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta
		3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)



3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(a)	<i>Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun**</i>
		3.4.1*	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis
		3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi
		3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun
		3.4.2*	Angka kematian (<i>incidence rate</i>) akibat bunuh diri
		3.4.2.(a)	<i>Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa**</i>
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1*	Cakupan pelayanan Kesehatan esensial
		3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan
		3.8.2*	<i>Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau system kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk**</i>
		3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk Kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan
3.a	Memperkuat pelaksanaan <i>The Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh Negara sebagai langkah yang tepat	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap Negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak Negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeluargaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua	3.b.1.(a)	<i>Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas**</i>
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional
		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di Negara berkembang, khususnya Negara kurang berkembang, dan Negara berkembang pulau kecil	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan



Tujuan ke-6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(a) <i>Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air**</i>
	6.2.1.(c) <i>Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**</i>
	6.2.1.(d) <i>Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)**</i>
	6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun

Keterangan:

****** *Sampai dengan tahun 2019.* Selanjutnya, indikator dimaksud tidak ditemukan pada Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020.



BAB 4

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Telaah Terhadap Visi Misi dalam Perubahan RPJMD yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intens antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (5), tujuan dan sasaran jangka menengah daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah "**Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat**", yang di dalamnya terkandung makna:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama, dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera;

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian;

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan



bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara menitikberatkan cita-cita kesejahteraan sosial, termasuk urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan, pada Misi ke-1 "**Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan takwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, **kesehatan yang prima**, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau".

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan yang menunjang Misi Ke-1 RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan perubahannya, meliputi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat Kesehatan, makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
2. Penyelenggaraan kebijakan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat Kesehatan, makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat Kesehatan, makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
4. Penyelenggaraan administrasi upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat Kesehatan, makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, terkait dengan tugas dan fungsinya.

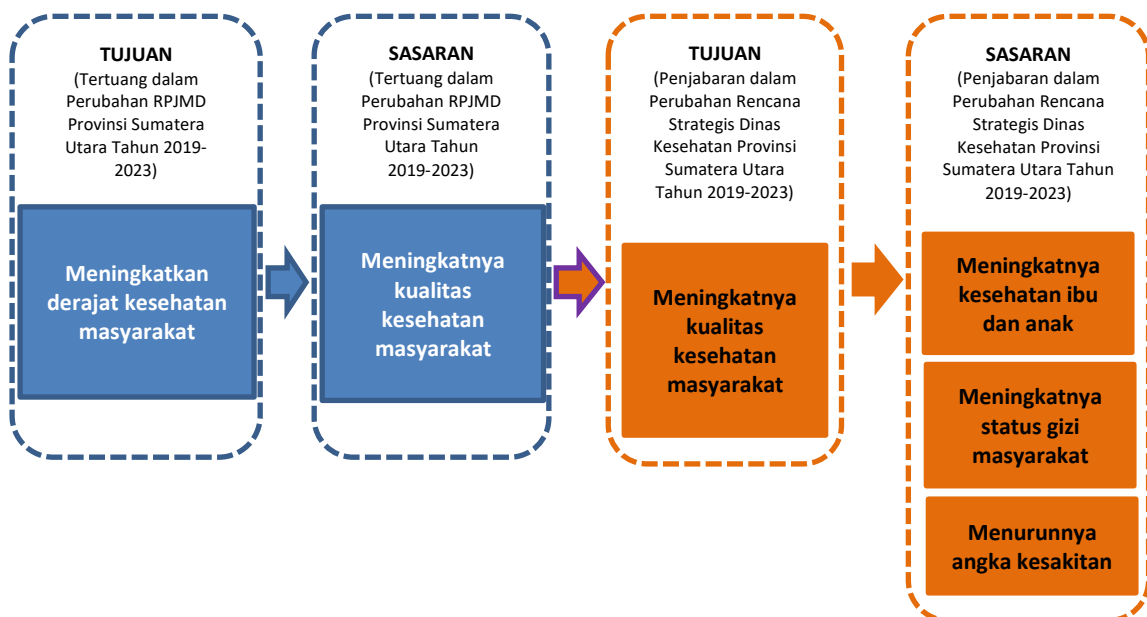
Melalui fungsi-fungsi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk tercapainya Misi Ke-1 dimaksud.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tujuan jangka menengah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan sasaran jangka menengah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dengan mengoperasionalkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Visi dan Misi tersebut diterjemahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ke dalam tujuan yang konsisten dengan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Sasaran dari Tujuan Misi ke-1 “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” yaitu “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” dijabarkan menjadi tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 4.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator <i>Tujuan/Sasaran</i>	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun							Kondisi Akhir RPJMD	
				2019		2020		2021	2022	2023		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	68.74	68.95	68.87	69.1	69.23	69.35	69.50	69.50	(12)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Usia Harapan Hidup (UHH)	80.1	66.76	75.1	62.5	93.49	79.40	67.39	67.39	69.50
2			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	4.5	2.61	4.3	2.39	2.44	2.32	2.2	2.2	
3			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	31.50	30.7	30.50	29.20	28.5	27.5	26.5	26.5	
4		Meningkatnya status gizi masyarakat	Persentase balita <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	11.01	11.97	10.99	12.24	12.24	12.22	12.20	12.20	12.20
5		Menurunnya angka kesakitan	Angka kesakitan (morbiditas)									

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Strategi dan arah kebijakan urusan kesehatan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi dasar untuk penetapan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang lebih khusus agar dapat menjawab semua permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.

Berikut ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat		
Misi (1)	: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan takwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	1.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu	• Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas
			• Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada calon pengantin (Catin) dan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)
			• Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/ lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas
		1.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak	• Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kesehatan bayi baru lahir (neonatal), bayi, balita, dan anak
	• Peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan bayi baru lahir (neonatal), bayi, balita, dan anak		
	• Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/ lintas sektor dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir (neonatal), bayi, balita, dan anak		
	• Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi serta penguatan PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi)		
	2. Meningkatnya status gizi masyarakat	2.1. Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat	• Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi masyarakat
• Peningkatan pendidikan gizi			
• Peningkatan surveilans gizi			
		• Peningkatan suplementasi gizi	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	3. Menurunnya angka kesakitan	3.1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	• Penguatan surveilans dan karantina kesehatan serta penanggulangan wabah, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat (termasuk pandemi COVID-19)
			• Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan vektor penyakit
			• Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
		3.2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	• Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dan fasilitas pelayanan kesehatan
			• Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di seluruh desa/kelurahan
		3.3. Meningkatkan perilaku hidup sehat	• Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan
			• Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan
		3.4. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	• Peningkatan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan
		3.5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	• Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan laboratorium kesehatan
			• Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit dan penguatan <i>Public Safety Center</i> (PSC)
			• Pembangunan/peningkatan/ pengembangan serta pemeliharaan UPT. RS/RSK dan Laboratorium Kesehatan
			• Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat kesehatan (SPA) sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			• Penyediaan dukungan layanan medis bergerak (dokter terbang, bis medis)
			• Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut
			• Peningkatan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga
		3.6. Meningkatkan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	• Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan mutu kefarmasian, alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
			• Optimalisasi Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3.7. Meningkatkan mutu tenaga kesehatan	• Perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan SDM Kesehatan
			• Peningkatan kualitas institusi penyelenggara pelatihan kesehatan
		3.8. Meningkatkan kebijakan dan manajemen kesehatan	• Penguatan perencanaan, monitoring evaluasi, dan pengendalian
			• Peningkatan tata kelola Sistem Informasi Kesehatan dan informasi publik, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			• Peningkatan humas dan hukum kesehatan
			• Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/lintas sektor dalam pembangunan kesehatan

BAB 5

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun dengan menerjemahkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan setiap program akan dinilai secara terukur terhadap 1 (satu) atau lebih indikator kinerja program (*outcome*) dan pendanaan indikatif setiap tahunnya.

Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terdiri dari program generik dan program prioritas yang menggambarkan upaya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah diselaraskan dengan Prioritas Nasional. Adapun program generik dan program prioritas yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Program Generik

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Prioritas

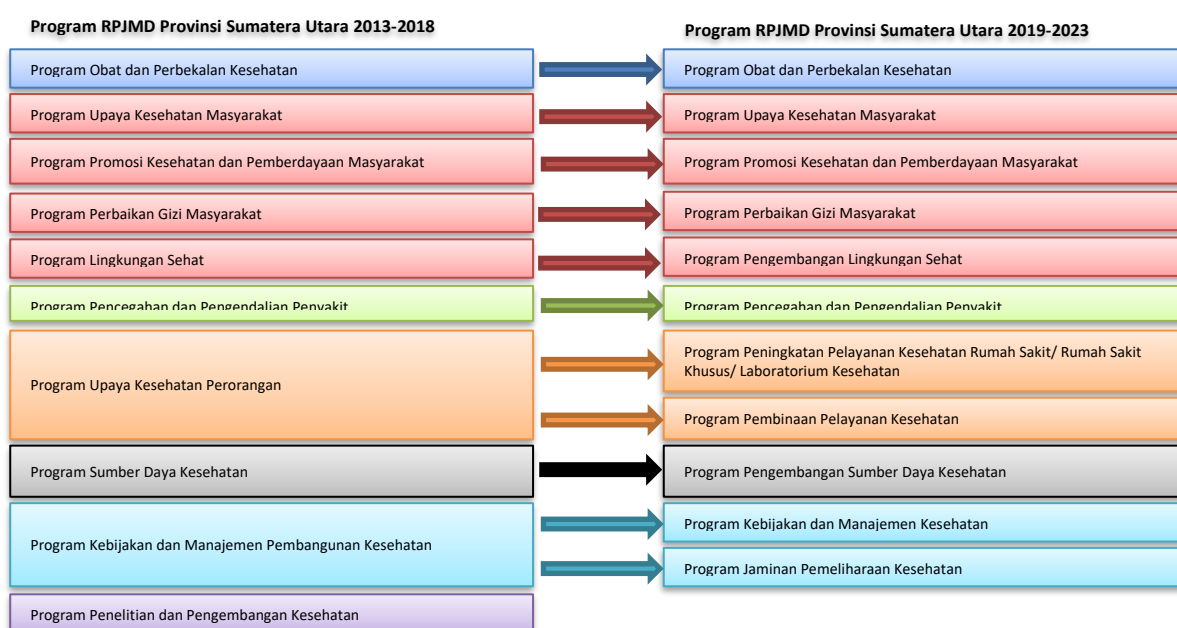
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat



6. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan
8. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
9. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
10. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
11. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pada periode tahun 2019-2023, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan transformasi program urusan kesehatan dengan melakukan reorganisasi program dan penyesuaian *nomenklatur* program. *Program Lingkungan Sehat* menjadi *Program Pengembangan Lingkungan Sehat*, *Program Upaya Kesehatan Perorangan* menjadi *Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan* dan *Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan*, *Program Sumber Daya Kesehatan* menjadi *Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan*, dan *Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan* menjadi *Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*. Di samping itu, terdapat penambahan program baru, yaitu *Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan*.

Gambar 5.1
Transformasi Program Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023



Sehubungan dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kembali melakukan transformasi program generik dan program prioritas yang telah digunakan dalam perencanaan dan penganggaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dan Tahun 2020, dan menggunakannya dalam perencanaan dan penganggaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 (akhir periode Perubahan Renstra). Program hasil transformasi tersebut telah sesuai dengan program yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Program generik yang terdiri dari *Program pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan* bertransformasi menjadi *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi*.

Program prioritas *Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan, Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, dan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan* bertransformasi menjadi *Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat*.

Selanjutnya, *Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan* bertransformasi menjadi *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan* bertransformasi menjadi *Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat* menjadi *Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*.



Adapun rincian program berikut dengan kegiatan dan sub kegiatan di masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya rencana pengelolaan retribusi daerah
			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah
			Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya data objek, subjek, dan wajib retribusi daerah
			Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan data retribusi daerah
			Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit baru dengan rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk 1:1.000
			Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1.000
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya fasilitas Kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya pengembangan pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat Kesehatan pada fasilitas Kesehatan lainnya
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat Kesehatan Rumah Sakit
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan
			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya sarana di fasilitas layanan Kesehatan
			Pengadaan prasarana fasilitas layanan Kesehatan	Tersedianya prasarana fasilitas layanan kesehatan



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Tersedianya bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan alat-alat Kesehatan/peralatan laboratorium Kesehatan
			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Tersedianya barang penunjang operasional Rumah Sakit
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan sesuai standar
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya sarana fasilitas layanan Kesehatan
			Pemeliharaan prasarana fasilitas layanan Kesehatan	Terpeliharanya prasarana fasilitas layanan Kesehatan
			Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya layanan konsultasi jarak jauh antar fasilitas pelayanan Kesehatan (Fasyankes) melalui pengadaan <i>telemedicine</i> untuk mendapatkan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya	Terlaksananya distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya
			Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke kabupaten/kota

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi sesuai standar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan haji



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	Terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penyalahguna NAPZA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan khusus
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan surveilans Kesehatan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota	Terkoordinasi dan tersinkronisasinya penerapan SPM Bidang Kesehatan lintas kabupaten/kota
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Terbinanya pelaksanaan upaya pelayanan Kesehatan
			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Terverifikasi dan terlaksananya penilaian kelayakan Puskesmas untuk registrasi Puskesmas
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Terlaksananya investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/kota
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya operasional pelayanan Rumah Sakit
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia da terkelolanya <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) yang terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam suatu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/ Nasional	Terdistribusinya spesimen penyakit potensial KLB ke Lab rujukan/nasional



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Terlaksananya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pendampingan fasilitas pelayanan kesehatan
			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Terkelolanya penelitian kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi kesehatan
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Meningkatnya tata Kelola Rumah Sakit
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang memenuhi standar
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Tersedianya data perizinan pengakuan PBF Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan Cabang PAK berbasis elektronik
		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin usaha kecil obat tradisional
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen hasil data sarana UKOT yang sudah menerapkan perizinan berbasis elektronik
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya upaya advokasi Kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Provinsi
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi UKBM



Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/9/KPTS/2022 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Bermartabat – 2023, terdapat 7 (tujuh) Kegiatan Strategis Daerah (KSD) bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengampu 5 (lima) dari 7 (tujuh) KSD tersebut, dan 2 (dua) KSD lainnya ada di RSUD Haji Medan Provsu (1 KSD) dan RS Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem (1 KSD).

Tabel 5.2
Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Bidang Kesehatan

No KSD.	Kegiatan Strategis Daerah	Perangkat Daerah
12.	Penanggulangan COVID-19 melalui penguatan pola 3T (<i>testing, tracing, treatment</i>), percepatan vaksinasi, penyediaan obat-obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
13.	<i>Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat</i>	<i>RSU Haji Medan Provsu.</i>
14.	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
15.	<i>Peningkatan kapasitas layanan Kesehatan melalui penambahan 100 (serratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem</i>	<i>RS Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem</i>
16.	Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-Sumatera Utara	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
17.	Pemberian jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
18.	Layanan Kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara



Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, serta Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang berkaitan dengan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Lampiran Perubahan Renstra.



BAB 6

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berfokus pada upaya mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ditunjukkan pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2, sedangkan indikator dalam pencapaian keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) ditunjukkan pada Tabel 6.3.



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019			2020		
					Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100%	84.7%	3.097.944.300	100%	82%	2.356.879.050
			Cakupan pelayanan balita sesuai standar	Persen	100%	84.6%		100%	65%	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	93.1%		100%	89%	
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	Persen	100%	75.2%		100%	61.97%	
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan Kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Persen	50%	71.6%		71.6%	60.5%	
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Persen	60%	78.14%		78.14%	79.3%	
			Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sesuai standar	Persen	40%	54%		55%	54.26%	
			Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	67%	67.23%		68%	67.63%	
			Persentase kab/kota yang melaksanakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Persen	30%	39%		40%	55%	
			Persentase desa/kelurahan siaga aktif	Persen	40%	40%		41%	41.72%	
			Persentase Posyandu aktif	Persen	55%	55.32%		56%	55.63%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2019			2020		
					Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Persen	100%	100%	3.805.887.500	100%	100%	20.884.224.105
			Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	Persen	90%	89.01%		85%	76.7%	
			Persentase bayi kurang 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Persen	53%	52%		50%	44.9%	
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan surveillans gizi	Persen	100%	100%		60%	70%	
			Persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium	Persen	100%	100%		100%	99.9%	
			Persentase ibu hamil mendapatkan tablet Fe minimal 90 tablet	Persen	80%	92%		85%	95.4%	
			Persentase remaja putri (Rematri) yang memperoleh tablet tambah darah	Persen	30%	52.71%		50%	32.5%	
5.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pengembangan lingkungan sehat	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kurus mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Persen	95%	97.58%	2.223.851.595	96%	97.12%	3.023.097.400
			Persentase anak sekolah mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Persen	91%	91%		30%	0%	
			Persentase balita mendapat Vitamin A	Persen	92%	90.98%		90%	90%	
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	50%	52.82%		60%	60.85%	
			Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Persen	25%	26.76%		40%	51.98%	
			Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan	Persen	84%	83.52%		60%	35.76%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2018		2019			
					Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan	Persen	85%	82.87%	8.314.210.467	70.36%	53.03%	3.811.337.268
			Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan Kawasan sehat	Persen	65%	66.67%		66.67%	27.27%	
			Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	83%	82.6^	80%	69.9%		
			Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persen	93%	86.2%	90%	75.5%		
			Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT, HB, Hib lanjutan	Persen	90%	70.3%	90%	57.5%		
			Persentase anak sekolah dasar yang mendapat imunisasi tambahan pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Persen	94%	91.5%	90%	61.8%		
			Angka Non-Polio Acute Flaccyd Paralysis (AFP) per 100.000 anak usia < 15 tahun	Per 100.000 penduduk	≥ 2	2.24	8.314.210.467	2.24	0.46	
			Persentase penurunan jumlah kasus PD3I dibandingkan baseline data	Persen	5%	16%		100%	100%	
			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100%	100%		100%	100%	
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak penyakit infeksi emerging	Persen	82%	81.81%	8.314.210.467	84%	84%	
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100%	100%		100%	100%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					2019		Anggaran (Rp.)	2020	
					Target	Realisasi		Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Persentase Jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%		100%	100%
			Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan Filariasis	Persen	95%	94%		20%	0%
			Persentase Puskesmas melaksanakan pencegahan dan pengendalian Hepatitis	Persen	70%	72.83%		72.72%	72.72%
			CFR Diare pada saat KLB	Persen	< 1.2%	1.09%		< 1.2%	< 1.2%
			Prevalensi kecacingan pada anak sekolah	Persen	< 20%	12.40%		< 20%	16.9%
			Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	49	51.38		49	20.4
			Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk (API)	Per 1.000 penduduk	0.08	0.08		0.06	0.06
			Angka Case Detection Rate penyakit TB	Persen	65%	61.70%		65%	61.70%
			Angka keberhasilan pengobatan TB/Treatment Success Rate (SR)	Persen	90%	92.2%		90%	92.2%
			Prevalensi HIV/AIDS	Persen	< 0.5%	0.33		< 0.5%	0.33
			Angka penemuan kasus baru Frambusia per 100.000 penduduk	Persen	< 0.10	0.014		< 0.10	0
			Angka penemuan kasus baru Kusta per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	1.24	1.26		1.24	0.73
			Persentase cacat tingkat 2 Kusta	Persen	< 10%	20%		< 10%	16%
			Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan mapping vector penyakit	Persen	30%	30%		30.30%	70%

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2019			2020		
					Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 30% Puskesmas yang menyelenggarakan upaya Kesehatan jiwa sesuai standar	Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	34.524.138.533	14 Kab/Kota	18 Kab/Kota	26.457.005.766
			Persentase penyalahgunaan NAPZA yang mengalami program rehabilitasi di Fasyankes	Persen	1%	0.66%		1%	0.76%	
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	Persen	80%	82.18%	85%	90.20%		
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Persen	60%	58.66%	60%	77.05%		
8.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya pengembangan sumber daya manusia Kesehatan	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Kusta Lausimomo	Persen	25%	25.53%	16.850.535.027	30%	18.14%	163.720.800
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Indrapura	Persen	20%	79.29%		50%	64.05%	
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. Laboratorium Kesehatan	Persen	82.5%	81.14%		82%	84.16%	
			Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga Kesehatan promotif dan preventif	Persen	30%	31.83%		27%	34.1%	
			Persentase tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	50%	54.75%		10%	2%	
			Persentase tenaga kesehatan yang telah didata berdasarkan pendataan di Rumah Sakit dan Puskesmas	Persen	40%	88.47%				
			Persentase tenaga Kesehatan yang dilatih pada pelatihan kesehatan yang terakreditasi	Persen	3%	3.6%		1%	1,048%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2019			2020		
					Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya kebijakan dan manajemen kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas	Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	5.972.442.405	13 Dokumen	13 Dokumen	4.271.350.650
			Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	Persen	100%	100%		81%		
			Jumlah dokumen kerjasama program lintas sektor dan antar daerah bidang kesehatan	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen		7 Dokumen		
10	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pembinaan pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terakreditasi	Persen	78.8%	82.02%	8.473.170.992	82.02%	91.64%	1.831.454.850
			Persentase RS Pemerintah (Non BUMN/TNI/Polri) yang terakreditasi	Persen	88.1%	90%		90%	87.80%	
			Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi	Persen	9.5%	9.5%		9.52%	8.70%	
			Persentase RSUD yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam	Persen	92.5%	91.67%		91.67%	89%	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	80%	80%		81%	82.93%	
			Persentase RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	Persen	73%	65.78%		65.78%	64%	
			Cakupan pelayanan gawat darurat di RSUD sesuai standar	Persen	90%	92%		93%	94.87%	
			Cakupan pelaksanaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di kabupaten/kota	Persen	24%	36%		24%	48%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					2019		2020		
					Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	35%	38.67%		38%	49.59%
			Persentase Puskesmas yang menerapkan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dengan pendekatan keluarga	Persen	25%	25.47%		25.47%	31.79%
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	30%	30.98%		30.98%	35%
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	Persen	30%	30%		30%	30%
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan	Persen	100%	100%		100%	100%
			Persentase Rumah Sakit yang menerapkan standarisasi klasifikasi sesuai dengan peraturan yang ada	Persen	61.03%	61.01%		75.12%	62.74%
			Persentase Puskesmas yang memenuhi standar Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan	Persen	30%	44%		47%	48%
11.	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Meningkatnya jaminan pemeliharaan kesehatan	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	75%	72.38%	91.773.408.609	70.43%	70.55%
									136.369.097.072

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2021		2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	1.1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100%	431.823.339.341	100%	361.907.121.890	100%	398.097.834.079
			1.2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersali	Persen	100%		100%		100%	
			1.3 Cakupan pelayanan nifas	Persen	82%		85%		90%	
			1.4 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persen	100%		100%		100%	
			1.5 Cakupan pelayanan balita sesuai standar	Persen	100%		100%		100%	
			1.6 Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%		100%		100%	
			1.7 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100%		100%		100%	
			1.8 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan Kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Persen	65%		70%		75%	
			1.9 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja	Persen	75%		80%		85%	
			1.10 Cakupan bayi kurang 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Persen	50%		55%		57%	
			1.11 Persentase kabupaten/kota melakukan surveilans gizi	Persen	38%		40%		45%	
			1.12 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	28.5%		27.5%		26.5%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2021		2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.13 Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Persen	7.9%		6.4%		5%	
			1.14 Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Persen	12%		10%		9%	
			1.15 Persentase Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk pada balita	Persen	n/a		15%		20%	
			1.16 Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat MP-ASI	Persen	65%		70%		75%	
			1.17 Persentase ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persen	60%		70%		80%	
			1.18 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	65%		70%		75%	
			1.19 Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	Persen	60%		70%		75%	
			1.20 Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan	Persen	40%		45%		50%	
			1.21 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dilakukan pengawasan	Persen	30%		40%		45%	
			1.22 Persentase Fasyankes melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	Persen	55%		60%		65%	
			1.23 Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan Kawasan sehat	Kab/kota	12 kab/kota		13 kab/kota		15 kab/kota	
			1.24 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	94%		94.1%		94.6%	
			1.25 Persentase anak Sekolah Dasar mendapatkan imunisasi lanjutan Difteri Tetanus (DT)	Persen	n/a		90%		93%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2021		2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.26 Angka Non Acute Flaccid Paralysis (AFP) per 100.000 anak usia <15 tahun	Angka	≥ 2		≥ 2		≥ 2	
			1.27 Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	Persen	n/a		71%		75%	
			1.28 Jumlah Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Kab/Kota	n/a		29 kab/kota		30 kab/kota	
			1.29 Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak-Rubella	Persen	n/a		85,6%		90,3%	
			1.30 Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100%		100%		100%	
			1.31 Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak penyakit infeksi emerging	Persen	86%		90%		95%	
			1.32 Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100%		100%		100%	
			1.33 Persentase Jemaah haji yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	100%		100%		100%	
			1.34 Angka mikrofilaria rate (Mf Rate)	Persen	<1%		<1%		<1%	
			1.35 Persentase Puskesmas melaksanakan pencegahan dan pengendalian Hepatitis B	Persen	71%		80%		90%	
			1.36 CFR Diare pada saat KLB	Persen	< 1,2%		< 1,2%		< 1,2%	
			1.37 Prevalensi kecacingan pada anak sekolah	Persen	< 20%		< 10%		< 10%	
			1.38 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	Angka	< 49 per 100.000 penduduk		< 49 per 100.000 penduduk		< 49 per 100.000 penduduk	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2021		2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.39 Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API)	Persen	0.06		0.10		0.09	
			1.40 Angka <i>case detection rate</i> penyakit TB	Persen	34%		45%		55%	
			1.41 Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB (<i>success rate</i>)	Persen	90%		90%		90%	
			1.42 Prevalensi HIV/AIDS	Persen	< 0.21%		< 0.5%		< 0.5%	
			1.43 Angka <i>zoonosis</i> lainnya (flu burung, rabies, antraks, leptospirosis) yang ditangani sesuai standar	Persen	78%		80%		85%	
			1.44 Cakupan penemuan dan tata laksana kasus pneumonia pada balita	Persen	35%		55%		60%	
			1.45 Angka penemuan kasus baru Frambusia per 100.000 penduduk	Persen	< 0.10%		< 0.10%		< 0.10%	
			1.46 Angka penemuan kasus baru Kusta per 100.000 penduduk	Persen	1.24%		< 5%		< 5%	
			1.47 Angka cacat Kusta tingkat 2	Persen	< 20%		< 20%		< 20%	
			1.48 Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%		100%		100%	
			1.49 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	100%		100%		100%	
			1.50 Jumlah kabupaten/kota dengan paling kurang 40% Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kab/Kota	20 kab/kota		24 kab/kota		29 kab/kota	
			1.51 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan pelayanan terpadu PTM sesuai standar	Kab/kota	18 kab/kota		20 kab/kota		25 kab/kota	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2021		2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.52 Jumlah kab/kota yang memiliki cakupan deteksi dini factor risiko penyakit tidak menular paling kurang 80%	Kab/kota	2 kab/kota		10 kab/kota		15 kab/kota	
			1.53 Jumlah kab/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan deteksi dini penyakit kanker	Kab/kota	14 kab/kota		23 kab/kota		29 kab/kota	
			1.54 Jumlah kab/kota melaksanakan deteksi dini gangguan indera $\geq$ 40% populasi	Kab/kota	n/a		5 kab/kota		10 kab/kota	
			1.55 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	100%		100%		100%	
			1.56 Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah Kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA/ Sederajat	Kab/kota	20 kab/kota		24 kab/kota		27 kab/kota	
			1.57 Jumlah kab/kota yang memiliki 30% Puskesmas yang menyelenggarakan upaya Kesehatan jiwa sesuai standar	Kab/kota	21 kab/kota		24 kab/kota		27 kab/kota	
			1.58 Persentase pencandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan NAPZA yang menjalani program rehabilitasi medis	Persen	1.2%		1.3%		1.5%	
			1.59 Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	Persen	85%		90%		95%	
			1.60 Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Persen	80%		90%		95%	
			1.61 Persentase kesembuhan pasien Kusta di UPT. RS Kusta Lausimomo	Persen	n/a		100%		100%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2021		2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.62 Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Lausimomo	Persen	n/a		85%		90%	
			1.63 Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Indrapura	Persen	70%		90%		95%	
			1.64 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. Laboratorium Kesehatan	Persen	83.5%		84%		84.5%	
			1.65 Persentase FKTP yang terakreditasi	Persen	90.7%		91.7%		95%	
			1.66 Persentase RS Pemerintah (Non BUMN/TNIPolri) yang terakreditasi	Persen	85.7%		88.4%		95.3%	
			1.67 Persentase laboratorium Kesehatan yang terakreditasi	Persen	38.1%		21.7%		50%	
			1.68 Rasio daya tamping Rumah Sakit Rujukan	Per 1.000 penduduk	1.6		1.6		1.6	
			1.69 Persentase RSUD yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam	Persen	96%		98%		100%	
			1.70 Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	90%		95%		100%	
			1.71 Persentase RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	Persen	66.6%		76%		78%	
			1.72 Cakupan pelayanan gawat darurat sesuai standar	Persen	95%		98%		100%	
			1.73 Cakupan pelaksanaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di kab/kota	Persen	48%		61%		73%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2021		2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.74 Persentase FKTP yang melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	45%		65%		75%	
			1.75 Persentase Puskesmas yang menerapkan keperawatan Kesehatan masyarakat (Perkesmas) dengan pendekatan keluarga	Persen	30%		50%		60%	
			1.76 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan tradisional	Persen	40%		45%		50%	
			1.77 Persentase Puskesmas yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	Persen	30%		55%		60%	
			1.78 Persentase FKTP rawat inap yang menerapkan pelayanan kegawatdaruratan	Persen	100%		100%		100%	
			1.79 Persentase Rumah Sakit yang menerapkan standarisasi klasifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen	72%		78.7%		90%	
			1.80 Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	77%		78.3%		80.3%	
			1.81 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen	94%		95%		96%	
			1.82 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen	67%		68%		69%	
			1.83 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan system informasi Kesehatan	Persen	100%		100%		100%	
			1.84 Persentase Fasyankes yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	Persen	60%		80%		90%	
			1.85 Persentase kabupaten/kota yang merespon alert SKDR minimal	Persen	n/a		70%		80%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2021		2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	2.1 Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan perizinan	Persen	n/a	230.591.000	90%	442.574.500	100%	486.831.950
			2.2 Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	Persen	n/a		100%		100%	
			2.3 Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	Persen	60%		67%		70%	
			2.4 Persentase sarana pelayanan Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	Persen	43%		58%		60%	
			2.5 Persentase sarana produk kefarmasian yang dibina agar memenuhi standar cara produksi yang baik	Persen	70%		73%		75%	
			2.6 Persentase sarana produksi alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT) yang menerapkan CPAKB, CPPKRTB, dan CDAKB	Persen	84%		87%		90%	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	3.1 Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (Sembilan) jenis tenaga Kesehatan	Persen	n/a	31.736.272.671	43%	21.174.603.450	50%	23.292.063.795
			3.2 Persentase tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	11%		20%		30%	
			3.3 Persentase Rumah Sakit yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar	Persen	n/a		45%		55%	
			3.4 Persentase tenaga Kesehatan yang dilatih pada pelatihan Kesehatan terakreditasi	Persen	1%		2%		3%	

No.	Program	Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2021		2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	4.1	Persentase kab/kota yang melaksanakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	50%	561.089.000	70%	1.694.297.500	75%	1.863.727.250
			4.2	Persentase desa/kelurahan siaga aktif	41%		45%		50%	
			4.3	Persentase Posyandu aktif	57%		58%		59%	
			5.1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	A	170.030.890.184	A	179.202.404.716	A	197.122.645.188
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya penyelenggaraan manajemen perkantoran yang bersih, transparan, dan akuntabel		Nilai						



Tabel 6.3. Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023

No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Sasaran KSD	Indikator Kinerja KSD	Satuan	Capaian Kinerja KSD dan Kerangka Pendanaan			
					2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.	Penanggulangan COVID-19 melalui penguatan pola 3T (<i>testing, tracing, treatment</i>), percepatan vaksinasi, penyediaan obat-obatan, penguatan kapasitas Rumah Sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis	Menurunnya kasus COVID-19 dan meningkatnya cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara	Persentase kasus aktif, Persentase kasus meninggal, Persentase keterisian tempat tidur (<i>Bed Occupancy Rate/BOR</i>)	Persen	Di bawah rata-rata Nasional	70.000.000.000	Di bawah rata-rata Nasional	70.000.000.000
			Persentase kasus sembuh dan cakupan vaksinasi COVID-19 di atas rata-rata Nasional	Persen	Di atas rata-rata Nasional		Di atas rata-rata Nasional	
14.	Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan stunting	Tersedianya suplementasi gizi dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK, balita kurus, dan anak sekolah dalam rangka memenuhi konsumsi harian sesuai kebutuhan berdasarkan angka kecukupan gizi	Jumlah ibu hamil KEK, balita kurus dan/atau anak sekolah yang mendapatkan suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan	Jiwa (kumulatif)	126.568	33.500.000.000	250.000	35.000.000.000
16.	Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 Kabupaten/Kota	Meningkatnya aktivitas fisik, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi, pencegahan dan deteksi penyakit, kualitas lingkungan dan edukasi hidup sehat	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan KIE GERMAS	Kab/Kota	33	6.000.000.000	33	7.500.000.000

No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Sasaran KSD	Indikator Kinerja KSD	Satuan	Capaian Kinerja KSD dan Kerangka Pendanaan			
					2022		2023	
					Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.	Pemberian jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh Sembilan) jiwa	Jumlah PBPU/BP Provinsi yang didaftarkan Pemerintah Sumatera Utara (PBI Provinsi) Jumlah peserta PBI JKN yang dibayarkan kontribusinya Jumlah PBPU/BP Provinsi yang didaftarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PBI Provinsi)	Jumlah PBPU/BP Provinsi yang didaftarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PBI Provinsi) Jumlah peserta PBI JKN yang dibayarkan kontribusinya	Jiwa Jiwa	180.000 4.733.689	210.000.000.000	420.000 4.733.689	315.000.000.000
18.	Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/ bus kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, dan tidak mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah mobil medis/ bus kesehatan dan/atau kendaraan operasional/ lapangan	Unit	3	2.600.000.000	2	10.000.000.000

BAB

7

BAB VII PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan dokumen yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang strategis kurun waktu 2019-2023. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, serta memperhatikan dokumen perencanaan lain yang terkait.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam upaya menghasilkan program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang strategis di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dan selanjutnya menjadi subjek perbaikan dan penyempurnaan khususnya terkait penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Medan, Januari 2022

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara,**



**drg. ISMAIL LUBIS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710204 200003 1 002**





LAMPIRAN

Tabel T.C.27. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2020

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Meningkatnya penyelenggaraan manajemen perkantoran yang bersih, transparan, dan akuntabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(18)
		1.02 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	95	96	24.728,0	97	28.223,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan surat-menyurat	unit		7	57,3	7	70,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik	unit		7	3.375,0	7	3.893,8	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	03 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan administrasi keuangan	unit		7	4.170,6	7	5.353,6	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	04 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit kantor yang mendapat manfaat jasa kebersihan	unit		7	3.289,0	7	3.412,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	05 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan ATK	unit		7	733,2	7	1.245,6	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	06 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan cetakan dan penggandaan	unit		7	1.199,9	7	1.207,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	07 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	unit		7	499,9	7	582,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	unit		7	149,9	7	142,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	09 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan makanan dan minuman rapat/lanu	unit		7	449,9	7	415,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	unit		7	1.462,7	7	1.684,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 01	11 Pengembalian jasa medik	Jumlah unit kantor yang mendapat pengembalian jasa medik	unit		4	4.999,8	4	5.827,8	Dinas Kesehatan
1.02 01 01	12 Penyediaan jasa keamanan	Jumlah unit kantor yang mendapat manfaat jasa keamanan	unit		7	3.001,2	7	3.001,2	Dinas Kesehatan		
1.02 01 01	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	unit		7	1.345,3	7	1.386,0	Dinas Kesehatan		
1.02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	80	82	25.763,1	84	22.807,9	Dinas Kesehatan		
1.02 01 02	01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit			1.951,1	-	-	Dinas Kesehatan		
1.02 01 02	02 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan peralatan gedung kantor	unit		7	3.877,4	7	4.463,9	Dinas Kesehatan		
1.02 01 02	03 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan perlengkapan gedung kantor	unit		7	4.701,7	7	3.540,8	Dinas Kesehatan		

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019	2020			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		1.02 01 02	04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit kantor yang dilakukan pemeliharaan gedung kantor	unit		7	12.026,6	7	11.534,8	Dinas Kesehatan
		1.02 01 02	05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit		7	1.706,2	7	1.854,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 02	06 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit kantor yang dipenuhi kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit		7	1.499,9	7	1.414,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 02	xx Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit			-		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	Persen	95	96	1.497,2	97	1.879,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 03	01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	stel			697,5	945	952,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 03	02 Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	buah			223,7	945	926,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 03	03 Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	buah			495,0		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 03	04 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari/event tertentu yang diadakan	buah			81,0		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	95	96	4.661,1	97	3.098,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 05	01 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah petugas yang mengikuti diklat formal	orang			4.217,8		2.668,8	Dinas Kesehatan
		1.02 01 05	02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah petugas yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang			116,4		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 05	03 Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan manajemen kepegawaian	dokumen		1	326,8		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 05	xx Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang ditetapkan	dokumen				1	209,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 05	xx Tata Kelola Pangkat, Jabatan, karir, dan kompetensi	Persentase pelayanan pangkat, jabatan, karir, dan kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Persen				60	103,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 05	xx Tata Kelola Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja ASN	Persentase penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dengan hasil minimal baik sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Persen				60	116,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	Persen		100	499,8	100	641,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 06	01 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan CALK	dokumen		3	499,8	3	289,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 06	xx Penyusunan Laporan Kinerja (LK), LKPJ, LPPD, dan Perjanjian Kinerja (PK)	Jumlah dokumen laporan kinerja	dokumen			-	4	107,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 06	xx Pendataan aset	Jumlah laporan pendataan aset	dokumen			-	1	243,8	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	1.02 01 16	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	90,00	100,00	8.889,1	100,00	6.208,6	Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	86,30	100,00		100,00		
		1.02 01 16	xx Evaluasi terpadu pelayanan antenatal care (ANC)	Jumlah dokumen evaluasi dan rencana tindak lanjut pelayanan ANC	dokumen		1	425,0		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Penatalaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi wanita dan remaja	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan reproduksi wanita dan remaja	dokumen		1	210,0		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Supervisi program kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil supervisi program KIA	dokumen		1	138,0		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pemutakhiran dan sinkronisasi data kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen laporan KIA yang sinkron	dokumen		1	223,8		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Workshop fasilitator pencegahan penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA)	Jumlah petugas yang mampu menjadi fasilitator pencegahan penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis dari ibu ke anak (PPIA)	Orang		-	-	20	143,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi kohort (ibu, bayi, balita) Terintegrasi dengan Triple Eliminasi	Jumlah dokumen hasil orientasi kohort (ibu, bayi, balita) dengan triple eliminasi	dokumen				1	177,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Penilaian pelaksanaan kelas ibu	Jumlah dokumen hasil penilaian pelaksanaan kelas ibu di kabupaten/ kota	dokumen		-	-	1	160,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pendampingan ibu hamil dalam pemanfaatan buku KIA oleh mahasiswa (Perguruan Tinggi)	Jumlah ibu hamil yang dilakukan pendampingan pemanfaatan buku KIA oleh mahasiswa	Orang		-	-	40	180,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah petugas yang paham PUG dan ARG Bidang Kesehatan	Orang		-	-	33	160,6	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Workshop peningkatan peran lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)	Jumlah petugas yang paham dalam pelaksanaan pelayanan PKPR	Orang		-	-	32	125,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan BOK Provinsi	dokumen		1	5.135,2			Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	85,40	100,00		100,00		
		1.02 01 16	xx Evaluasi pelaksanaan persalinan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi dan rencana tindak lanjut persalinan sesuai standar	dokumen		1	315,0	-	-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi Maternal Death Notification (MDN)	Jumlah laporan orientasi MDN	dokumen		-	-	1	100,3	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Nifas sesuai Standar	Persen	81,7	84,00		86,00				
1.02 01 16	xx Orientasi KB paska persalinan	Jumlah petugas yang paham KB paska persalinan	Orang		33	196,2	-	-	Dinas Kesehatan		
1.02 01 16	xx Pembinaan layanan Keluarga Berencana (KB) Pasca salin	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan KB pasca salin	Puskesmas		-	-	48	136,0	Dinas Kesehatan		
1.02 01 16	xx Dukungan Kegiatan Bulan Bakti Keluarga Berencana (KB) - Kesehatan bekerjasama dengan Lintas Sektor	Jumlah frekuensi pelaksanaan Bulan Bakti KB - Kesehatan	kali		-	-	3	34,4	Dinas Kesehatan		
1.02 01 16	xx Pelatihan KB persalinan bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih KB persalinan	orang		-	-		55,4	Dinas Kesehatan		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	88,60	100,00		100,00				
1.02 01 16	xx Orientasi pelayanan maternal dan neonatal terstandar	Jumlah petugas yang paham pelayanan maternal dan neonatal terstandar	Orang		33	132,5	-	-	Dinas Kesehatan		
1.02 01 16	xx Orientasi pelayanan kesehatan neonatal esensial	Jumlah petugas yang paham pelayanan kesehatan neonatal esensial	Orang		-	-	33	51,9	Dinas Kesehatan		

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		1.02 01 16	xx Monitoring dan evaluasi paska pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Jumlah laporan monev paska pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	dokumen		-	-	1	19,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Jumlah petugas (dokter/ perawat/ bidan) Fasyankes primer yang terlatih penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Orang		-	-	30	209,9	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan Balita sesuai Standar	Persen	85,00	100,00		100,00		
		1.02 01 16	xx Pelatihan pelayanan balita dan anak pra sekolah terstandar	Jumlah petugas yang terampil dalam pelayanan balita dan anak pra sekolah terstandar			33	296,1	-	-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Balita bagi Kader Kesehatan	Jumlah laporan hasil orientasi SDIDTK dan sosialisasi kelas ibu balita bagi kader kesehatan	dokumen		-	-	1	122,6	Dinas Kesehatan
				Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen	n/a	100,00		100,00		
		1.02 01 16	xx Inisiasi pembentukan sekolah sehat	Jumlah sekolah yang diinisiasi sekolah sehat	unit		2	275,2	2	98,6	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi pelaksanaan sekolah sehat	Jumlah sekolah yang diorientasi sekolah sehat	unit		2	127,7	2	99,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Koordinasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	dokumen				1	208,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan monev pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	Kab/kota		33	96,7	33	95,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi konselor sebaya (kader kesehatan remaja)	Jumlah laporan orientasi konselor sebaya	dokumen		-	-	1	99,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi pelayanan kesehatan peduli remaja dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan remaja (MTPKR)	Jumlah laporan orientasi PKPR dan MTPKR	dokumen		-	-	1	70,9	Dinas Kesehatan
				Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	70,00	100,00		100,00		
		1.02 01 16	xx Penatalaksanaan pelayanan kesehatan terstandar pada usia lanjut	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan terstandar pada usia lanjut	dokumen		1	649,9		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen rancangan RAD kesehatan lanjut usia Provinsi Sumatera Utara	dokumen		-	-	1	149,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Lokakarya Finalisasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen RAD kesehatan lanjut usia Provinsi Sumatera Utara	dokumen		-	-	1	110,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Pelayanan Konseling Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah dokumen hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan konseling kesehatan usia lanjut	dokumen		-	-	1	185,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Penyediaan buku kesehatan lansia dan lansia kit	Jumlah buku kesehatan lansia dan lansia kit yang disediakan	Paket		-	-	1	110,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Lokakarya pelayanan home care lanjut usia	Jumlah laporan pelaksanaan lokakarya pelayanan home care lanjut usia	dokumen		-	-	1	150,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi pedoman kader seri kesehatan lansia	Jumlah laporan orientasi pedoman kader seri kesehatan lansia	dokumen		-	-	1	77,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi penggunaan panduan praktis untuk caregiver pada perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia	Jumlah laporan orientasi penggunaan panduan praktis untuk caregiver pada PJP bagi lansia	dokumen		-	-	1	102,2	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				<i>Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya</i>	<i>Persen</i>	40,00	50,00	55,00			
		1.02 01 16	xx Orientasi pelayanan kesehatan olahraga	Jumlah orang yang paham pelayanan kesehatan olahraga	Kab/kota			-		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Olahraga	Jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi pelayanan kesehatan olahraga	dokumen			-	1	168,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Supervisi penyelenggaraan kesehatan olahraga	Jumlah kab/kota yang disupervisi penyelenggaraan kesehatan olahraga	Kab/kota		33	131,7		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Sosialisasi peregrangan di tempat kerja	Jumlah instansi yang disosilisasi peregrangan di tempat kerja	Instansi			-	10	23,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Workshop kebugaran jasmani calon jemaah haji bagi petugas	Jumlah petugas yang paham pengukuran kebugaran jasmani calon jemaah haji	Orang		33	104,6			
		1.02 01 16	xx Pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat	Jumlah orang yang diukur kebugaran jasmininya	Orang		150	113,6	300	150,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Sosialisasi pergerakan aktivitas fisik	Jumlah laporan sosialisasi pergerakan aktivitas fisik	dokumen			-	1	226,1	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar</i>	<i>Persen</i>	n/a	60,00		65,00		
		1.02 01 16	xx Koordinasi/Orientasi Pembentukan Pos UKK	Jumlah orang yang paham tentang tentang Pos UKK	Orang			135,7	38	224,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Koordinasi Penyelenggaraan Kesehatan Kerja dan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut Penyelenggaraan Kesehatan Kerja dan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	Dokumen		1	181,4			
		1.02 01 16	xx Penguatan GP2SP	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) penguatan GP2SP	dokumen			-	1	250,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Orientasi Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Jumlah orang yang paham tentang tentang Pelaksanaan K3	Orang				33	140,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar	Jumlah dokumen monev program pelayanan kesehatan kerja dasar	Dokumen			-	1	130,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Koordinasi kesehatan pekerja migran Indonesia (PMI) dan pengemudi	Jumlah laporan kordinasi kesehatan PMI dan pengemudi	dokumen			-	1	102,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Sosialisasi Penyakit Akibat Kerja (PAK)	Jumlah laporan sosialisasi PAK	dokumen			-	1	122,6	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pemantauan kesehatan pekerja migran Indonesia	Jumlah laporan hasil pemantauan kesehatan PMI	dokumen			-	1	7,6	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pemantauan kesehatan pengemudi	Jumlah laporan hasil pemantauan kesehatan pengemudi	dokumen			-	1	20,0	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase Fasyankes yang Menyelenggarakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai Standar</i>	<i>Persen</i>	n/a	40,00		60,00		
		1.02 01 16	xx Sosialisasi K3 Rumah Sakit	Jumlah orang yang mengetahui tentang K3 di rumah sakit	Orang			-	39	146,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan K3 di Fasyankes	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3 di fasyankes	Kab/kota			-	1	117,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 16	xx Penguatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Fasyankes/Perkantoran	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) penguatan K3 di Fasyankes/Perkantoran	dokumen			-	1	219,6	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat	1.02 01 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun)	Persen	33,00	31,50	5.226,3	30,50	22.669,3	Dinas Kesehatan
				Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	Persen	79,00	80,00		82,00		
		1.02 01 20	xx Pendampingan kasus gizi bunuk	Jumlah kasus gizi buruk yang dilakukan	kasus			279,9		280,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Jumlah petugas yang dilatih PMBA	Orang		-	-		336,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Pelatihan Tataleksana Gizi Buruk Balita	Jumlah petugas yang dilatih tataleksana gizi buruk balita	Orang		-	-		399,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Orientasi proses asuhan gizi bagi petugas Puskesmas Kab. Lokus stuling	Jumlah petugas Puskesmas di kab. Lokus stunting yang diorientasi proses asuhan gizi	Orang		-	-		433,2	Dinas Kesehatan
				Persentase bayi kurang 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Persen	50,00	53,00		56,00		
		1.02 01 20	xx Workshop ASI Eksklusif bagi organisasi kesehatan/Profesi ASI Ekslusif	Jumlah Peserta Yang Paham Mengenai Pemberian ASI Ekslusif	Orang		-	-	45	148,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Peningkatan Kapasitas Tenaga Konselor ASI	Jumlah petugas Puskesmas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam konseling ASI	Orang		-	-	120	129,4	Dinas Kesehatan
				Persentase kabupaten/ kota melakukan surveilans gizi	Persen	100,00	100,00		100,00		
		1.02 01 20	xx Koordinasi manajemen program gizi	Jumlah dokumen rencana kerja program gizi kab/kota	Dokumen			166,8	33	152,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Supervisi pelaksanaan surveilans gizi	Jumlah kab/kota yang disupervisi surveilans gizi	Kab/Kota		33	118,5	-	-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Koordinasi kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut kewaspadaan pangan dan gizi	dokumen		1	469,5	-	-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Orientasi pencatatan dan laporan e-PPGBM	Jumlah petugas yang paham pencatatan dan pelaporan e-ppbpm	Orang		33	207,1	-	-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Survelans gizi	Jumlah laporan surveilans gizi	dokumen			-	1	179,4	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Supervisi dalam rangka verifikasi data balita stunting	Jumlah laporan supervisi dalam rangka verifikasi data balita stunting	dokumen			-	1	183,6	Dinas Kesehatan
				xx Advokasi partisipatif lintas sektor dan lintas program dalam rangka percepatan penurunan stunting	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) percepatan penurunan stunting	dokumen			-	1	282,3
			Persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium	Persen	99,98	100,00		100,00			
1.02 01 20	xx Pemantauan Konsumsi garam beryodium di kabupaten/kota	Jumlah RT yang dipantau dalam konsumsi garam beryodium	RT			-	-		5,6	Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu hamil mendapatkan tablet Fe mthimal 90 tablet	Persen	77,25	98,00		98,00			
1.02 01 20	xx Sosialisasi pencegahan stunting melalui pemberian tablet tambah darah (Fe) pada ibu hamil dan remaja putri (Rematri)	Jumlah petugas yang tahu pencegahan stunting melalui pemberian TTD pada Bumil dan Rematri	Orang			33	125,3	-	172,2	Dinas Kesehatan	
1.02 01 20	xx Workshop Suplementasi gizi dalam rangka peningkatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah petugas yang paham suplementasi gizi	Orang			-	-	33	149,9	Dinas Kesehatan	
			Persentase remaja putri (Rematri) yang memperoleh Tablet Tambah Darah	Persen	19,96	30,00		35,00			
1.02 01 20	xx Rapat koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri	Jumlah dokumen kesepakatan dan rencana kerja	Dokumen			-	-	1	114,1	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat pemberian makanan tambahan (PMT)	Persen	83,61	95,00		96,00		
		1.02 01 20	xx Monitoring ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring Bumil KEK	Kab/kota		33	155,6		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Penyediaan paket Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil (PMT Bumiil) dalam rangka penurunan stunting	Jumlah paket PMT Bumiil yang disediakan	Paket		1	2.059,2		799,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 20	xx Penyediaan dan distribusi PMT ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Kurus	Jumlah PMT ibu hamil dan balita kurus yang diadakan	Paket		-	-	1	18.631,1	Dinas Kesehatan
				Persentase balita kurus (wasting) mendapat pemberian makanan tambahan (PMT)	Persen	90,91	91,00		92,00		
		1.02 01 20	xx Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)/ Suplemen gizi					1.644,0			Dinas Kesehatan
				Persentase balita mendapat Vitamin A	Persen	92,00	93,00		94,00		
		1.02 01 20	xx Pertemuan koodinasi penguatan pelaksanaan suplementasi vitamin A balita dan ibu nifas	Jumlah peserta yang mengetahui pelaksanaan suplementasi vitamin A balita dan ibu nifas	Orang		-	-	-	-	Dinas Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya angka kesakitan	1.02 01 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Gernas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Persen	25,00	30,00	4.090,3	40,00	2.356,8	Dinas Kesehatan
				Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	66,13	67,00		69,00		
		1.02 01 19	xx Workshop pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah petugas yang mampu melakukan pendataan PHBS	Orang		22	321,5			Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx Supervisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah kab/kota yang disupervisi PHBS	Kab/kota		33	192,0		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx Workshop Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah petugas yang mampu melakukan pendataan PHBS	Orang			-	33	250,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx Pertemuan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	Jumlah RS yang menerapkan PKRS	RS			-	30	227,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx Kampanye hidup sehat melalui berbagai media	Jumlah kampanye hidup sehat yang dilaksanakan	kali			1.228,9	65	719,8	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Jumlah dokumen laporan peringatan HKN	dokumen		1	444,6	1	450,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx Workshop komunikasi antar pribadi bagi tenaga promosi kesehatan	Jumlah laporan workshop komunikasi antar pribadi bagi tenaga promosi kesehatan	dokumen				1	179,5	Dinas Kesehatan
				Persentase Kab/Kota yg melaksanakan GERMAS	Persen	25,00	30,00		40,00		
		1.02 01 19	xx Lomba dokter kecil	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan lomba dokter kecil	Dokumen		1	217,1			
		1.02 01 19	xx Koordinasi Pengelolaan Saka Bakti Husada (SBH)	Jumlah dokumen SK terkait SBH yang diterbitkan	dokumen		1	198,9		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx Perkemahan Bakti Pramuka Saka Bakti Husada (SBH) tingkat Daerah Sumatera Utara	Jumlah anggota SBH yg mengikuti perkemahan Bakti	Orang			-	300	300,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx Penguatan gugus depan Saka Bakti Husada	Jumlah laporan penguatan gugus depan SBH	dokumen			-	1	356,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx Kampanye GERMAS bagi perguruan tinggi	Jumlah laporan kampanye GERMAS bagi perguruan tinggi	dokumen			-	1	156,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 19	xx Penggalangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi untuk membudayakan Gernas	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) penggalangan kemitraan dengan PT untuk membudayakan GERMAS	dokumen			-	1	243,4	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							2019		2020			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
		1.02 01 19	xx Penggalangan Kemitraan Dalam Rangka Pemanfaatan CSR dalam Bidang Kesehatan Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kab/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) penggalangan kemitraan dalam rangka pemanfaatan CSR untuk percepatan penurunan stunting	dokumen			-	1	163,0	Dinas Kesehatan	
				Persentase Posyandu aktif	Persen							
		1.02 01 19	xx Forum koordinasi LP/LIS dalam rangka pengembangan Posyandu terintegrasi	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Pokjialan Posyandu	Kab/kota		55,00	-	33	315,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx Workshop pembentukan kader kesehatan	Jumlah petugas yang paham dalam pembentukan kader kesehatan	Orang			225,3		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx Monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen		1	301,6	1	267,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx Pertemuan orientasi kader Posyandu	Jumlah laporan orientasi kader Posyandu	dokumen				1	207,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx Pertemuan penguatan UKBM	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) penguatan UKBM	dokumen				1	98,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx Pertemuan penguatan pemanfaatan dana desa untuk UKBM	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) penguatan pemanfaatan dana desa untuk UKBM	dokumen				1	20,8	Dinas Kesehatan	
				Persentase desa/kelurahan siaga aktif	Persen	38,00	40,00		45,00			
		1.02 01 19	xx Penilaian desa dan kelurahan percontohan bidang kesehatan	Jumlah desa/kelurahan yang dinilai	desa/kel.		33	677,8		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx Workshop pembentukan operasional desa siaga	Jumlah Petugas yang paham dalam pembentukan operasional desa siaga	orang		33	235,9		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 19	xx Rapat berkala pembentukan operasional desa siaga tingkat provinsi	Jumlah lp/lis yang mengikuti pembentukan operasional desa siaga	lp/lis			-	55/11	80,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Persen	70,00	79,00	7.439,6	87,00	1.831,4	Dinas Kesehatan	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen	n/a	35,00		45,00			
		1.02 01 38	xx Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pelayanan kesehatan primer	Dokumen			-	1	237,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Koordinasi Manajemen Puskesmas	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut manajemen puskesmas	Dokumen		1	261,2		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer sesuai Standar	Jumlah dokumen pembinaan dan movev pelayanan kesehatan primer sesuai standar	Dokumen			-	1	165,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Workshop pelayanan kesehatan klinik	Jumlah orang yang paham pelayanan kesehatan klinik	Orang		33	285,5		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Penilaian FKTP Berprestasi di Kab/Kota	Jumlah FKTP berprestasi yang dinilai di kab/kota	FKTP		10	184,8	10	184,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Pertemuan Teknis Puskesmas menuju BLUD	Jumlah orang yang paham teknis puskesmas menuju BLUD	Orang			-	66	249,6	Dinas Kesehatan	
				Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Keperawatan kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dengan Pendekatan Keluarga	%		25		30			
		1.02 01 38	xx Koordinasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut PIS-PK	Dokumen		1	202,4		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Pelatihan Perawat Koordinator Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang terampil dalam Perkesmas	Orang			-	30	150,0	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				<i>Persentase FKTP yang Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional</i>	<i>Persen</i>		30,00		35,00		
		1.02 01 38	xx Workshop Pelayanan Kesehatan Tradisional bagi Pengelola Program Yankestrad	Jumlah orang paham pelayanan kesehatan tradisional	Orang			-	33	160,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Koordinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pelayanan kesehatan tradisional	Dokumen		1	369,8		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pelayanan Akupresure	Jumlah orang yang memperoleh pelayanan akupresur yang disediakan pada event tertentu	Orang		100	37,1	100	39,8	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di DTPK</i>	<i>Persen</i>		30,00		40,00		
		1.02 01 38	xx Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah sulit, rawan bencana/kumuh, terpencil dan sangat terpencil	Jumlah pelayanan kesehatan bergerak yang dilaksanakan	Layanan		6	2.720,3	5	2.583,5	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rawat Inap yang Menerapkan Pelayanan Kegawatdaruratan</i>	<i>Persen</i>		100,00		100,00		
		1.02 01 38	xx Pelatihan Pengelolaan Program Kerjasama antara Puskesmas, UTD dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI	Jumlah orang yang terampil dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI	Puskesmas			-	30	140,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat)	Jumlah orang yang terampil dalam pertolongan pertama gawat darurat	Orang			-	30	236,5	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase Akreditasi FKTP</i>	<i>Persen</i>	71,50	78,80		87,40		
		1.02 01 38	xx Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pendamping dalam Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah orang yang terampil dalam mendampingi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melaksanakan akreditasi	Orang			-	198	800,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pendampingan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	Puskesmas		200	1.162,5		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah dokumen hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Dokumen			-	1	150,0	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah</i>	<i>Persen</i>	76,20	88,10		95,20		
		1.02 01 38	xx Workshop Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah petugas yang paham dalam melaksanakan persiapan akreditasi rumah sakit	Orang		30	236,4	33	189,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Koordinasi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan	Dokumen		33	692,0	72	242,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah dokumen hasil money akreditasi rumah sakit	Dokumen				1	99,1	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase Akreditasi Laboratorium Kesehatan di Kab/Kota</i>	<i>Persen</i>	n/a	9,50		19,00		
		1.02 01 38	xx Workshop Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium Kesehatan	Jumlah orang yang paham dalam pemantapan mutu eksternal labkes	Orang			-	42	130,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Kesehatan	Jumlah dokumen hasil money akreditasi labkes	Dokumen			-	1	59,9	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				<i>Persentase Rumah Sakit yang Menerapkan Standarisasi Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku</i>	<i>Persen</i>	<i>na</i>	61,03		75,12		
		1.02 01 38	xx Koordinasi Penerapan Bidang Standar dan Peralatan Medik	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut penerapan bidang standar dan peralatan medik	Dokumen		2	1.165,5	2	256,2	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase Fasyankes yang Memenuhi Standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)</i>	<i>Persen</i>	20,00	30,00		40,00		
		1.02 01 38	xx Workshop Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK)	Jumlah petugas yang memahami Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK)	Orang		100	548,6	120	323,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Monitoring dan Evaluasi Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah dokumen hasil money Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	Dokumen		1	419,9	1	159,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Workshop Kalibrasi Alat Kesehatan pada RSUD dan RS Swasta	Jumlah orang yang paham tentang kalibrasi alat kesehatan	Orang		100	419,9	66	234,5	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang Meleaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar</i>	<i>Persen</i>	75,00	80,00		85,00		
		1.02 01 38	xx Dukungan layanan medis bergerak	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaan dokter terbang	Dokumen				1	17.113,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi RS	Jumlah orang yang paham tentang pengelolaan sistem informasi RS	Orang				92	237,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pendampingan pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit	Jumlah RS yang dilakukan pendampingan pengelolaan SIRS	RS		5	287,2		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pertemuan Pemanfaatan Sistem Informasi Rumah Sakit (RS Online, SISROUTE, SIRANAP, ASPAK, SIRS)	Jumlah petugas paham tentang Sistem Informasi Rumah Sakit	orang				66	140,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai Standar	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Dokumen			-	2	199,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pertemuan Pengembangan Telemedicine dalam Menunjang Akses Pelayanan	Jumlah orang yang paham tentang pelayanan telemedicine	Orang				66	246,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Kasus		100	1.169,2		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Operasional Badan Pengawas Rumah Sakit dan Sekretariat BPRS Provinsi Sumatera Utara	Jumlah bulan operasional BPRS Provinsi Sumatera Utara	bulan			-	12	600,0	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase RSUD yang Menyenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 Jam</i>	<i>Persen</i>	91,67	92,50		94,00		
		1.02 01 38	xx Workshop Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 jam	Jumlah orang yang mampu tatalaksana PONEK 24 jam	Orang		30	206,3		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)	Jumlah dokumen hasil money PONEK	Dokumen		1	177,5		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Workshop Manajemen dan Konseling Laktasi di Rumah Sakit	Jumlah orang yang paham manajemen dan laktasi di rumah sakit	Orang		34	132,7	40	146,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 38	xx Koordinasi dan Sinkronisasi antara Dinas Kesehatan Kab/Kota dan RS Kab/Kota dalam Manajemen Program PONEK 24 jam	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut manajemen program PONEK 24 jam	Dokumen			-	1	147,6	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							2019		2020			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
		1.02 01 38	xx Sosialisasi sistem rujukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) dan pelayanan obstetri maternal neonatal	Jumlah RS yang mendapat sosialisasi sistem rujukan PONEK dan pelayanan obstetri maternal neonatal			34	103,3		-	Dinas Kesehatan	
				Persentase RSUD Menerapkan PPK-BLUD	Persen	63,00	73,00		78,00			
		1.02 01 38	xx Workshop penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah petugas yang mampu menyusun RBA BLUD	RSUD		24	181,2		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Koordinasi Pola Penerapan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	Jumlah RS yang berkoordinasi dalam penerapan PPK-BLUD	RS		18	127,4		196,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Workshop Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Jumlah dokumen tindak lanjut untuk mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	dokumen			201,4		-	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Pelayanan Gawat Darurat di RSUD sesuai Standar	Persen	87,00	90,00		93,00			
		1.02 01 38	xx Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat)	Jumlah yang mampu melaksanakan PPGD	Orang			-	30	236,5	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kab/ Kota	Persen	na	24,00		36,00			
		1.02 01 38	xx Sosialisasi Pembentukan Public Safety Center (PSC) di Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang paham tentang pembentukan PSC di kab/kota	Kabikota			-	33	149,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 38	xx Workshop Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah orang yang paham SPGDT	Orang		66	232,3	30	112,1	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen	85,00	90,00	11,429,0	92,00	3,644,1	Dinas Kesehatan	
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen		90,00		92,00			
		1.02 01 15	xx Pengadaan Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai	Jumlah item obat, vaksin, dan BMHP yang diadakan	Paket		70	7,282,5	-	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan buffer stok provinsi yang tersedia	Item			-	70	3,500,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO)	dokumen			751,4	1	396,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Workshop Implementasi e-logistik pada Instalasi Farmasi	Jumlah orang yang paham dalam implementasi e-logistik	Orang		66	479,9		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Pemenuhan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	unit		51	568,2	20	588,1	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	Persen	44,63	49,00		55,00			
		1.02 01 15	xx Workshop Penggunaan Obat Rasional (POR) di Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah orang yang paham tentang penggunaan obat rasional	Orang		-	-	33	143,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)	Jumlah orang yang paham tentang Gema Cermat	Orang		-	-	450	376,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 15	xx Workshop Penggunaan Antibiotik yang Rasional bagi Tenaga Kesehatan	Jumlah orang yang paham tentang penggunaan antibiotik yang rasional	Orang		-	-	66	249,3	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	Persen			40,00			Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Workshop Pelayanan Kefarmasian	Jumlah orang yang paham tentang pelayanan kefarmasian sesuai standar	Orang		-	33	138,4		Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar	Jumlah dokumen Rencana dan Tindak Lanjut (RTL) pelayanan kefarmasian	dokumen		-	1	149,9		Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	Jumlah laporan BOK Kefarmasian	dokumen		-	1	305,6		Dinas Kesehatan
				Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standard Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP)	Persen	55,00	60,00	65,00			
		1.02 01 15	xx Workshop dalam rangka Cara Produksi dan Distribusi Sediaan Farnasi yang Baik	Jumlah orang yang paham Cara Produksi dan Distribusi Sediaan Farnasi yang Baik	Orang			141,0	60	200,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Pemetaan Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farnasi	Jumlah dokumen hasil pemetaan sarana produksi dan distribusi sediaan farnasi	dokumen		-	1	209,9		Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Biaya Operasional Pengelolaan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	Jumlah orang yang mendapat biaya operasional pengelolaan P4TO	orang		12	233,1	10	216,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Koordinasi pemanfaatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut pemanfaatan P4TO	Dokumen		1	186,8			
		1.02 01 15	xx Pembinaan dan pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sarana IRTP	Dokumen		1	278,9	1	119,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Pelatihan Tenaga Pengawas Keamanan Pangan (PKP)	Jumlah orang yang terampil dalam PKP	Orang		-	66	283,5		Dinas Kesehatan
				Persentase produk alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat	Persen	69,00	74,00	80,00			
		1.02 01 15	xx Workshop tentang Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB)	Jumlah orang yang paham CPAKB dan CPPKRTB	Orang		60	511,7	99	308,8	Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Workshop Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	Jumlah orang yang paham CDAKB	Orang		100	680,1	105	246,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Distribusi Alat Kesehatan	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut CPAKB, CPPKRTB dan CDAKB	Dokumen			-	1	249,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 15	xx Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut program peningkatan penggunaan Alkes dalam negeri	Orang			-	90	246,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Persen	20,00	30,00	18.710,2	40,00	163,7	Dinas Kesehatan
				Persentase Pelatihan Teknis dan Fungsional yang Terakreditasi	Persen	40,00	50,00	60,00			
		1.02 01 35	xx Sosialisasi akreditasi pelatihan	Jumlah peserta memahami tentang akreditasi pelayanan	Orang		-	-	-	-	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		1.02 01 35	xx Rapat koordinasi perencanaan kebutuhan pelatihan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pelatihan	dokumen		-	-	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan TOC	Jumlah nakes yg terlatih TOC	Orang		-	-	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Monitoring evaluasi pasca pelatihan (EPP)	Jumlah pelatihan yang dilakukan EPP	pelatihan		-	-	-	Dinas Kesehatan	
				Persentase Tenaga Kesehatan yang Dilatih pada Pelatihan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	n/a	3,00		3,00		
		1.02 01 35	xx Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Jumlah petugas yang terlatih fungsional penyuluh kesehatan masyarakat	Orang		60	340,3	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian	Jumlah petugas yang terlatih fungsional sanitarian	Orang		30	187,2	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Keluarga Sehat	Jumlah petugas yang terlatih Keluarga Sehat	Orang		210	1.234,3	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Manajemen Puskesmas	Jumlah petugas yang terlatih Manajemen Puskesmas	Orang		180	1.255,9	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Jumlah petugas yang terlatih pelayanan terpadu PTM	Orang		90	347,7	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan peningkatan kesehatan jiwa remaja melalui keterampilan sosial	Jumlah petugas yang terlatih dalam peningkatan kesehatan jiwa remaja melalui keterampilan sosial	Orang		30	186,6	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan assessment wajib lapor pecandu narkoba	Jumlah petugas yang terlatih dalam assessment wajib lapor pecandu narkoba	Orang		30	152,7	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan deteksi dini dan intervensi singkat penyalahgunaan NAPZA dengan menggunakan Metode Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST)	Jumlah petugas yang terlatih dalam penggunaan metode ASSIST	Orang		30	162,8	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa	Jumlah petugas yang terlatih dalam deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa	Orang		90	334,7	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Tata laksana Gizi Buruk Balita	Jumlah petugas yang terlatih tata laksana gizi buruk balita	Orang		60	212,9	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Petugas Puskesmas	Jumlah orang yang terampil dalam pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di puskesmas	Orang		60	230,2	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit	Jumlah petugas yang terlatih K3 RS	Orang		30	128,9	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Imunisasi bagi Vaksinator Puskesmas	Jumlah orang yang terampil dalam program imunisasi	Orang		30	174,1	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Pengelola Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pemberdayaan Keluarga di Puskesmas	Jumlah orang yang terampil dalam mengelola komunikasi perubahan perilaku untuk pemberdayaan keluarga di puskesmas	Orang			-	13,4	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pelatihan Surveilans dalam Mendukung Advokasi Kesehatan	Jumlah orang terampil dalam melakukan surveilans yang mendukung advokasi kesehatan	Orang		30	152,4	-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 35	xx Pemenuhan sarana dan prasarana UPT. Pelatihan Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Unit		2	9.657,5	-	Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Persen	20,00	30,00		40,00			
	1.02 01 35	xx Sosialisasi rencana pemenuhan tenaga promotif dan preventif	Jumlah peserta yang memperoleh sosialisasi pemenuhan 5 jenis tenaga promotif dan preventif di puskesmas	Orang				-	Dinas Kesehatan		
	1.02 01 35	xx Monitoring evaluasi pemenuhan tenaga kesehatan promotif dan preventif	Jumlah puskesmas yang dilakukan money pemenuhan 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Puskesmas				-	Dinas Kesehatan		

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							2019		2020			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				<i>Persentase tenaga kesehatan yang telah didata berdasarkan pemetaan di Rumah Sakit dan Puskesmas</i>	<i>Persen</i>	30,00	40,00		50,00			
		1.02 01 35	xx Koordinasi pelaksanaan dokter internship	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut pelaksanaan dokter internship	Dokumen		1		918,6		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah dokumen hasil penilaian tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sumatera Utara	dokumen		1		859,9		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pelaksanaan registrasi online tenaga kesehatan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan registrasi online tenaga kesehatan	dokumen		1		910,7		-	Dinas Kesehatan
				<i>Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya</i>	<i>Persen</i>	n/a	50,00		60,00			
		1.02 01 35	xx Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah peserta yang memahami Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Orang		-		50		150,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 35	xx Pengelolaan jabatan fungsional tenaga kesehatan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan jabatan fungsional tenaga kesehatan	Dokumen		1		1.090,8		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 34	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan	Persentase Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	Persen	0	-	27.055,0	20,00	26.457,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 34	xx Peningkatan pelayanan kesehatan UPT. RS Khusus Mata	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	Persen		80	3.047,5	90	2.859,7	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 34	xx Peningkatan pelayanan kesehatan UPT. RS Khusus Paru	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Persen		60	5.281,2	70	4.715,2	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 34	xx Peningkatan pelayanan kesehatan UPT. RSU Kusta Lausimomo	Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta di UPT. RS Kusta Lau Simomo	Persen		25	3.531,5	30	1.905,7	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 34	xx Peningkatan pelayanan kesehatan UPT. RS Indrapura	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Indrapura	Persen		20	5.333,1	50	4.859,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 34	xx Peningkatan pelayanan kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. Labkes	Persen		82,5	937,9	83,0	1.353,1	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 34	xx Penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) pada fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah insitusi fasyankes yang memperoleh dukungan penunahan SPA	unit		5	8.473,4	5	10.408,8	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 34	xx Akreditasi laboratorium kesehatan daerah	Jumlah insitusi labkes yang memperoleh dukungan akreditasi	unit		1	450,0		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 34	xx Penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) pada fasilitas pelayanan kesehatan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT)	Jumlah insitusi fasyankes yang memperoleh dukungan penunahan SPA	unit		-	3	354,6		Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	na	100,00	11.943,8	100,00	3.811,3	Dinas Kesehatan	
				<i>Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) 80% Imunisasi Dasar Lengkap</i>	<i>Persen</i>	80,00	83,00		86,00			
		1.02 01 33	xx Workshop penguatan rantai dingin vaksin	Jumlah petugas yang paham penguatan rantai dingin vaksin	Orang		33	304,2		-	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2019		2020				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
		1.02 01 33	xx Surveilans kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Jumlah kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi terdata dan di investigasi dengan baik	Kasus		20	173,0		67,3	Dinas Kesehatan		
		1.02 01 33	xx Monitoring cold chain	Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring cold chain	Kab/kota							Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Monev pelaksanaan introduksi vaksin baru	Jumlah laporan monev pelaksanaan introduksi vaksin baru	Dokumen					1	66,5	Dinas Kesehatan	
				Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	90,00				93,50			
		1.02 01 33	xx Perencanaan dan evaluasi logistik Imunisasi	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) logistik imunisasi	dokumen				246,9		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Integrasi pencapaian cakupan program Imunisasi dan surveilans PD3I	Jumlah Kab/Kota yang terpapar mengenai integrasi antara kegiatan surveilans PD3I dengan kegiatan Imunisasi	Kab/kota				472,7		-	Dinas Kesehatan	
				Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan Imunisasi DPT HB Hib Lanjutan	Persen	70,00				92,00			
		1.02 01 33	xx Penatalaksanaan Imunisasi lanjutan pada anak bawah dua tahun	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan monitoring pada Imunisasi pada pelaksanaan kegiatan Imunisasi Lanjutan	Kab/kota		33		251,9		-	Dinas Kesehatan	
				Persentase anak sekolah dasar yang mendapatkan Imunisasi tambahan pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah	Persen	90,00				93,00			
		1.02 01 33	xx Pemantauan Imunisasi Lanjutan pada anak usia sekolah	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan untuk kegiatan Imunisasi Lanjutan dan Tambahan khususnya di Bulan Imunisasi Anak Sekolah	Kab/kota		33		598,4	33	650,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Koordinasi program Imunisasi pada Institusi Pendidikan	Jumlah Institusi Pendidikan/ Sekolah yang terpapar mengenai program Imunisasi khususnya pemberian Imunisasi Lanjutan/Tambahan	institusi	4		6	111,4	6	650,0	Dinas Kesehatan	
				Angka Non Polio Acute Flacyd Paralysis (AFP) per 100.000 Anak Usia <15 Tahun	per 100.000 penduduk	1,8		≥ 2		≥ 2			
		1.02 01 33	xx Penemuan Kasus Non Polio AFP dalam rangka Eradikasi Polio	Jumlah kasus Acute Flaccid Paralysis yang ditemukan dan diperiksa laboratorium	Kasus					-	91	200,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Supervisi Pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP)	Jumlah dokumen hasil supervisi pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP)	Dokumen					-	1	50,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Penemuan Kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) dan Discarded Campak	Jumlah kasus AFP dan discarded campak yang ditemukan	Kasus			50	185,2		-		Dinas Kesehatan
				Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Dibandingkan Baseline Data	Persen	n/a		5,00		10,00			
		1.02 01 33	xx Penemuan dan Pelacakan Kasus Discarded Campak dan PD3I lainnya	Jumlah kasus discarded campak dan PD3I yang ditemukan	Kasus					-		104,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Integrasi	Jumlah dokumen hasil monev kasus PD3I integrasi	Dokumen				-	1		350,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Sosialisasi Surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS)	Jumlah orang yang paham Surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS)	Orang				-		-		Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		1.02 01 33	xx Pelaksanaan Outbreak Respon Immunization	Jumlah laporan ORI	Dokumen			1		19,2	Dinas Kesehatan
				Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi	Persen	na	100,00		100,00		
		1.02 01 33	xx Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit (KLB)	Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan dan penyelidikan epidemiologi pada kasus penyakit yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa	lokasi			75,0		68,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan SKDR	Kab/kota		33	126,0		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Workshop Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk Analisis Data Surveilans	Jumlah peserta yang memahami dan mampu memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk Analisis Data Surveilans	Orang		33	186,9		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Supervisi ketepatan dan kelengkapan laporan Surveilans Terpadu Penyakit (STP)	Jumlah kab/kota yang disupervisi ketepatan dan kelengkapan laporan STP	Kab/kota		33	24,8		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Pertemuan Penguatan jejaring sistem kewaspadaan dini (SKD) dan respon penyakit berpotensi wabah	Jumlah dokumen tindak lanjut penguatan jejaring sistem kewaspadaan dini (SKD) dan respon penyakit berpotensi KLB/wabah	dokumen					-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah penduduk pada kondisi KLB yang memperoleh pelayanan kesehatan	Orang					-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Koordinasi/Sinkronisasi Lintas Program/Lintas Sektor Program Bidang P2P	Jumlah laporan koordinasi/sinkronisasi LPLS Bidang P2P	Dokumen			1		90,4	Dinas Kesehatan
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak penyakit infeksi emerging	Persen	80,00	82,00		84,00		
		1.02 01 33	xx Koordinasi antar mitra Lintas Sektor dalam rangka Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kejadian Penyakit Infeksi Emerging di Wilayah	Jumlah dokumen koordinasi antar mitra Lintas Sektor dalam pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kejadian Penyakit Infeksi Emerging	dokumen					-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Penguatan Tim Gerak Cepat Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dalam penanggulangan KLB PIE dan krisis kesehatan	Jumlah petugas TGC PIE yang terampil dalam penanggulangan KLB PIE dan krisis kesehatan	Orang		33	207,5		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Deteksi dini Penyakit Infeksi Emerging (PIE)							-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Penatalaksanaan Penyakit Infeksi Emerging dan kegawatdaruratan kesehatan							-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Monitoring dan evaluasi kegawatdaruratan dan KLB Penyakit Infeksi Emerging (PIE)	Jumlah kab/kota yang dilakukan movev kegawatdaruratan dan KLB PIE	Kab/kota					159,8	Dinas Kesehatan
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	n/a	100,00		100,00		
		1.02 01 33	xx Koordinasi dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana	Jumlah laporan koordinasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana	dokumen				1	78,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk	Jumlah laporan edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk	dokumen					48,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Rapid Health Assessment dalam rangka pengurangan risiko krisis kesehatan	Jumlah laporan RHA dalam rangka pengurangan risiko krisis kesehatan	dokumen				1	107,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Monev dalam rangka Mitigasi Krisis Kesehatan	Jumlah laporan movev dalam rangka mitigasi krisis kesehatan	Dokumen				1	71,8	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
				Persentase Jamaah haji yang mendapatkan pembinaan isitihah kesehatan haji	Persen	70,00	75,00		80,00		
		1.02 01 33	xx Pendampingan pemeriksaan kesehatan haji	Jumlah dokumen laporan pendampingan pemeriksaan kesehatan haji	dokumen		1	104,4		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Pembinaan dan surveilans kesehatan haji	Jumlah kab/kota yang mendapat pembinaan surveilans kesehatan haji	Kab/kota		33	185,6		-	Dinas Kesehatan
				Cakupan Penduduk di Daerah Endemis Mendapatkan Pengobatan Massal Filariasis	Persen	93	95		96		
		1.02 01 33	xx Survey Pemetaan Daerah Penyakit Filariasis	Jumlah dokumen hasil survey pemetaan daerah penyakit filariasis	Dokumen		1	116,4	1	36,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Assesment Penyakit Filariasis	Jumlah dokumen hasil assesment penyakit filariasis	Dokumen		1	93,4		-	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis B	Persen	na	70		80		
		1.02 01 33	xx Bimbingan Teknis Tataaksana Hepatitis B	Jumlah orang yang paham tataaksana Hepatitis B	Orang			-		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan dan Pemanfaatan Vaksin HBIG	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan vaksin HBIG	Dokumen		1	293,5		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Koordinasi Deteksi Dini Hepatitis B dan C	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut deteksi dini Hepatitis B dan C	Dokumen		1	153,7		-	Dinas Kesehatan
				CFR Diare pada Saat KLB	Persen	0	<1,2		<1,2		
		1.02 01 33	xx Survey Penjaja Makanan di Sekolah	Jumlah dokumen hasil Survey Penjaja Makanan di Sekolah	Dokumen		1	110,0		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pencegahan dan pengendalian penyakit diare	Dokumen		1	141,7	1	81,3	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Kecacian pada Anak Sekolah	Persen	13,6	<20		<20		
		1.02 01 33	xx Survey Evaluasi Intensitas Penyakit Kecacian pada Anak Usia Sekolah Dasar	Jumlah dokumen hasil Survey Evaluasi Intensitas Penyakit Kecacian pada Anak Usia Sekolah Dasar	Dokumen		1	297,1	1	63,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kecacian	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pencegahan dan pengendalian penyakit kecacangan	Dokumen		1	29,3		-	Dinas Kesehatan
				Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	per 100.000 penduduk	40,2	49		49		
		1.02 01 33	xx Survey Faktor Risiko Demam Berdarah Dengue (DBD) di Daerah Endemis	Jumlah dokumen hasil Survey Faktor Risiko Demam Berdarah Dengue (DBD) di Daerah Endemis	Dokumen		1	128,7	1	32,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Workshop Tataaksana Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Arbovirolos Lainnya	Jumlah petugas yang mampu tataaksana kasus DBD dan arbovirolos lainnya	Orang		50	270,5	66	39,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Koordinasi Gerakan Satu Rumah Satu Pemantau Jentik (Jumantik)	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut Gerakan Satu Rumah Satu Pemantau Jentik (Jumantik)	Dokumen		1	142,9		168,3	Dinas Kesehatan
				Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk (API)	per 1.000 Penduduk	0,09	0,08		0,07		
		1.02 01 33	xx Workshop Tataaksana Laboratorium Malaria	Jumlah orang yang mampu menegakkan hasil diagnosa laboratorium malaria	Orang		100	88,6		-	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi P2 malaria	Dokumen		1	91,0	1	90,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Mass Blood Survey (MBS) Malaria	Jumlah orang yang dilakukan MBS	Orang		400	67,9		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Bimbingan Teknis Penguatan Tata Laksana dan Temuan Kasus Malaria	Jumlah orang yang mampu tata laksana kasus malaria	Orang		100	68,4		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Koordinasi Penyemprotan Dinding Rumah (IRS) dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut penyemprotan dinding rumah	Dokumen		1	51,9		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Penyemprotan Dinding Rumah (IRS) P2 Malaria	Jumlah laporan penyemprotan dinding rumah (IRS)	Dokumen				1	109,7	Dinas Kesehatan
				Angka Case Detection Rate Penyakit TB	Persen	61,2	60,00		65,00		
		1.02 01 33	xx Ekspansi Program TB Dengan Strategi Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	Jumlah orang yang paham Ekspansi Program TB Dengan Strategi Directly Observed Treatment Short Course (DOTS)	Orang		12	366,6		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Program TB dengan Strategy Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Program TB dengan Strategy Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)	dokumen		1	304,7		-	Dinas Kesehatan
				Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)	Persen	92,5	90,00		90,00		
		1.02 01 33	xx Workshop Tata laksana Tuberkulosis Multi Drug Resisten (MDR)	Jumlah orang yang mampu tata laksana TB MDR	Orang		74	151,9		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Workshop Tata laksana Tuberkulosis Anak	Jumlah orang yang mampu tata laksana TB anak	Orang		50	52,4		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Workshop Tata laksana Tuberkulosis - HIV	Jumlah orang yang mampu tata laksana TB-HIV	Orang		74	133,9		-	Dinas Kesehatan
				Prevalensi HIV-AIDS	Persen	0,33	<0,5		<0,5		
		1.02 01 33	xx Workshop Tata laksana Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS)	Jumlah orang yang mampu tata laksana kasus IMS	Orang		56	128,6		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Mentoring Klinis Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP)	Jumlah dokumen hasil Mentoring Klinis Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP)	Dokumen		1	117,4		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Pemanfaatan Konselor Layanan Konseling dan Tes HIV	Jumlah orang yang mampu tata laksana konseling dan tes HIV	Orang		46	157,2	50	155,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Koordinasi Manajemen Program HIV/AIDS dan IMS	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut manajemen program HIV/AIDS dan IMS	Dokumen		1	191,9		-	Dinas Kesehatan
				Angka Zoonosis Lainnya (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) yang Ditangani sesuai Standar	Persen	72,44	78,00		83,00		
		1.02 01 33	xx Workshop Tata laksana Penyakit Rabies dan Zoonosis Lainnya	Jumlah orang yang paham tata laksana penyakit rabies dan zoonosis lainnya				-		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Pelacakan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dan Lyssa serta Pemantauan Zoonosis Lainnya	Jumlah dokumen hasil monrev pelacakan kasus gigitan hewan penular rabies dan lyssa	Dokumen		1	285,3	1	118,8	Dinas Kesehatan
				Cakupan Penemuan dan Tata laksana Kasus Pneumonia pada Balita	Persen		25,00		30,00		
		1.02 01 33	xx Penatalaksanaan Penyakit Pneumonia pada Balita	Jumlah orang yang paham tata laksana penyakit pneumonia pada balita	Orang		33	357,5	30	175,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pneumonia pada Balita	Jumlah dokumen hasil monrev P2 Pneumonia pada balita	Dokumen		1		1	110,0	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							2019		2020			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
				Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia	per 100.000 penduduk			<0,10	<0,10			
		1.02 01 33	xx Pemeriksaan Frambusia pada Anak Sekolah	Jumlah anak sekolah yang dilakukan pemeriksaan frambusia	Orang			50	85,7	50	35,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Koordinasi Pengendalian Penyakit Frambusia	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pencegahan dan pengendalian penyakit frambusia	Kab/kota			28	123,6		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Survei serologi Frambusia	Jumlah laporan hasil survei serologi Frambusia	dokumen					1	70,6	Dinas Kesehatan
				Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	per 100.000 penduduk	1,24		1,24	1,24			
		1.02 01 33	xx Pemantauan dan Deleksi Dini Kontak Penderita Kusta	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan deteksi dini kontak penderita kusta	Dokumen			1	40,9	1	44,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Rapid Village Survey (RVS) Daerah Fokus Kusta	Jumlah dokumen hasil Rapid Village Survey (RVS) Daerah Fokus Kusta	Dokumen			1	196,6	1	11,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Assesment Kecacatan Penyakit Kusta	Jumlah dokumen hasil assesment kecacatan penyakit kusta	Dokumen			1	41,2		-	Dinas Kesehatan
				Persentase Kab/Kota Melaksanakan Mapping Vektor Penyakit	Persen	15		30		45		
		1.02 01 33	xx Survey Vektor Penyakit dan Binatang Penular Penyakit	Jumlah dokumen hasil Survey Vektor Penyakit dan Binatang Penular Penyakit	Dokumen			17	222,6	1	44,3	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kabupaten/Kota dengan Paling Kurang 40% Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kab/kota	na		5		12		
		1.02 01 33	xx Koordinasi Pembuatan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pembuatan peraturan KTR	dokumen			1	208,3		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Screening Perilaku Merokok pada Anak Sekolah	Jumlah anak sekolah yang di-screening perilaku merokok	Orang			2750	283,7		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik dalam Upaya Implementasi KTR dan UBM	Jumlah petugas yang dilatih upaya implementasi KTR dan UBM	Orang						172,7	Dinas Kesehatan
				Jumlah kabupaten/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan pelayanan terpadu PTM sesuai standar	Kab/kota	n/a		5		10		
		1.02 01 33	xx Pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular (PANDU PTM) [BOK Provinsi - P2P]	Jumlah orang yang terampil dalam Pelayanan PTM secara terpadu	Orang				-		279,9	Dinas Kesehatan
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen	n/a		100,00		100,00		
		1.02 01 33	xx Workshop Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hipertensi	Jumlah orang yang paham tentang SPM Hipertensi	Orang			33	118,4		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Koordinasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hipertensi	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaan SPM Hipertensi	dokumen			1	154,9		-	Dinas Kesehatan
				Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen	n/a		100,00		100,00		
		1.02 01 33	xx Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) DM	Jumlah dokumen money pelaksanaan dan capaian DM	Dokumen			1	174,3		-	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							2019		2020			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
		1.02 01 33	xx Pencegahan dan penanggulangan Diabetes Mellitus (DM) dan gangguan metabolisme	Jumlah kabikota yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan DM dan gangguan metabolisme	Kabikota		33	121,3		-	Dinas Kesehatan	
				Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Cakupan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Paling Kurang 80%	Kabikota		5		12			
		1.02 01 33	xx Deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah orang yang dilakukan deteksi dini faktor resiko PTM	Orang		3300	227,9		161,6	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Sosialisasi Gerakan Nasional Tekan Angka Obesitas (GENTAS)	Jumlah orang yang paham GENTAS	Orang		33	139,6		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Sosialisasi CERDIK penyakit tidak menular	Jumlah orang yang paham CERDIK PTM	Orang		33	220,9		-	Dinas Kesehatan	
				Jumlah kabikota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan deteksi diri penyakit kanker	Kabikota		14		19			
		1.02 01 33	xx Deteksi dini Kanker	Jumlah masyarakat yang diperiksa dalam rangka deteksi dini kanker	Orang		2100	254,9		-	Dinas Kesehatan	
				Jumlah kabikota yang memiliki paling kurang 40% Puskesmas melaksanakan deteksi dini gangguan indera	Kabikota	n/a	16		20			
		1.02 01 33	xx Deteksi Dini Gangguan Indera	Jumlah orang yang diperiksa dalam rangka deteksi gangguan Indera	Orang			-		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Pelatihan Penanggulangan Gangguan Indera Bagi Tenaga Kesehatan Di FKTP [BOK Provinsi - P2P]	Jumlah petugas yang dilatih penanggulangan gangguan Indera	Orang					132,5	Dinas Kesehatan	
				Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen	n/a	100,00		100,00			
		1.02 01 33	xx Koordinasi LP/LS dalam rangka Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pembentukan TPKJM	dokumen		1	190,9		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Penanganan ODGJ Berat dan Kasus Pasung	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat dan kasus pasung yang mendapatkan penanganan	Orang		50	291,0		84,5	Dinas Kesehatan	
				Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza di 30 % SMA/serajat	Kab/Kota	n/a	7,00		14,00			
		1.02 01 33	xx Pelaksanaan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja di Sekolah	Jumlah orang yang mengikuti deteksi dini masalah kesehatan jiwa	Orang			-		-	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Pelatihan Assessment dan Rencana Terapi Gangguan Pengguna Narkotika [BOK Provinsi - P2P]	Jumlah petugas yang dilatih assessment dan rencana terapi gangguan pengguna narkotika	Orang					127,4	Dinas Kesehatan	
				Jumlah Kab/Kota yang memiliki 30 % Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sesuai standar	Kab/Kota	n/a	7,00		14,00			
		1.02 01 33	xx Workshop Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah yang paham tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza	Orang		33	134,8	33	148,3	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa bagi tenaga kesehatan di FKTP	Jumlah orang yang terampil dalam deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa	Orang		-	-	60	350,0	Dinas Kesehatan	
		1.02 01 33	xx Supervisi dan Monitoring Evaluasi Desa Siaga Sehat Jiwa	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi desa siaga sehat jiwa	dokumen		1	39,9		-	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		1.02 01 33	xx Monitoring Evaluasi pelaksanaan program P2M keswa dan napza	Jumlah dokumen monerv program P2M keswa dan napza	Dokumen			-	1	250,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Seminar Awam Kesehatan Jiwa dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa sedunia	Jumlah orang yang paham tentang kesehatan jiwa	Orang				100	100,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa (BOK Provinsi - P2P0	Jumlah orang yang terampil dalam deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa	Orang					274,5	Dinas Kesehatan
				Persentase Penyalahgunaan Napza yang Menjalani Program Rehabilitasi di Fasyankes	Persen	n/a	1,00		3,00		
		1.02 01 33	xx Evaluasi Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)	Jumlah IPWL yang dievaluasi	IPWL		17	178,0	-	-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 33	xx Sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan napza pada remaja dalam rangka hari anti narkoba internasional	Jumlah orang yang paham upaya pencegahan penyalahgunaan napza pada remaja dalam rangka hari anti narkoba internasional	Orang					-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/keurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	34,00	50,00	2.532,8	65,00	3.032,0	Dinas Kesehatan
				Persentase desa/keurahan yang melaksanakan STBM	Persen	34,00	50,00		65,00		
		1.02 01 21	xx Training Of Trainer Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah petugas yang terlatih TOT STBM	Orang		88	403,9		22,8	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah petugas yang paham sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Orang			-	66	220,1	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Monitoring dan evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi STBM	dokumen		1	633,2			Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah dokumen hasil verifikasi pelaksanaan STBM	dokumen			-			Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Advokasi dan Verifikasi 5 Pilar STBM	Jumlah Rencana Tindak Lanjut (RTL) 5 Pilar STBM	dokumen			-	1	892,4	Dinas Kesehatan
				Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan	Persen	79,87	84,00		88,00		
		1.02 01 21	xx Koordinasi hygiene sanitasi pasar sehat	Jumlah kabkota yang menyelenggarakan hygiene sanitasi pasar sehat	Kabkota		33	179,6		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Seosialisasi desa/keurahan sehat iklim	Jumlah laporan sosialisasi desa/keurahan sehat iklim	dokumen			-	1	337,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Pengawasan tempat fasilitas umum	Jumlah laporan pengawasan tempat fasilitas umum	dokumen			-	1	196,2	Dinas Kesehatan
				Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan	Persen	80,01	85,00		90,00		
		1.02 01 21	xx Koordinasi hygienen sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	Jumlah kabkota yang menyelenggarakan hygiene sanitasi TPM	Kabkota		33	172,0			Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Orientasi penjamah dan penanggung jawab makanan	Jumlah laporan orientasi penjamah dan penanggung jawab makanan	dokumen			-	1	209,6	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Stikerisasi tempat pengolahan makanan	Jumlah TPM yang distikerisasi	unit					165,0	Dinas Kesehatan
				Persentase Fasyankes melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	Persen	n/a	70,00		75,00		
		1.02 01 21	xx Training Of Trainer Pengolahan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah petugas yang terlatih TOT pengolahan limbah medis di fasyankes	Orang		66	275,7		9,5	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		1.02 01 21	xx Sosialisasi program kabupaten/kota sehat	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat sosialisasi kab/kota sehat	Kab/kota		20	171,7		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Peningkatan kapasitas dalam rangka pengelolaan limbah medis bagi petugas Puskesmas dan Rumah Sakit dan Fasyankes Lainnya	Jumlah petugas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan limbah medis	Orang			-		420,3	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Pemantauan dan pengawasan limbah medis	Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan limbah medis	dokumen			-	1	136,2	Dinas Kesehatan
				Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Persen	9,21	25,00		50,00		
		1.02 01 21	xx Pengawasan kualitas air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Jumlah PDAM yang dilakukan pengawasan air minum	PDAM		5	44,2		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Pengawasan Penyehatan Air Minum	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan penyeahatan air minum	Kab/kota		33	224,3		14,2	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Pembinaan Sanitasi pondok pesantren	Jumlah pondok pesantren yang mendapat pembinaan	pesantren		20	62,0		21,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Gerakan aksi penyeahatan kawasan Danau Toba	Jumlah kab/kota di kawasan danau toba yang dibina dalam penyeahatan lingkungan	Kab/kota		7	49,5		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Supervisi kesehatan lingkungan pada Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	Jumlah kab/kota yang disupervisi kesehatan lingkungan pada TPM	Kab/kota		33	155,5		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Koordinasi pengolahan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis	RS		25	129,7		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Monitoring dan Evaluasi program kabupaten/kota sehat	Jumlah kab/kota yang dilakukan monev Program kab/kota sehat	Kab/kota		5	30,9		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Pembinaan kabupaten/kota sehat	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan kab/kota sehat	Kab/kota			-		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Advokasi penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan advokasi kab/kota sehat	Kab/kota			-		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 21	xx Verifikasi kabupaten/kota sehat	Jumlah kab/kota yang dilakukan verifikasi	Kab/kota			-		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 44	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan JKN	Persen		75,00	100.850,9	80,00	136.369,0	Dinas Kesehatan
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	72,20	75,00		80,00		
		1.02 01 44	xx Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi	Jiwa		346.965	99.371,4	450.000	135,7	Dinas Kesehatan
		1.02 01 44	xx Workshop Sistem Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah petugas yang mampu dalam sistem kapitasi berbasis komitmen pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	Orang		33	237,3		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 44	xx Koordinasi Pelaksanaan Sistem Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaan sistem kapitasi berbasis komitmen pelayanan	Dokumen		1	642,2		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 44	xx Koordinasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis	Jumlah dokumen rencana kerja dan tindak lanjut penyelenggaraan pertimbangan klinis	dokumen			-	1	240,6	Dinas Kesehatan
		1.02 01 44	xx Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN	1			-	1	50,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 44	xx Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)	Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi	Jiwa			-		307,5	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		1.02 01 36	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas	dokumen		13	6.884,1	12	4.271,3	Dinas Kesehatan
				<i>Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas</i>	<i>dokumen</i>	13	14		13		
		1.02 01 36	xx Koordinasi teknis pembangunan kesehatan	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) koordinasi teknis pembangunan kesehatan	dokumen		1	664,6	1	250,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	dokumen		5	641,9	5	109,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Workshop penyusunan Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE)	Jumlah dokumen rencana PBE (DAK Bidang Kesehatan) Dijen. Pelayanan Kesehatan	dokumen		1	237,2		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen RKA DAK Bidang Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota	dokumen		1	297,0		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Forum Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen Berita Acara Forum Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	dokumen		1	306,4		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesda Provinsi Sumatera Utara	dokumen		1	426,0		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Workshop penyusunan indikator kesehatan	Jumlah petugas yang paham menyusun indikator program/kegiatan kesehatan	Orang		80	213,4		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Monitoring, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan kesehatan	Jumlah dokumen hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesehatan	Dokumen		3	852,1	3	149,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi - Dukungan Manajemen	Jumlah laporan BOK Provinsi - Dukungan Manajemen	Dokumen				1	1.880,9	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan	Jumlah laporan BOK Tambahan	Dokumen				1	150,0	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx	<i>Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan</i>	<i>Persen</i>	100,00	100,00		100,00		
		1.02 01 36	xx Penyusunan profil kesehatan	Jumlah dokumen profil kesehatan Provinsi Sumatera Utara	dokumen		1	294,7	1	37,5	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR)	Jumlah kab/kota yang mendapatkan bimtek pemanfaatan aplikasi PMKDR	Kab/Kota		10	246,1		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Pembinaan manajemen data dan sistem informasi kesehatan	Jumlah kab/kota yang dibina dalam manajemen data dan SIK	Kab/Kota		33	228,4	33	133,6	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Workshop District Health Information System (DHIS) 2	Jumlah petugas yang paham DHIS 2	Orang		33	340,1		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Workshop SIKDA Genetik	Jumlah petugas yang paham SIKDA Genetik	Orang				-	-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Koordinasi kehumasan, organisasi, dan hukum kesehatan	Jumlah dokumen koordinasi kehumasan, organisasi, dan hukum kesehatan	dokumen		1	460,2		-	Dinas Kesehatan
		1.02 01 36	xx Tata kelola produk hukum, peraturan serta penerapan peraturan dan perundang-undangan bidang kesehatan	Jumlah produk-produk hukum, peraturan dan perundang-undangan bidang kesehatan yang disusun, disosialisasikan dan diterapkan.	Peraturan			-	4	88,2	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		1.02 01 36	xx Tata Kelola Kehumasan, Komunikasi Publik dan Publikasi	Persentase pelayanan kehumasan, komunikasi publik dan publikasi melalui media cetak, elektronik, media sosial, rilis pers, penerbitan dan media tatap muka yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Persen		-	65	68,4	Dinas Kesehatan	
				<i>Jumlah dokumen kerja sama program, lintas sektor, dan antar daerah dalam bidang kesehatan</i>	<i>dokumen</i>			7			
		1.02 01 36	xx Koordinasi kemitraan program, lintas sektor, dan antar daerah dalam bidang kesehatan	Jumlah dokumen kerja sama program/LSI antar daerah dalam bidang kesehatan	dokumen		1.675,2	7	1.446,7	Dinas Kesehatan	
T o t a l Dinas Kesehatan								258.409,3		238.626,9	

Tabel T.C.27. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

[illegible]

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RP-JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							2021		2022		2023		
							Target	Rp (juta)			Target		Rp (juta)
							Target	Rp (juta)			Target		Rp (juta)
		1.02 01 1.06	05 Penyediaan Barang Cetaklan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetaklan dan penggandaan yang disediakan	Paket		7	882,7	7	873,0	7	960,3	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen		7	120,0	7	173,7	7	191,1	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan		1	63,6	1	318,0	1	349,8	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan		7	2.407,2	7	1.324,9	7	1.457,4	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen		-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.06	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen		-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		1.02 01 1.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit		-	-	5	3.840,0	2	10.000,0	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket		-	-	5	1.213,2	5	1.334,5	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		-	-	26	417,0	35	458,7	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit		-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit		-	-	2	916,8	5	1.008,5	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		1.02 01 1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan		7	32,6	7	44,5	7	49,0	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan		7	4.274,6	7	4.039,1	7	4.443,0	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		7	13.981,8	7	14.696,3	7	16.094,5	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		1.02 01 1.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	unit		12	406,2	15	1.214,4	15	1.335,8	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.09	02 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	unit		167	1.420,8	167	1.463,5	167	1.609,9	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.09	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit		-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit		7	650,9	7	863,6	6	950,0	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		1	1.532,2	8	13.020,1	8	14.322,1	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		-	-	1	86,2	1	93,7	Dinas Kesehatan/ UPT
		1.02 01 1.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit		-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan/ UPT

Program Prioritas

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RP JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		
							Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen		100,00	428.806,4	100,00	361.420,3	100,00	499.664,2	Dinas Kesehatan
			Prevalensi stunting pada balita	Persen		28,50		27,50		26,50			
	Meningkatnya status gizi masyarakat		Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan	per 1.000 penduduk			1,5		1,5		1,5		
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Menurunnya angka kesakitan		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen			100,00		100,00		100,00		
			Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan	per 1.000 penduduk			1,5		1,5		1,5		
		1.02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										
		1.02 02 1.01	01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1.000	unit		-	-	-	-			
		1.02 02 1.01	02 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio Tempat Tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1.000	unit		-	-	-	-			
		1.02 02 1.01	09 Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Rumah Sakit	unit		-	-	-	-			
		1.02 02 1.01	10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	unit		-	-	-	473,8		521,2	
		1.02 02 1.01	11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	unit		-	-	-	-			
		1.02 02 1.01	12 Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	unit		-	-	-	-			
		1.02 02 1.01	14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk, dan habis pakai lainnya) yang disediakan	Paket		-	-	-	2	36,2		39,8
		1.02 02 1.01	16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah barang penunjang operasional rumah sakit yang disediakan	unit		-	-	-	-			
		1.02 02 1.01	17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit		-	-	-	-			
		1.02 02 1.01	18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	unit		-	-	-	-			
		1.02 02 1.01	19 Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	unit		-	-	-	-			
		1.02 02 1.01	20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	unit		-	-	-	-			
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, Laboratorium Kesehatan	persen		1,5		1,5		1,5		

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RP JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2021		2022		2023			
							Target	Rp (juta)			Target		Rp (juta)	
		1.02 02 1.01	04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	unit		-	-	-					
		1.02 02 1.01	08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	unit		-	-	-					
		1.02 02 1.01	15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium yang disediakan dan dipelihara	unit			2.936,7		4.315,4		4.746,9	UPT, Rumah Sakit/ UPT, Labkes	
				Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK)	Persen		30,00		55,00		60,00			
		1.02 02 1.01	06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah pelayanan kesehatan di DTPK (pelayanan kesehatan bergerak, gugus pulau, pelayanan kesehatan berbasis telemedicine, dll) dilakukan pengembangan	layanan		1	4.559,0		8.791,1		9.670,2	Dinas Kesehatan/ UPT, Rumah Sakit/ UPT, Labkes	
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen		94,00		95,00		96,00			
				Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	Persen		60,00		67,00		70,00			
				Persentase sarana pelayanan kesehatan Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kelamasan	Persen		43,00		58,00		60,00			
		1.02 02 1.01	21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	dokumen		1	260,0	1	404,6	1	445,1		
		1.02 02 1.01	22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	Paket		1	2.382,9	1	20.827,8	1	22.910,6		
		1.02 02 1.01	23 Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang didistribusikan ke kabupaten/kota	Paket		-	-	-	-	1			
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen		100,00		100,00		100,00			
		1.02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
		1.02 02 1.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar	Orang			160.425,8		2.519,9		2.771,9		
				Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen		100,00		100,00		100,00			
		1.02 02 1.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			289,5		50.390,2		70.000,0		
		1.02 02 1.02	28 Pengelolaan Penellihan Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	dokumen		-	-	2	2.121,3	2	2.333,4		
				Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen		100,00		100,00		100,00			
				Persentase Ibu bersalin Mendapatkan Pelayanan Ibu bersalin	Persen		100,00		100,00		100,00			
				Cakupan pelayanan nifas	Persen		88,00		90,00		92,00			

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RP.JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		
							Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	
				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Pelayanan Balita sesuai Standar	Persen		100,00		100,00		100,00		
				Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persen		94,00		94,10		94,60		
				Persentase anak usia sekolah dasar mendapatkan imunisasi lanjutan Difteri Tetanus (DT)	Persen		n/a		90,00		93,00		
				Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	Persen		n/a		71,00		75,00		
				Jumlah kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Kab/Kota		n/a		29		30		
				Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak-Rubella	Persen		n/a		85,60		90,30		
				Persentase RSUD yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam	Persen		96,00		98,00		100,00		
		1.02 02 1.02	03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	dokumen		1	2.186,1	1	2.095,5	1	2.305,1	Dinas Kesehatan
		1.02 02 1.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	dokumen		1	89,7	1	459,8	1	505,8	
		1.02 02 1.02	18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan lintas kabupaten/kota	dokumen		1	615,3	1	765,4	1	841,9	
		1.02 02 1.02	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen		100,00		100,00		100,00		
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	dokumen		1	317,3	1	427,9	1	470,7	Dinas Kesehatan
				Cakupan bayi kurang 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Persen		50,00		51,00		52,00		
				Persentase kabupaten/kota melakukan surveilans gizi	Persen		38,00		40,00		45,00		
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen		28,50		27,50		26,50		
				Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Persen		7,90		6,40		5,00		
				Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) pada balita	Persen		12,00		10,00		9,00		
				Persentase Puskesmas mampu talaksana gizi buruk pada balita	Persen		n/a		15,00		20,00		
				Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat MP-ASI	Persen		65,00		70,00		75,00		
				Persentase ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persen		60,00		70,00		80,00		
		1.02 02 1.02	06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	dokumen		1	21.835,5	1	37.003,7	1	40.704,1	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Persen		65,00		70,00		75,00		
		1.02 02 1.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	dokumen		1	509,8	1	1.190,5	1	1.309,6	Dinas Kesehatan
				Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen		65,00		70,00		75,00		

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RP.JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		
							Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	
							Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	
				Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Persen		60,00		70,00		75,00		
				Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan	Persen		40,00		45,00		50,00		
				Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan	Persen		30,00		40,00		45,00		
				Persentase Fasilitas kesehatan melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	Persen		55,00		60,00		65,00		
				Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan talanan kawasan sehat	Kab/Kota		12		13		15		
		1.02 02 1.02	08	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	dokumen		1	895,3	1	1.173,6	1	1.291,0	Dinas Kesehatan
				Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen		67,00		68,00		69,00		
		1.02 02 1.02	09	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	dokumen		1	1.110,5	1	583,8	1	642,2	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	Persen		40,00		45,00		50,00		
		1.02 02 1.02	10	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional Lainnya	dokumen		1	778,7	1	224,6	1	247,1	Dinas Kesehatan
				Angka Case Detection Rate Penyakit TB	Persen		34,00		45,00		55,00		
				Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)	Persen		90,00		90,00		90,00		
				Prevalensi HIV/AIDS	Persen		< 0,21		< 0,5		< 0,5		
				Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk (API)	Persen		0,06		0,10		0,09		
				Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	per 100.000 Penduduk		< 49		< 49		< 49		
				Prevalensi Kecacingan pada Anak Sekolah	Persen		< 20		< 10		< 10		
				Angka mikrolalaria rate (Mf Rate)	Persen		< 1		< 1		< 1		
				Persentase Puskesmas melaksanakan pencegahan dan pengendalian Hepatitis B	Persen		71,00		80,00		90,00		
				CFR Diare pada Saat KLB	Persen		< 1,2		< 1,2		< 1,2		
				Angka Zoonosis lainnya (flu burung, rabies, antraks, leptospirosis) yang dilngani sesuai standar	Persen		78,00		80,00		85,00		
				Cakupan Penemuan dan Tata laksana Kasus Pneumonia pada Balita	Persen		35,00		55,00		60,00		
				Angka penemuan kasus Frambusia per 100.000 penduduk	per 100.000 Penduduk		< 0,10		< 0,10		< 0,10		
				Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk	per 100.000 Penduduk		1,24		< 5		< 5		
				Angka cacat kusta tingkat 2	Persen		< 10		< 10		< 10		
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen		100,00		100,00		100,00		

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RP-JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							2021		2022		2023			
							Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)		
							Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)		
				Jumlah Kabupaten/Kota dengan Paling Kurang 40% Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kab/Kota		19		24		29			
				Jumlah kabupaten/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan pelayanan terpadu PTM sesuai standar	Kab/Kota		18		20		25			
				Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Cakupan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Paling Kurang 80%	Kab/Kota		2		10		15			
				Jumlah kab/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan deteksi dini penyakit kanker	Kab/Kota		14		23		29			
				Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi	Kab/Kota		n/a		5		10			
		1.02 02 1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen		1	2.203,7	1	2.178,9	1	2.396,8		Dinas Kesehatan
		1.02 02 1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	dokumen		1	321,1	1	105,6	1	116,2		
		1.02 02 1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Paket		1	61,9	1	38,7	1	42,6		
				Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		100,00		100,00		100,00			
		1.02 02 1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	dokumen		1	146,5	1	100,1	1	110,1		Dinas Kesehatan
				Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen		100,00		100,00		100,00			
				Jumlah kab/kota yang memiliki 30% Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sesuai standar	Kab/Kota		21		24		27			
		1.02 02 1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	dokumen		1	386,7		485,8		534,4		Dinas Kesehatan
				Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA/Seaterajet	Kab/Kota		20		24		27			
				Persentase pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan NAPZA yang menjalani program rehabilitasi medis	Persen		1,20		1,30		1,50			
		1.02 02 1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	orang			305,9		207,0	-	227,7		Dinas Kesehatan
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen		85,00		78,3		80,30			
		1.02 02 1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen		1	206.730,2	1	206.951,1	1	315.000,0		Dinas Kesehatan
				Angka Non Acute Flaccid Paralysis (AFP) per 100.000 anak usia <15 tahun	angka		≥ 2		≥ 2		≥ 2			
				Persentase kabupaten/kota yang merespon alert SKDR minimal	Persen		n/a		70,00		80,00			
		1.02 02 1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen		1	532,2	1	186,2	1	204,8		Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RP/JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		
							Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)		
				Persentase Puskesmas yang menerapkan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) dengan pendekatan keluarga	Persen		30,00		50,00		60,00		
				Persentase FKTP yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		45,00		65,00		75,00		
				Persentase FKTP rawat inap yang melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan	Persen		100,00		100,00		100,00		
		1.02 02 1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	dokumen		1	851,6	1	494,9	1	544,4	Dinas Kesehatan
		1.02 02 1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	dokumen		1	110,1	1	123,2	1	135,5	
				Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	Persen		85,00		90,00		95,00		
				Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Persen		80,00		90,00		95,00		
				Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Kusta Lausnomo	Persen		n/a		85,00		90,00		
				Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Indragiri	Persen		70,00		90,00		95,00		
		1.02 02 1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dokumen		4	12.035,6	3	11.330,1	3	12.463,1	Dinas Kesehatan (UPT Rumah Sakit)
				Cakupan Pelayanan Gawat Darurat di RSUD sesuai Standar	Persen		95,00		98,00		100,00		
				Cakupan pelaksanaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di kabupaten	Persen		48,00		61,00		73,00		
		1.02 02 1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit			2.219,9		2.244,0	33	2.468,4	Dinas Kesehatan
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak penyakit infeksi emerging	Persen		86,00		90,00		95,00		
		1.02 02 1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	dokumen		1	161,2	0	-	1	177,3	Dinas Kesehatan
				Persentase Fasyankes yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	Persen		60,00		80,00		90,00		
				Persentase Rumah Sakit yang menerapkan standarisasi klasifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen		72,00		78,70		90,00		
		1.02 02 1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dokumen		-	1.132		600,4	30	660,4	Dinas Kesehatan
				Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan	Persen		100,00		100,00		100,00		
		1.02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi										
		1.02 02 1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen		1	382,0	1	430,4	1	473,4	Dinas Kesehatan
		1.02 02 1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen		1	728,6	1	382,2	1	420,4	Dinas Kesehatan
		1.02 02 1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	unit		5	95,4	5	152,8	5	168,1	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RP JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		
							Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	
				Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen		90,00	95,00			100,00		
				Persentase RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	Persen		66,60	76,00			78,00		
		1.02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										
		1.02 02 1.04	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi, dan dindaklanjuti perizinannya	unit			645,9	422,9	2	465,2		Dinas Kesehatan
		1.02 02 1.04	02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	unit			257,4	634,6	2	698,1		Dinas Kesehatan
				Persentase FKTP yang terakreditasi	Persen		90,70	91,70			95,00		
				Persentase RS Pemerintah (Non BUMN/TN/Poin) yang terakreditasi	Persen		85,70	88,40			95,30		
				Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi	Persen		38,10	21,70			50,00		
		1.02 02 1.04	03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) pelayanan kesehatan	unit			306,2	546,3	1	600,9		Dinas Kesehatan
		1.02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan	Persen		30,00	31.736,0	21.174,3	50,00	23.291,7		Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan	Persen		30,00	40,00			50,00		
				Persentase Rumah Sakit yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Persen		n/a	45,00			55,00		
		1.02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi										
		1.02 03 1.01	01 Penuhulan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes)	orang			29.769,7	18.864,9		20.751,4		Dinas Kesehatan
		1.02 03 1.01	02 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdistribusi	orang			181,5	272,2		299,4		Dinas Kesehatan
				Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen		11,00	20,00			30,00		
				Persentase Tenaga Kesehatan yang Dilatih pada Pelatihan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen		1,00	2,00			3,00		
		1.02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										
		1.02 03 1.02	01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	orang		-	1.156,5	1.684,0		1.852,4		Dinas Kesehatan/ UPT, Pelatihan kesehatan
		1.02 03 1.02	02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	dokumen		1	628,3	353,2	1	388,5		Dinas Kesehatan
		1.02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen		80,00	230,5	442,5	100,00	886,8		Dinas Kesehatan
				Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	Persen		n/a	100,00			100,00		
				Persentase sarana produk kelemasan yang dibina agar memenuhi standar cara produksi yang baik	Persen		70,00	73,00			75,00		

Tujuan	Sasaran	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL RP.JMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
							2021		2022		2023				
							Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)			
				Persentase sarana produksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang menerapkan CPAKB, CPPKRTB, dan CDAKB	Persen		n/a		100,00		100,00				
		1.02 04 1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyulur Alat Kesehatan												
		1.02 04 1.01	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan perizinan	sarana		1	171,2	1	356,0	1	391,6	Dinas Kesehatan		
		1.02 04 1.01	02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah data perizinan pengakuan PBF Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan Cabang PAK berbasis elektronik	dokumen		1	59,3	1	86,5	1	95,2	Dinas Kesehatan		
				Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen		n/a		90,00		100,00				
		1.02 04 1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)												
		1.02 04 1.02	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional	sarana		-	-	-	-	1	200,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 04 1.02	02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil data sarana UKOT yang sudah menerapkan perizinan berbasis elektronik	dokumen		-	-	-	-	1	200,0	Dinas Kesehatan		
		1.02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Gemas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Persen		50,00	1.299,1	70,00	1.694,1	75,00	8.616,6	Dinas Kesehatan		
				Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Gemas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Persen		50,00		70,00		75,00				
		1.02 05 1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi												
		1.02 05 1.01	01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Provinsi	dokumen		1	561,0	1	420,1	1	462,1			
		1.02 05 1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi												
		1.02 05 1.02	01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	dokumen		1	586,9	1	860,8	1	7.500,0			
		1.02 05 1.02	02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penumbuhan kesadaran dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dokumen		-	-	-	-	1	200,0			
				Persentase desa/kelurahan siaga aktif	Persen		41,00		45,00		50,00				
				Persentase Posyandu aktif	Persen		57,00		58,00		59,00				
		1.02 05 1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi												
		1.02 05 1.03	01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi UKBM	dokumen		1	151,2	1	413,2	1	454,5	Dinas Kesehatan		
Total Dinas Kesehatan								628.766,7		563.598,3		728.642,3			

Tabel. Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023

No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Sasaran KSD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja KSD dan Kerangka Pendanaan		
								2022		2023
								Target	Anggaran (Rp.)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12.	Penanggulangan COVID-19 melalui penguatan pola 3T (<i>testing, tracing, treatment</i>), percepatan vaksinasi, penyediaan obat-obatan, penguatan kapasitas Rumah Sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis	Menurunnya kasus COVID-19 dan meningkatnya cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase kasus aktif, Persentase kasus meninggal, Persentase keterisian tempat tidur (<i>Bed Occupancy Rate</i> /BOR)	Persen	Di bawah rata-rata Nasional	70.000.000.000	Di bawah rata-rata Nasional
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Di atas rata-rata Nasional		Di atas rata-rata Nasional
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase kasus sembuh dan cakupan vaksinasi COVID-19 di atas rata-rata Nasional	Persen			
					Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					

No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Sasaran KSD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja KSD dan Kerangka Pendanaan			
								2022		2023	
								Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14.	Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan stunting	Tersedianya suplementasi gizi dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK, balita kurus, dan anak sekolah dalam rangka memenuhi konsumsi harian sesuai kebutuhan berdasarkan angka kecukupan gizi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah ibu hamil KEK, balita kurus dan/atau anak sekolah yang mendapatkan suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan	Jiwa (kumulatif)	126.568	33.500.000.000	250.000	35.000.000.000
16.	Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 Kabupaten/Kota	Meningkatnya aktivitas fisik, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi, pencegahan dan deteksi penyakit, kualitas lingkungan dan edukasi hidup sehat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Tingkat Daerah Provinsi Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan KIE GERMAS	Kab/Kota	33	6.000.000.000	33	7.500.000.000

No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Sasaran KSD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja KSD dan Kerangka Pendanaan			
								2022		2023	
								Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17.	Pemberian jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh Sembilan) jiwa	Meningkatnya cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan terlindunginya masyarakat miskin dan/atau tidak mampu Provinsi Sumatera Utara dari beban finansial akibat penyakit katastrofik	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah PBPJ/BP Provinsi yang didaftarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PBI Provinsi)	Jiwa	180.000	210.000.000.000	420.000	315.000.000.000
						Jumlah peserta PBI JKN yang dibayarkan kontribusinya	Jiwa	4.733.689		4.733.689	
18.	Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/ bus Kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan Kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, dan tidak mendapat pelayanan kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil medis/ bus Kesehatan dan/atau kendaraan operasional/ lapangan	Unit	3	2.600.000.000	2	10.000.000.000

